Berita Jumat, 6 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Jumat, 6 November 2026, menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi perhatian utama berbagai negara, terutama akibat kenaikan harga energi dan pangan. Di Thailand, inflasi pada Oktober 2026 mencapai 3,9 persen, meningkat dari 2,82 persen pada September dan melampaui target Bank of Thailand sebesar 1–3 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak serta biaya pangan akibat banjir. Meskipun tekanan harga semakin tinggi, Bank of Thailand masih mempertahankan suku bunga pada tingkat 1 persen karena menilai kenaikan inflasi bersifat sementara dan permintaan domestik masih lemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa setiap negara menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan harga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan moneter perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.

Tekanan inflasi yang terjadi di Thailand juga sejalan dengan perhatian Federal Reserve Amerika Serikat terhadap perkembangan harga. Gubernur Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, menilai bahwa suku bunga perlu berada pada tingkat restriktif agar inflasi dapat kembali menuju target 2 persen. Menurutnya, penyesuaian suku bunga yang lebih kecil tetapi dilakukan lebih sering dapat membantu bank sentral merespons perubahan ekonomi secara tepat dan mengurangi risiko kebijakan yang terlambat. Pandangan tersebut muncul ketika inflasi Amerika Serikat masih berada di atas target selama hampir enam tahun dan tekanan harga dipengaruhi oleh faktor penawaran maupun permintaan. Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja mulai menunjukkan peningkatan aktivitas, sehingga kebijakan suku bunga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Selain persoalan inflasi, perkembangan ekonomi internasional juga memperlihatkan pentingnya menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Sri Lanka, misalnya, mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami krisis ekonomi berat pada 2022, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi selama 12 kuartal berturut-turut dan peningkatan cadangan devisa menjadi US$6,9 miliar pada akhir Oktober 2026. Namun, pemulihan tersebut masih menghadapi tantangan berupa beban utang, kenaikan harga energi, inflasi, serta tingkat kemiskinan yang belum kembali seperti sebelum krisis. Oleh karena itu, anggaran pemerintah Sri Lanka untuk 2027 menjadi penting dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus menyediakan ruang bagi pembangunan. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak cukup hanya ditandai dengan pertumbuhan dan membaiknya indikator keuangan, tetapi juga perlu disertai kemampuan pemerintah menjaga kestabilan anggaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai dinamika internasional tersebut turut memengaruhi perkembangan pasar keuangan global, termasuk pergerakan dolar Amerika Serikat, yen Jepang, harga emas, dan nilai tukar mata uang negara-negara Asia. Ketidakpastian ekonomi dan perubahan ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Amerika Serikat menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan aset keuangan. Dalam kondisi tersebut, nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan sehingga ditutup melemah bersama sejumlah mata uang Asia. Pergerakan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dunia, terutama melalui perubahan arus modal, nilai tukar, harga komoditas, dan kebijakan moneter negara-negara utama. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi nasional perlu terus diperkuat agar tekanan dari luar negeri tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri.

Memasuki perekonomian Indonesia, perkembangan nilai tukar rupiah menjadi salah satu perhatian utama karena pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya impor dan memengaruhi kestabilan harga. Meskipun rupiah mengalami tekanan, cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2026

tercatat meningkat tipis, yang menunjukkan adanya upaya menjaga ketahanan eksternal di tengah kondisi pasar keuangan yang belum stabil. Di sisi lain, perkembangan ekonomi nasional menunjukkan adanya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi sektor riil. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,47 persen, tetapi sejumlah sektor usaha masih menghadapi kondisi yang belum sepenuhnya kuat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu langsung dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan produksi, investasi, serta daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, serta penerimaan dan belanja pemerintah. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan uang primer pada Oktober 2026 melambat menjadi 7 persen, sementara sejumlah ekonom memperkirakan penurunan suku bunga acuan baru dapat terjadi pada semester kedua 2027. Bahkan, tekanan terhadap rupiah dan perkembangan ekonomi global memunculkan proyeksi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada 2027. Pada saat yang sama, utang pemerintah hingga September 2026 mencapai Rp10.326 triliun atau setara 40,30 persen terhadap produk domestik bruto. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, pengelolaan utang, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi agar kebijakan yang diterapkan tetap mampu menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan perekonomian nasional.

Selain stabilitas moneter dan fiskal, perekonomian Indonesia juga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan sektor usaha dalam berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan oleh sektor riil terlihat dari masih banyaknya pekerja yang berada di sektor informal, meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pekerjaan, pendapatan, dan perlindungan bagi tenaga kerja. Sementara itu, kenaikan harga pangan, termasuk cabai dan bawang, dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, penguatan ekonomi nasional perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja yang layak, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan agar lebih merata.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut kemudian tercermin dalam berbagai kebijakan dan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah, terutama melalui penguatan ekonomi desa, pengendalian harga pangan, serta peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan desa wisata melalui strategi Sigap Deswita sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Di wilayah Banyumas Raya, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya sinergi pembangunan daerah dan transformasi ekonomi, serta menilai kawasan tersebut memiliki peran sebagai salah satu penopang ekonomi Jawa Tengah. Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama pemerintah daerah dengan Bank Indonesia dan berbagai pihak untuk meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Dengan adanya pengembangan potensi desa dan penguatan kerja sama antarlembaga, perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kegiatan usaha, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah di Jawa Tengah juga terus berupaya menjaga kestabilan harga dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyumas memperluas kerja sama dalam pengendalian harga pangan, sedangkan Jawa Tengah memperkuat Satuan Tugas Pengendalian Harga untuk mengantisipasi penimbunan bahan pangan. Langkah tersebut menjadi penting karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Selain itu, penerimaan daerah juga terus diperkuat melalui sektor pajak dan retribusi, seperti penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor di Blora yang mencapai Rp50,21 miliar, serta pendapatan asli daerah dari parkir yang mencapai Rp1,03 miliar hingga akhir Oktober. Di Kota Semarang, pemerintah daerah menggandeng kejaksaan untuk menagih piutang pajak yang masih belum terpenuhi, sementara pertumbuhan jumlah restoran menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penguatan keuangan daerah dan pengendalian harga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan serta menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, perkembangan ekonomi Jawa Tengah juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan penguatan kegiatan usaha masyarakat. Jepara memperluas kerja sama internasional berkelanjutan dengan 15 negara sahabat, sementara berbagai pihak di Jawa Tengah mendorong transformasi ekonomi dan penguatan pembangunan wilayah selatan agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Di Wonosobo, pelantikan Mohamad Kristijadi sebagai Sekretaris Daerah definitif menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan penyelesaian persoalan anak tidak sekolah. Sementara itu, potensi kenaikan permintaan daging sapi sebesar 20–30 persen menjelang akhir tahun hingga awal 2027 perlu diperhatikan karena keterbatasan akses pasokan dan penguasaan stok oleh kelompok perusahaan tertentu berpotensi memengaruhi harga. Secara keseluruhan, berita ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi membutuhkan keterkaitan antara pengendalian inflasi, pengelolaan keuangan yang sehat, penguatan sektor riil, pemerataan kesejahteraan, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Ringkasan

- Inflasi Thailand pada Oktober 2026 mencapai 3,9 persen secara tahunan, naik dari 2,82 persen pada September dan berada di atas target Bank of Thailand sebesar 1–3 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dan biaya pangan akibat banjir. Meskipun tekanan harga semakin tinggi, Bank of Thailand masih mempertahankan suku bunga sebesar 1 persen karena menilai kenaikan inflasi hanya bersifat sementara, sedangkan permintaan dalam negeri masih lemah.
- Gubernur Federal Reserve Bank of Cleveland Beth Hammack menyampaikan bahwa kebijakan suku bunga perlu diarahkan pada tingkat yang cukup ketat agar inflasi dapat kembali ke target 2 persen. Ia lebih memilih penyesuaian suku bunga dalam jumlah lebih kecil tetapi dilakukan lebih sering supaya kebijakan tidak tertinggal dari perubahan kondisi ekonomi. Menurutnya, tekanan inflasi Amerika Serikat masih dipengaruhi faktor penawaran dan permintaan, sementara pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas.
- Beth Hammack menegaskan bahwa keputusan suku bunga Federal Reserve harus didasarkan pada bukti dan data ekonomi, bukan tekanan politik jangka pendek. Independensi tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas bank sentral, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, perkembangan penggunaan stablecoin dan kemungkinan pemanfaatannya oleh perusahaan teknologi serta sistem kecerdasan buatan juga terus dicermati karena dapat mengubah pola pembayaran pada masa mendatang.
- Setelah mengalami krisis ekonomi berat pada 2022, Sri Lanka berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi selama 12 kuartal berturut-turut dan meningkatkan cadangan devisa menjadi US$6,9 miliar pada akhir Oktober 2026. Namun, pemerintah masih harus menjaga disiplin fiskal, mengendalikan inflasi, dan memastikan utang tetap berkelanjutan menjelang berakhirnya program bantuan Dana Moneter Internasional pada Maret 2027. Anggaran 2027 yang akan

diumumkan pada 12 November menjadi salah satu penentu arah pemulihan dan kemampuan negara tersebut kembali mengakses pasar obligasi internasional.

- Meskipun kondisi ekonomi dan cadangan devisa membaik, tingkat kemiskinan pada 2025 masih mencapai sekitar 16,9 persen dan lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Sri Lanka tumbuh 4,4 persen pada 2026 dan 4,2 persen pada 2027, tetapi negara tersebut perlu mengurangi ketergantungan pada investasi pemerintah dan pembiayaan utang. Peningkatan investasi swasta, ekspor, dan produktivitas dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
- Pada perdagangan Jumat, 6 November 2026, indeks dolar berada di sekitar 101,55, sedangkan yen Jepang menguat 0,2 persen menjadi 157,40 per dolar Amerika Serikat. Peralihan investor menuju aset lindung nilai terjadi setelah pasar saham Amerika Serikat mengalami aksi jual tajam, terutama pada saham perusahaan teknologi kecerdasan buatan. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga memengaruhi daya tarik dolar, sementara yen dan franc Swiss memperoleh dukungan dari meningkatnya kehati-hatian investor.
- Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun turun menjadi sekitar 4,84 persen, sedangkan tenor dua tahun turun menjadi 4,47 persen. Peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember juga turun menjadi sekitar 70 persen dari sebelumnya lebih dari 80 persen. Selanjutnya, investor menantikan laporan tenaga kerja nonpertanian Amerika Serikat untuk memperoleh petunjuk mengenai kondisi pasar tenaga kerja dan arah kebijakan suku bunga bank sentral.
- Presiden Paraguay Santiago Peña mengundurkan diri pada 5 November 2026 setelah bank digital Ueno mengalami kolaps dan menyebabkan sekitar 3 juta nasabah tidak dapat mengakses rekening mereka. Bank sentral mengambil alih pengawasan bank tersebut setelah menemukan pelanggaran terhadap ketentuan rasio solvabilitas minimum. Krisis ini juga menimbulkan tekanan politik terhadap pemerintah, sementara pengembalian dana nasabah dan perlindungan dana publik menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan.
- Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih cukup kuat dan pasar tenaga kerjanya relatif stabil, tetapi inflasi masih terlalu tinggi. Kenaikan harga energi akibat perang Amerika Serikat dengan Iran serta meningkatnya investasi teknologi kecerdasan buatan turut menambah tekanan biaya. Oleh karena itu, Federal Reserve perlu memastikan bahwa berbagai guncangan tersebut tidak berkembang menjadi kenaikan harga yang lebih luas dan berkepanjangan.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen, tetapi sektor riil belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Pada kuartal III-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi, tetapi menurut ekonom Bank Danamon Irman Faiz, peningkatan tersebut lebih banyak didorong oleh investasi pemerintah dan perbaikan kinerja ekspor. Investasi pada sejumlah program prioritas pemerintah cenderung membutuhkan modal besar sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat tidak dapat langsung dirasakan. Manfaat investasi baru akan lebih terlihat ketika proyek mulai beroperasi dan perusahaan meningkatkan kegiatan produksi serta perekrutan tenaga kerja.
- Selain investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 juga didukung oleh peningkatan ekspor bersih. Kondisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia, seperti Amerika Serikat dan China, yang berada di atas perkiraan. Perbaikan permintaan dari negara mitra dagang memberikan dukungan terhadap kegiatan ekspor nasional, meskipun penguatan sektor riil dalam negeri masih membutuhkan waktu agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
- Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam mulai menunjukkan perkembangan awal. Bank Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan pasokan devisa yang masuk dan ditempatkan di dalam negeri. Kebijakan yang mulai diberlakukan pada 1 September 2026

tersebut masih membutuhkan waktu untuk melihat dampaknya terhadap cadangan devisa. Pada Juni–Agustus 2026, penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam nonmigas tercatat US$30,1 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$31,4 juta. Meskipun demikian, dana yang tetap disimpan dalam valuta asing meningkat, sementara konversi devisa ke rupiah mengalami penurunan.

- Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam selama paling singkat 12 bulan, sedangkan eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang memberikan pengaturan khusus bagi eksportir sektor pertambangan dalam kondisi tertentu. Bank Indonesia menilai kebijakan ini berpotensi menambah pasokan devisa dalam negeri, termasuk cadangan devisa apabila dana ditempatkan di Bank Indonesia.
- Utang pemerintah meningkat secara nominal, tetapi rasionya terhadap produk domestik bruto mengalami penurunan. Hingga September 2026, total utang pemerintah tercatat Rp10.326,93 triliun atau setara 40,30 persen terhadap produk domestik bruto. Sebagian besar utang berasal dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.962,40 triliun, sedangkan pinjaman tercatat Rp1.364,53 triliun. Rasio utang tersebut turun dari 41,26 persen pada Juni 2026 menjadi 40,30 persen pada September 2026. Pemerintah menyatakan penurunan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk domestik bruto nominal, serta pengelolaan utang yang dilakukan secara hati-hati dan terukur.
- Bank Indonesia mencatat uang primer atau adjusted base money tumbuh 7 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan September 2026 yang mencapai 9,3 persen. Dengan perkembangan tersebut, posisi uang primer tercatat sebesar Rp2.265,4 triliun. Perlambatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 11,5 persen, sementara giro bank umum di Bank Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi likuiditas dalam perekonomian yang terus diperhatikan oleh Bank Indonesia.
- Rupiah masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global dan berpotensi memengaruhi kebijakan suku bunga. Ekonom Bank Danamon memperkirakan suku bunga acuan Bank Indonesia berpeluang meningkat hingga 6,25 persen pada 2027 dari posisi saat ini sebesar 5,75 persen. Tekanan tersebut berkaitan dengan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, perubahan harga energi dunia, serta pergerakan arus modal asing. Selain itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai 1,5 persen terhadap produk domestik bruto pada 2026 dan 1,6 persen pada 2027, sehingga kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat masih perlu diperhatikan. Namun, kenaikan suku bunga tidak dipastikan terjadi karena keputusan Bank Indonesia akan bergantung pada perkembangan nilai tukar dan tekanan eksternal.
- Peluang penurunan suku bunga pada 2027 masih bergantung pada stabilitas rupiah dan perkembangan inflasi. Ekonom menilai Bank Indonesia dapat memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga apabila tekanan terhadap nilai tukar mereda dan proses penurunan inflasi mulai berlangsung. Meskipun demikian, peluang tersebut diperkirakan baru terbuka pada paruh kedua 2027 dan ruang penurunannya masih terbatas karena suku bunga global diperkirakan tetap tinggi. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memperhatikan perubahan nilai tukar dan suku bunga karena keduanya dapat memengaruhi biaya produksi, pembiayaan, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.
- Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2026 sebanyak 7,38 juta orang atau turun sekitar 80.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang atau bertambah sekitar 1,44 juta orang. Namun, sebanyak 85,73 juta pekerja atau 57,93 persen masih berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal berjumlah 62,25 juta orang atau 42,07 persen. Kondisi

tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan pengangguran, tetapi juga peningkatan kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan pekerjaan.

- Rata-rata upah buruh tercatat hanya tumbuh 2,7 persen, sedangkan inflasi pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pekerja belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang banyak terjadi di sektor pertanian dan konstruksi perlu diperhatikan karena kedua sektor tersebut cenderung menawarkan pendapatan relatif rendah. Program Magang Hub juga dinilai perlu diikuti dengan keberlanjutan kesempatan kerja setelah masa magang berakhir agar manfaatnya tidak hanya bersifat sementara.
- Program Sinergi Governansi Adaptif Desa Wisata disiapkan untuk memperkuat pengembangan desa wisata melalui kerja sama pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Program ini mendukung target pengembangan 1.000 desa wisata atau kampung wisata yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029. Pada 2025, Jawa Tengah memiliki 899 desa wisata, tetapi sekitar 76,2 persen masih berstatus rintisan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemetaan potensi, pendampingan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pelatihan pengolahan produk lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana agar desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan.
- Pengembangan desa wisata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Salah satu contoh penerapan program tersebut terlihat di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang memanfaatkan Sungai Tuntang sebagai lokasi wisata rekreasi dan arung jeram. Peningkatan kunjungan wisata diharapkan membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui penyediaan penginapan atau homestay, kuliner, dan produk olahan pangan lokal. Warga juga didorong mengolah pisang dan singkong menjadi keripik, kue, serta berbagai produk makanan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya bertujuan menambah destinasi, tetapi juga memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kerja sama antardaerah guna menjaga ketersediaan cabai dan beras serta mengurangi gejolak harga di pasar. Selain itu, pemerintah daerah bersama Asosiasi Perberasan Banyumas mendatangkan 13,5 ton beras untuk menambah pasokan di Pasar Wage Purwokerto. Langkah tersebut dilakukan karena harga sejumlah jenis cabai masih relatif tinggi, dengan cabai rawit merah sekitar Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp75.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp80.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp70.000 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium curah berada pada kisaran Rp15.500–Rp16.000 per kilogram.
- Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas Pengendalian Harga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 agar ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok tetap terjaga. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk mencegah penimbunan maupun permainan harga. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memperkuat distribusi bahan pangan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai. Selain itu, badan usaha milik daerah didorong menjadi penyerap hasil produksi petani agar pasokan dan distribusi pangan lebih terjamin.
- Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan di Blora mencapai Rp50,21 miliar. Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 80,24 persen dari target Rp62,58 miliar. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp31,72 miliar dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Rp18,48 miliar dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemerintah daerah masih berupaya meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun melalui optimalisasi

pajak kendaraan dan bea balik nama. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- Pendapatan asli daerah Blora dari retribusi parkir telah mencapai Rp1,03 miliar. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum mencapai 83,7 persen dari target tahunan sebesar Rp1,22 miliar. Pengelolaan retribusi dilakukan pada 375 titik parkir yang tersebar di 16 kecamatan, dengan potensi penerimaan terbesar berada di sekitar 10 kecamatan. Besarnya penerimaan dipengaruhi oleh aktivitas usaha dan kondisi lokasi parkir, sehingga pemerintah daerah terus mengoptimalkan titik parkir yang sudah ada sekaligus mencari lokasi baru yang berpotensi memberikan tambahan pendapatan.
- Banyumas Raya dinilai sebagai salah satu penopang penting perekonomian Jawa Tengah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M Juhro menyebut wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara memberikan kontribusi sekitar 15 persen terhadap perekonomian Jawa Tengah. Kekuatan kawasan tersebut berasal dari keberagaman sektor ekonomi yang dapat saling mendukung, mulai dari industri, usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, hingga pariwisata. Hasil pertanian perlu terhubung dengan kegiatan pengolahan dan distribusi agar memberikan nilai tambah, sedangkan pengembangan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perjalanan. Dengan menghubungkan berbagai sektor tersebut, potensi ekonomi Banyumas Raya dapat berkembang secara lebih terpadu.
- Bank Indonesia menetapkan tiga prioritas untuk memperkuat perekonomian Banyumas Raya. Tiga prioritas tersebut meliputi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, mendorong transformasi ekonomi daerah, serta mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, sedangkan transformasi ekonomi perlu didukung oleh konektivitas antarsektor dan antarwilayah. Bank Indonesia juga mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah, ekonomi kreatif, serta kegiatan ekonomi syariah melalui berbagai program, termasuk Karya Kreatif Serayu. Sementara itu, digitalisasi perlu diperluas dengan memperhatikan peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
- Penguatan kerja sama Bank Indonesia dan pemerintah daerah diharapkan mempercepat pembangunan Banyumas Raya. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono berharap kepemimpinan baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Aswin Gantina dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggantikan Christoveny. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, potensi ekonomi wilayah diharapkan dapat dikembangkan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
- Transformasi ekonomi Jawa Tengah bagian selatan didorong melalui pengembangan sektor unggulan dan ketahanan pangan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Abdul Kholik mendorong Bank Indonesia dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama dalam pengembangan sektor pertanian, maritim, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah Karya Kreatif Serayu yang mengangkat potensi Lembah Sungai Serayu dan pesisir selatan Jawa. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mencakup lebih banyak wilayah, termasuk Kebumen, Wonosobo, dan Purworejo, agar potensi produksi hortikultura dan padi dapat diperkuat. Dukungan infrastruktur dan kerja sama antardaerah juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan produksi serta mengantisipasi gangguan rantai pasok pangan.
- Jepara memperluas peluang kerja sama internasional melalui pertemuan dengan 15 negara sahabat. Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan The Diplomatic Forum Jepara 2026 yang menghadirkan para diplomat dari 15 negara untuk memperkenalkan potensi daerah dan

membuka peluang kerja sama. Bidang yang ditawarkan meliputi perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi daerah. Para diplomat diperkenalkan dengan kerajinan ukir, batik, kuliner, produk ekonomi kreatif, serta berbagai destinasi wisata Jepara. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal kemitraan yang lebih konkret dan berkelanjutan, sekaligus memperluas peluang pemasaran produk unggulan daerah ke pasar internasional.

- Pemerintah Kota Semarang berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menggandeng kejaksaan. Hingga 6 November 2026, penerimaan pajak daerah Kota Semarang mencapai sekitar Rp2,3 triliun atau 79,70 persen dari target Rp2,9 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp603,84 miliar. Badan Pendapatan Daerah mengintensifkan penagihan melalui pelayanan keliling di kecamatan dan bekerja sama dengan kejaksaan untuk menagih piutang pajak di atas Rp100 juta. Pemerintah juga memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hingga Desember 2026. Penerimaan pajak tersebut penting untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk layanan kesehatan, sekolah gratis, infrastruktur, serta pengendalian banjir dan genangan.
- Pertumbuhan jumlah restoran di Semarang menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jumlah restoran di Kota Semarang meningkat dari sekitar 3.500 menjadi lebih dari 3.700 atau tumbuh sekitar 10 persen. Perkembangan tersebut berpotensi menambah penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dari sektor makanan dan minuman. Pemerintah daerah berharap pertumbuhan usaha restoran dan kafe diikuti dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak sehingga dapat memperkuat pendapatan daerah. Selain penagihan dan pelayanan pajak, pemerintah juga mengadakan program apresiasi bagi wajib pajak untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- Permintaan daging sapi diperkirakan meningkat menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia memperkirakan permintaan daging sapi naik sekitar 20–30 persen dibandingkan kondisi normal. Namun, pelaku usaha menilai distribusi pasokan yang terkonsentrasi pada satu perusahaan swasta dan sejumlah perusahaan afiliasinya dapat menyulitkan pelaku usaha lain memperoleh stok. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembentukan harga karena akses pasokan yang terbatas dapat mengurangi keleluasaan pedagang dalam memenuhi kebutuhan pasar. Pada minggu keempat Oktober 2026, harga daging sapi tercatat Rp148.350 per kilogram atau meningkat 8 persen secara tahunan, sehingga perkembangan pasokan dan harga perlu diperhatikan menjelang peningkatan permintaan akhir tahun.
- Wonosobo menetapkan pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan persoalan anak tidak sekolah sebagai prioritas pemerintah daerah. Mohamad Kristijadi resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Wonosobo pada 6 November 2026 setelah melalui proses seleksi terbuka. Ia menyatakan akan menyelaraskan tugas dan program sekretariat daerah dengan visi serta prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Pengalamannya dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan penetapannya karena Sekretaris Daerah juga berperan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Proses seleksi dilakukan melalui penulisan makalah, penilaian rekam jejak, uji kompetensi, dan wawancara untuk menjaga objektivitas pemilihan pejabat tersebut.

Implikasi

- Meningkatnya harga minyak dan pangan menyebabkan biaya kebutuhan sehari-hari semakin tinggi sehingga masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan pokok dan mengendalikan kenaikan harga agar tekanan inflasi tidak semakin besar dan aktivitas konsumsi masyarakat tetap terjaga.
- Suku bunga Amerika Serikat yang tetap tinggi berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mendorong investor memilih aset yang memberikan keuntungan lebih menarik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan stabilitas pasar keuangan di berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.
- Keputusan suku bunga yang didasarkan pada data ekonomi dan kondisi inflasi dapat membantu bank sentral menentukan kebijakan secara lebih tepat. Sebaliknya, campur tangan politik yang berlebihan berpotensi meningkatkan ketidakpastian sehingga kepercayaan investor terhadap kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi Amerika Serikat dapat terganggu.
- Penggunaan teknologi tersebut berpotensi membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, perkembangan ini juga perlu diikuti pengawasan yang memadai agar risiko penyalahgunaan, gangguan keamanan transaksi, dan ketidakstabilan sistem keuangan dapat dikendalikan.
- Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan cadangan devisa menunjukkan adanya perbaikan setelah negara tersebut mengalami krisis. Meskipun demikian, tingginya kemiskinan dan beban utang masih menjadi tantangan sehingga pemerintah perlu memperkuat kegiatan ekonomi produktif, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan hasil pemulihan dapat dirasakan oleh masyarakat.
- Berakhirnya program bantuan Dana Moneter Internasional menuntut Sri Lanka menjaga kondisi fiskalnya. Pemerintah perlu mengelola anggaran dan utang secara hati-hati agar tidak kembali menghadapi tekanan keuangan setelah program bantuan berakhir. Selain itu, peningkatan penerimaan negara dan pengendalian belanja perlu dilakukan agar pemerintah tetap mampu membiayai pembangunan serta menjaga kepercayaan investor.
- Perubahan nilai tukar dan pergerakan aset keuangan menunjukkan meningkatnya kehati-hatian investor. Ketika pasar saham mengalami tekanan dan ketidakpastian meningkat, investor cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman. Perubahan tersebut dapat memengaruhi nilai tukar dan arus modal di berbagai negara sehingga negara berkembang perlu memperkuat ketahanan ekonomi untuk menghadapi perubahan kondisi pasar global.
- Krisis bank digital di Paraguay menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga keuangan. Masalah solvabilitas yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengakses rekening dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kecukupan modal, pengelolaan risiko, dan keamanan dana nasabah perlu diperkuat agar permasalahan serupa tidak meluas dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- Pertumbuhan sebesar 5,47 persen menunjukkan bahwa perekonomian masih mampu berkembang, tetapi manfaatnya perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu memastikan investasi dan kegiatan ekspor dapat meningkatkan produksi dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta menambah pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
- Investasi pemerintah yang besar belum tentu secara langsung mampu menyerap banyak tenaga kerja apabila kegiatan produksi belum berkembang secara merata. Karena itu, keterlibatan perusahaan swasta perlu diperkuat melalui kemudahan usaha dan kepastian kebijakan agar investasi dapat mendorong ekspansi perusahaan serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
- Peningkatan ekspor dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha nasional. Permintaan dari negara mitra dagang seperti Amerika Serikat dan China dapat mendorong peningkatan produksi

barang dalam negeri serta memperluas pasar bagi perusahaan nasional. Namun, peningkatan ekspor perlu diikuti kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi permintaan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan melalui pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

- Kebijakan devisa hasil ekspor dapat memperkuat ketersediaan valuta asing di dalam negeri. Penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri diharapkan dapat menambah pasokan valuta asing dan membantu menjaga ketahanan eksternal Indonesia. Pelaksanaannya perlu dipantau secara konsisten agar kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa menghambat kebutuhan pembayaran dan kegiatan operasional perusahaan eksportir.
- Perbedaan ketentuan penempatan devisa hasil ekspor membutuhkan pengawasan yang jelas. Ketentuan bagi sektor minyak dan gas bumi, nonminyak dan gas bumi, serta pertambangan perlu dipahami oleh seluruh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan pengawasan dan penerapan aturan yang konsisten, ketersediaan devisa di dalam negeri dapat diperkuat sekaligus menjaga kelancaran kegiatan ekspor.
- Cadangan devisa perlu dijaga untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Cadangan devisa memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan impor, membayar kewajiban luar negeri, dan mendukung kestabilan nilai tukar. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati agar Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi internasional.
- Peningkatan utang pemerintah menuntut penggunaan anggaran yang lebih produktif. Meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami penurunan, jumlah utang pemerintah tetap perlu diperhatikan karena dapat menambah beban pembayaran pada masa mendatang. Pemerintah perlu memastikan pembiayaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
- Perlambatan pertumbuhan uang primer perlu diperhatikan dalam pengelolaan likuiditas. Bank Indonesia perlu menjaga ketersediaan uang agar transaksi masyarakat, kegiatan perbankan, dan aktivitas dunia usaha tetap berjalan lancar. Pengelolaan likuiditas juga harus mempertimbangkan perkembangan inflasi dan kondisi sistem keuangan sehingga kestabilan ekonomi dapat tetap terjaga.
- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan bahan baku, mesin, atau barang modal impor berpotensi menghadapi kenaikan biaya ketika nilai tukar rupiah melemah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi harga jual produk dan keuntungan perusahaan sehingga pelaku usaha perlu memperhitungkan risiko nilai tukar, sementara Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah.
- Perubahan suku bunga pada 2027 dapat memengaruhi keputusan pembiayaan dunia usaha. Kenaikan suku bunga berpotensi menambah biaya pinjaman sehingga perusahaan dapat menunda rencana investasi atau memperlambat pengembangan usahanya. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperluas kegiatan produksi apabila kondisi inflasi dan stabilitas ekonomi memungkinkan.
- Penurunan jumlah pengangguran perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Berkurangnya jumlah pengangguran merupakan perkembangan positif, tetapi besarnya pekerja yang masih berada di sektor informal menunjukkan bahwa kualitas kesempatan kerja masih perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memperluas pekerjaan formal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja agar masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan stabil.
- Kenaikan upah yang lebih rendah daripada inflasi dapat menekan daya beli pekerja. Ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat daripada pendapatan, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat berkurang. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja perlu diperhatikan agar kenaikan upah dapat berjalan lebih seimbang dengan perkembangan harga barang dan jasa.

- Pekerja di sektor pertanian dan konstruksi membutuhkan peningkatan produktivitas. Kedua sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja, tetapi masih menghadapi tantangan berupa pendapatan yang relatif rendah dan kualitas pekerjaan yang perlu ditingkatkan. Pengembangan keterampilan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan nilai tambah hasil produksi dapat membantu memperbaiki produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Pengembangan desa wisata melalui kerja sama berbagai pihak dapat meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pendampingan, peningkatan fasilitas, serta pengembangan kemampuan pengelola perlu dilakukan agar desa wisata yang masih berstatus rintisan dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
- Pengembangan wisata lokal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan Sungai Tuntang di Desa Candirejo sebagai destinasi wisata dapat mendorong pertumbuhan usaha penginapan, kuliner, dan produk olahan pangan di sekitar kawasan wisata. Masyarakat perlu didukung dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar jumlah kunjungan wisatawan meningkat serta manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha.
- Kerja sama antardaerah dapat membantu mengendalikan harga pangan di Banyumas. Penambahan pasokan beras dan kerja sama pemenuhan kebutuhan cabai dapat membantu mengurangi tekanan harga ketika ketersediaan bahan pangan mengalami gangguan. Pemerintah daerah perlu menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau.
- Penguatan Satuan Tugas Pengendalian Harga dapat mencegah penimbunan bahan pangan. Koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait diperlukan untuk mengawasi distribusi serta perdagangan bahan pokok di pasar. Pengawasan tersebut penting agar tidak terjadi penimbunan maupun hambatan pasokan yang dapat menyebabkan kenaikan harga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
- Penyerapan hasil pertanian oleh badan usaha milik daerah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan pembelian hasil panen dapat memberikan kepastian pemasaran dan mengurangi risiko ketika petani kesulitan menjual hasil produksinya. Dengan penyerapan dan distribusi yang lebih teratur, pendapatan petani diharapkan lebih terjaga sekaligus membantu memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
- Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Blora dapat memperkuat keuangan daerah. Realisasi penerimaan sebesar Rp50,21 miliar menunjukkan bahwa sektor kendaraan bermotor memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan sosialisasi yang berkelanjutan agar penerimaan dapat terus meningkat serta mendukung pembiayaan pembangunan.
- Optimalisasi retribusi parkir dapat menambah pendapatan asli daerah Blora. Pengelolaan titik parkir perlu dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan agar potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengawasan terhadap petugas dan lokasi parkir juga diperlukan untuk memastikan pungutan berjalan dengan baik serta memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah.
- Penguatan ekonomi Banyumas Raya membutuhkan kerja sama antarsektor. Potensi pertanian, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata perlu dikembangkan secara terhubung agar setiap sektor dapat saling mendukung. Kerja sama tersebut dapat membantu memperluas pemasaran produk daerah, meningkatkan nilai tambah hasil produksi, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
- Prioritas Bank Indonesia dapat membantu memperkuat perekonomian Banyumas Raya. Pengendalian harga, transformasi ekonomi, dan digitalisasi keuangan perlu dilaksanakan secara terpadu agar kegiatan ekonomi daerah semakin stabil dan produktif. Upaya tersebut diharapkan

dapat menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kemampuan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

- Digitalisasi keuangan dapat membantu UMKM mengembangkan kegiatan usahanya. Penggunaan transaksi digital dan peningkatan pemahaman mengenai layanan keuangan dapat mempermudah pengelolaan pembayaran, pencatatan usaha, serta akses terhadap layanan perbankan. Dukungan tersebut perlu disertai peningkatan kualitas produk dan kemampuan pemasaran agar UMKM mampu bersaing dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
- Pengembangan wilayah Jawa Tengah bagian selatan dapat memperkuat ketahanan pangan. Potensi pertanian di sejumlah daerah perlu didukung oleh infrastruktur, ketersediaan sarana produksi, dan kerja sama distribusi yang memadai. Langkah tersebut penting untuk menjaga hasil produksi pertanian, memperlancar penyaluran pangan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah selatan dan daerah lainnya.
- Karya Kreatif Serayu dapat mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Penguatan sektor pertanian, maritim, pariwisata, dan UMKM dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Kerja sama antardaerah dan promosi yang berkelanjutan diperlukan agar potensi wilayah dapat dikenal lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Kerja sama internasional Jepara dapat memperluas pasar produk unggulan daerah. Pertemuan dengan perwakilan dari 15 negara memberikan peluang untuk memperkenalkan kerajinan ukir, batik, kuliner, dan potensi pariwisata Jepara kepada pasar internasional. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti kegiatan tersebut melalui promosi, kerja sama perdagangan, dan peluang investasi agar hubungan yang terjalin dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata.
- Peningkatan penerimaan pajak Semarang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Upaya penagihan piutang dan penyediaan pelayanan pajak keliling dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas jangkauan pelayanan. Tambahan penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan berbagai kebutuhan masyarakat.
- Pertumbuhan restoran di Semarang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Bertambahnya jumlah restoran dan usaha kuliner memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperluas sumber pendapatan asli daerah. Pendataan, pelayanan, dan pengawasan perlu diperkuat agar seluruh pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan serta memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan permintaan daging sapi perlu diantisipasi melalui pengawasan pasokan. Perkiraan kenaikan permintaan sebesar 20–30 persen dapat mendorong kenaikan harga apabila ketersediaan daging tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah perlu memantau stok, jalur distribusi, dan kelancaran pasokan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi serta kenaikan harga dapat dikendalikan.
- Pelantikan Sekretaris Daerah definitif di Wonosobo dapat memperkuat koordinasi pemerintahan. Peran Sekretaris Daerah diperlukan untuk mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran, pengawasan program, dan koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
- Penanganan kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah membutuhkan kerja sama antarinstansi. Pemerintah daerah perlu menghubungkan program bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara menyeluruh. Dengan pelaksanaan program yang terarah dan berkelanjutan, kualitas hidup masyarakat Wonosobo diharapkan meningkat serta kesenjangan kesejahteraan dapat dikurangi.

Berita Sabtu, 7 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan perekonomian internasional pada 7 November 2026 menunjukkan bahwa sejumlah negara masih mampu mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global. Salah satu perkembangan yang terlihat adalah kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang masih cukup kuat, dengan penambahan 165.000 tenaga kerja pada Oktober 2026 dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1%. Kuatnya pasar tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Amerika Serikat masih memiliki momentum positif, terutama karena pertumbuhan lapangan kerja dapat mendukung aktivitas konsumsi masyarakat. Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan daya beli karena pertumbuhan upah rata-rata per jam sebesar 3,1% masih lebih rendah dibandingkan inflasi konsumen sebesar 3,7%. Keadaan tersebut menyebabkan pendapatan pekerja belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga tekanan terhadap konsumsi rumah tangga masih berlanjut. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan moneter, karena meskipun perekonomian masih tumbuh cukup kuat, inflasi yang belum terkendali dapat mendorong bank sentral mempertimbangkan pengetatan suku bunga lebih lanjut.

Ketidakpastian perekonomian internasional yang terlihat dari perkembangan Amerika Serikat tersebut juga berkaitan dengan perubahan investasi pada sektor kecerdasan buatan dan meningkatnya risiko stabilitas keuangan global. Dana Moneter Internasional menilai bahwa ketergantungan terhadap pertumbuhan investasi kecerdasan buatan perlu diperhatikan karena perlambatan investasi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pengendalian inflasi di berbagai negara. Selama ini, investasi kecerdasan buatan telah memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan investasi yang terlalu besar juga menimbulkan kekhawatiran mengenai tingginya valuasi saham teknologi, ketidakpastian hasil investasi, dan tekanan terhadap harga komoditas yang dibutuhkan untuk pembangunan pusat data. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah terjadinya penurunan saham teknologi yang dipengaruhi oleh perubahan politik Amerika Serikat dan rencana peningkatan pengawasan terhadap pengembangan kecerdasan buatan. Perubahan tersebut mendorong investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman dan menyebabkan pasar keuangan mengalami gejolak. Oleh karena itu, bank sentral di berbagai negara perlu memperhatikan perkembangan investasi kecerdasan buatan, karena perubahan pada sektor tersebut tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan tekanan inflasi dan mengganggu stabilitas keuangan.

Selain menghadapi ketidakpastian akibat inflasi dan perkembangan investasi kecerdasan buatan, perekonomian internasional juga dihadapkan pada persoalan pengelolaan utang pemerintah, ketimpangan kondisi ekonomi antarnegara, serta stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional dalam World Economic Outlook 2026, Sudan menjadi negara dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto tertinggi sebesar 334,4%, diikuti Jepang sebesar 199,4%, Singapura sebesar 166,4%, dan Amerika Serikat sebesar 126,8%. Tingginya rasio utang tersebut menunjukkan bahwa beban utang pemerintah perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, perbedaan tingkat kemakmuran antarnegara juga menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda dalam menghadapi berbagai tantangan global. Persoalan tersebut semakin terlihat melalui krisis perbankan di Paraguay yang berujung pada pemakzulan Presiden Santiago Peña setelah keruntuhan Ueno Bank dan munculnya dugaan keterlibatan pemerintah dalam persoalan tersebut. Pembekuan simpanan masyarakat, termasuk milik para pensiunan, serta upaya penggantian dana nasabah melalui penjaminan simpanan memperlihatkan pentingnya pengawasan perbankan dan perlindungan dana masyarakat. Dengan demikian, perkembangan ekonomi internasional

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung oleh pengendalian inflasi, pengelolaan utang yang baik, stabilitas keuangan, serta tata kelola pemerintahan yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.

Berbagai perkembangan ekonomi internasional tersebut turut menjadi gambaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian global, terutama karena ketidakpastian perdagangan, perubahan investasi, dan kebijakan moneter negara maju dapat memengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Meskipun menghadapi kondisi eksternal yang tidak menentu, perekonomian Indonesia pada kuartal III 2026 mampu tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29% dan melampaui perkiraan konsensus ekonom sebesar 5,2%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 5,45%, yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional masih berada dalam kondisi cukup kuat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas pada sejumlah sektor produktif, terutama industri pengolahan yang tumbuh 5,87%, perdagangan sebesar 7,14%, konstruksi sebesar 6,42%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,03%. Industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dari sisi lapangan usaha dengan kontribusi 1,20 poin persentase, sedangkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dari sisi pengeluaran dengan pertumbuhan 5,04%. Selain itu, investasi tumbuh sebesar 6,06% dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 8,95%, sehingga memperlihatkan bahwa kegiatan produksi, penanaman modal, dan belanja pemerintah masih berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, perkembangan tersebut masih perlu dicermati karena belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,04% yang sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pengeluaran masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Inflasi pangan pada Oktober 2026 mencapai 5,81%, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum sebesar 3,23%, sehingga tekanan terhadap masyarakat berpendapatan rendah menjadi semakin besar. Perkembangan harga pada 7 November 2026 juga menunjukkan bahwa sejumlah komoditas seperti beras, daging sapi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir mengalami kenaikan, meskipun harga daging ayam dan telur mengalami penurunan. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian yang hanya sebesar 0,46% memperlihatkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh sektor produktif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan penguatan daya beli, peningkatan produktivitas pertanian, pengendalian harga pangan, dan pemerataan kesempatan kerja agar peningkatan produk domestik bruto dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan investasi, hilirisasi industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,49 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kegiatan produksi nasional. Penyerapan tenaga kerja sebesar 51,8% di luar Pulau Jawa juga memperlihatkan adanya upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja yang semakin beragam, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dan pendidikan vokasi hingga 300.000 peserta pada 2027, disertai insentif pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta serta dukungan terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain penguatan industri dan investasi, pengembangan ekonomi sirkular juga berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hingga 2030 serta memberikan tambahan produk domestik bruto sebesar Rp638 triliun melalui pemanfaatan kembali

limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berusaha memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional akan semakin ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menghubungkan pertumbuhan investasi dengan peningkatan keterampilan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.

Selain melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, penguatan perekonomian Indonesia juga dilakukan dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan pemanfaatan devisa hasil ekspor sumber daya alam, serta memperkuat kondisi sektor perbankan. Nilai tukar rupiah di pasar spot pada 6 November 2026 ditutup pada level Rp18.089 per dolar Amerika Serikat dan menguat sebesar 0,32% dibandingkan penutupan pekan sebelumnya, sedangkan nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate menguat tipis menjadi Rp18.130 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari perkiraan, meskipun pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh ketidakpastian politik Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik yang berdampak pada pasar energi. Dalam rangka memperkuat ketersediaan devisa di dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan kelonggaran ketentuan penukaran devisa hasil ekspor sumber daya alam ke rupiah hingga 100% dari sebelumnya maksimal 50%, dengan tetap mempertahankan kewajiban pemasukan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia. Sementara itu, total simpanan perbankan hingga September 2026 mencapai Rp10.513,65 triliun atau tumbuh 8,6% secara tahunan, dengan pertumbuhan simpanan bernilai besar dan simpanan valuta asing yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki dukungan dari sisi investasi, likuiditas perbankan, dan aktivitas ekonomi domestik. Namun, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2026 diperkirakan sedikit kehilangan momentum akibat fragmentasi perdagangan global, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi China, serta keterbatasan ruang fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan peningkatan pertumbuhan agar perekonomian nasional tetap mampu berkembang di tengah perubahan kondisi global.

Perkembangan perekonomian nasional yang cukup kuat tersebut kemudian tercermin pada kondisi ekonomi Jawa Tengah, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada kuartal III 2026. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,73% secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada tingkat 5,47%, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah memiliki perkembangan yang cukup baik. Capaian tersebut juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh penghargaan Outstanding Regional Economic Growth and Investment Development dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Hingga kuartal III 2026, investasi Jawa Tengah mencapai sekitar Rp72,54 triliun yang berasal dari 82.420 proyek dan mampu menyerap lebih dari 340 ribu tenaga kerja. Selain itu, rencana masuknya investasi perusahaan dari Vietnam dengan nilai hampir Rp10 triliun berpotensi memperkuat kegiatan usaha dan membuka kesempatan kerja baru di wilayah tersebut. Peningkatan investasi tersebut memperlihatkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui kerja sama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan regional sekaligus mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pemerintah daerah juga berupaya memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat melalui penguatan program sosial dan penanganan kemiskinan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara produktif,

tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar masyarakat yang dapat memengaruhi kesejahteraan. Hal ini terlihat dari program Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen yang membantu mengatasi kekeringan melalui penyediaan air siap minum, serta Program Sak Omah Sak Sumur Resapan bersama Badan Amil Zakat Nasional yang dikembangkan untuk memperkuat ketahanan air di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Melalui program tersebut, masyarakat yang sebelumnya mengalami kekurangan air ketika musim kemarau diharapkan dapat memperoleh akses air yang lebih baik tanpa bergantung pada distribusi bantuan air. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, dan program sosial tersebut juga didukung oleh terjaganya optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian daerah. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keyakinan Konsumen pada September 2026 tercatat sebesar 112,10, lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 sebesar 116,02, tetapi masih berada di atas batas optimisme 100. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat keyakinan masyarakat mengalami penurunan, masyarakat Jawa Tengah masih memiliki pandangan positif terhadap keadaan ekonomi saat ini dan prospek ekonomi pada masa mendatang. Optimisme tersebut didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini sebesar 101,74 dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 122,46, yang mencerminkan adanya keyakinan terhadap kondisi penghasilan, kesempatan kerja, konsumsi barang tahan lama, dan perkembangan kegiatan usaha. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung aktivitas ekonomi daerah, terutama ketika perekonomian masih menghadapi tekanan harga dan ketidakpastian global. Dengan demikian, keseluruhan perkembangan ekonomi internasional, Indonesia, hingga Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara stabilitas ekonomi, penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan pemerataan kesejahteraan. Ketahanan ekonomi internasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi nasional, sedangkan penguatan ekonomi nasional memberikan dukungan bagi perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Jawa Tengah perlu terus mengoptimalkan potensi ekonomi di seluruh kabupaten dan kota, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan, memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha serta lembaga sosial, dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai produksi dan investasi, tetapi juga mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Ringkasan

- Pada Oktober 2026, jumlah tenaga kerja bertambah sebanyak 165.000 orang atau lebih dari dua kali lipat perkiraan ekonom, sedangkan tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%. Meskipun demikian, kenaikan upah rata-rata per jam sebesar 3,1% masih lebih rendah dibandingkan inflasi konsumen yang mencapai 3,7%, sehingga daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat, tetapi tekanan harga tetap menjadi persoalan yang harus diperhatikan.
- Kuatnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Laporan ketenagakerjaan yang lebih baik dari perkiraan membuat pelaku pasar kembali memperhitungkan peluang pengetatan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Sejumlah pejabat Federal Reserve, termasuk Mary Daly dan Alberto Musalem, menilai bahwa pengendalian inflasi masih perlu menjadi prioritas karena kenaikan harga terus

memengaruhi daya beli masyarakat. Pasar bahkan memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase pada pertemuan 8–9 Desember mencapai sekitar 80%.

- Ketidakpastian investasi kecerdasan buatan mulai memengaruhi pasar keuangan dunia. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva, mengingatkan bahwa lonjakan investasi kecerdasan buatan memang mendorong pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, tetapi juga menimbulkan risiko apabila pertumbuhannya melambat secara tiba-tiba. Kekhawatiran terhadap tingginya nilai saham teknologi, besarnya biaya pembangunan pusat data, serta kemungkinan perubahan kebijakan di Amerika Serikat telah memicu gejolak pasar dan mendorong investor beralih ke aset yang lebih aman. Situasi tersebut dapat menyulitkan bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan stabilitas keuangan.
- Bank Sentral Jepang mewaspadai kenaikan inflasi akibat meningkatnya harga energi. Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, memperkirakan inflasi inti masih berada di sekitar sasaran 2%, tetapi mengakui terdapat risiko kenaikan harga yang dipengaruhi oleh komoditas energi. Bank sentral Jepang juga terus memperhatikan kebijakan moneter negara lain karena perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat memengaruhi perekonomian domestik. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan dinilai dapat memberikan dorongan terhadap permintaan ekonomi Jepang, meskipun risiko terhadap pasar keuangan dan keamanan siber tetap perlu diantisipasi.
- Krisis perbankan di Paraguay berkembang menjadi persoalan politik yang serius. Senat Paraguay memakzulkan Presiden Santiago Peña setelah muncul dugaan keterlibatan dalam keruntuhan Ueno Bank, yang sebelumnya menghentikan operasionalnya dan menyebabkan simpanan masyarakat dibekukan. Wakil Presiden Pedro Alliana kemudian dilantik untuk menggantikan Peña dan menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga Agustus 2028. Krisis tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena banyak penduduk memiliki simpanan di bank tersebut, sehingga bank sentral mulai mengganti dana nasabah melalui dana penjaminan simpanan.
- Beban utang pemerintah sejumlah negara masih menjadi perhatian dalam proyeksi ekonomi global. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional, Sudan diperkirakan memiliki rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto tertinggi pada 2026 sebesar 334,4%, disusul Jepang sebesar 199,4% dan Singapura sebesar 166,4%. Amerika Serikat berada di posisi kedelapan dengan rasio 126,8%, sedangkan China mencapai 104,4% dan untuk pertama kalinya diproyeksikan melampaui 100%. Tingginya rasio utang tersebut menggambarkan besarnya beban kewajiban pemerintah dibandingkan kemampuan ekonominya, meskipun tidak secara otomatis menunjukkan suatu negara sedang menghadapi krisis keuangan.
- Proyeksi negara dengan pendapatan ekonomi per kapita tertinggi pada 2031 menunjukkan dominasi sejumlah negara maju dan pusat ekonomi dunia. Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional menggunakan ukuran produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli, Liechtenstein diperkirakan menempati posisi pertama dengan nilai US$226.009 per kapita. Singapura diproyeksikan berada di posisi kedua, disusul Irlandia pada posisi ketiga, sedangkan Luksemburg berada di posisi kelima. Proyeksi tersebut memperlihatkan perbedaan tingkat aktivitas ekonomi dan daya beli antarnegara, tetapi tidak dapat diartikan sebagai jumlah kekayaan pribadi atau pendapatan yang benar-benar diterima setiap penduduk.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 menunjukkan peningkatan yang cukup kuat. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal II sebesar 5,29% dan melampaui perkiraan sejumlah ekonom sebesar 5,2%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sejak Januari hingga September 2026 mencapai 5,45%. Peningkatan tersebut didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan yang menunjukkan perkembangan positif.

- Konsumsi masyarakat dan investasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04% dengan kontribusi 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi tumbuh 6,06% dan memberikan kontribusi 1,91 poin persentase. Konsumsi pemerintah juga meningkat sebesar 8,95%, sementara realisasi investasi pada kuartal III mencapai Rp528,7 triliun atau tumbuh 7,6% secara tahunan. Meskipun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga mulai melambat dan manfaat peningkatan ekonomi masih perlu diperluas agar dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
- Pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya terlihat dari peningkatan angka produk domestik bruto. Tantangan yang perlu diperhatikan meliputi perlambatan konsumsi rumah tangga, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian yang hanya mencapai 0,46%, serta kenaikan inflasi pangan bergejolak yang mencapai 5,81% pada Oktober 2026. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah tercatat turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Oleh karena itu, penguatan industri dan investasi perlu disertai peningkatan produktivitas pertanian, keterjangkauan harga pangan, perluasan lapangan kerja formal, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV diperkirakan mulai kehilangan momentum. Bank Permata memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih dapat bertahan di atas 5% secara tahunan, tetapi menghadapi tantangan dari ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, dan pemulihan ekonomi China yang masih lambat. Keterbatasan ruang fiskal juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stimulus ekonomi. Bank Permata mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,3%–5,5%, sedangkan pada 2027 diperkirakan sedikit melambat menjadi 5,2%–5,3%.
- Peluang ekonomi sirkular dinilai dapat membuka jutaan lapangan kerja baru di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pemanfaatan kembali bahan baku dan pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi berpotensi menyerap 4,4 juta tenaga kerja hingga 2030 serta menambah produk domestik bruto sebesar Rp638 triliun. Potensi tersebut terutama terdapat pada sektor pangan, plastik kemasan, elektronik, konstruksi, dan tekstil. Namun, pengembangan sektor ini perlu disertai peningkatan keterampilan, pemberian upah yang layak, perlindungan sosial, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya.
- Pemerintah memperkuat investasi dan hilirisasi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,49 juta tenaga kerja, dan sekitar 51,8% tenaga kerja tersebut terserap di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dan pendidikan vokasi hingga 300.000 peserta pada 2027. Pemerintah juga menyiapkan insentif pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta serta potongan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50%.
- Pemerintah berencana memberikan keleluasaan lebih besar kepada eksportir dalam menggunakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah meningkatkan batas penukaran valuta asing ke rupiah dari maksimal 50% menjadi hingga 100%. Kebijakan ini tetap disertai kewajiban memasukkan seluruh devisa hasil ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus. Pemerintah berharap perubahan aturan tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada eksportir sekaligus menjaga agar devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.
- Dampak kebijakan penempatan devisa hasil ekspor terhadap cadangan devisa masih membutuhkan waktu untuk dievaluasi. Bank Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan yang mulai diberlakukan pada 1 September 2026 tersebut masih berada dalam tahap pelaksanaan sehingga belum dapat dinilai secara menyeluruh. Dana hasil ekspor yang ditempatkan di

perbankan berpotensi menambah cadangan devisa apabila disimpan di Bank Indonesia. Namun, data penggunaan devisa hasil ekspor nonmigas pada Juni–Agustus 2026 menunjukkan penurunan konversi ke rupiah sebesar 37,4%, sementara dana yang tetap disimpan dalam valuta asing meningkat 273,1%.

- Kenaikan harga pangan masih menjadi perhatian karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia pada 7 November 2026, sebagian besar harga pangan mengalami kenaikan, terutama beras, daging sapi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir. Harga beras kualitas medium I mencapai Rp16.700 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp96.700 per kilogram. Meskipun harga beberapa jenis cabai, daging ayam, dan telur mengalami penurunan, perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok tetap perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.
- Simpanan perbankan nasional tumbuh dengan peningkatan terbesar pada kelompok simpanan bernilai tinggi dan simpanan valuta asing. Data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan total simpanan perbankan mencapai Rp10.513,65 triliun hingga September 2026 atau tumbuh 8,6% secara tahunan. Simpanan di atas Rp5 miliar mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,9%, sedangkan simpanan valuta asing tumbuh 20,5%, lebih tinggi dibandingkan simpanan rupiah yang tumbuh 6,5%. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan dana yang tersimpan di perbankan, meskipun pertumbuhan simpanan masih berbeda antara kelompok nominal dan jenis mata uang.
- Nilai tukar rupiah mengalami penguatan sepanjang pekan pertama November 2026, tetapi masih menghadapi ketidakpastian global. Rupiah di pasar spot ditutup pada Rp18.089 per dolar Amerika Serikat pada 6 November 2026, menguat 0,32% dibandingkan posisi pekan sebelumnya. Penguatan tersebut turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III yang lebih tinggi dari perkiraan. Namun, ketidakpastian politik Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik yang memengaruhi pasar energi masih menjadi faktor yang dapat menimbulkan tekanan terhadap rupiah. Untuk pekan berikutnya, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.900–Rp18.300 per dolar Amerika Serikat.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan kategori Outstanding Regional Economic Growth and Investment Development dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 atas kinerja pengembangan ekonomi dan peningkatan investasi daerah. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,73% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,47%. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif perekonomian daerah sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan investasi dan mengembangkan potensi ekonomi di berbagai kabupaten dan kota.
- Realisasi investasi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif dan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga triwulan III 2026, investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp72,54 triliun yang berasal dari 82.420 proyek dan menyerap lebih dari 340.000 tenaga kerja. Selain itu, terdapat rencana investasi dari perusahaan asal Vietnam dengan nilai hampir Rp10 triliun. Pemerintah provinsi berharap peningkatan investasi tersebut dapat memperkuat kegiatan usaha, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan investasi, pemerintah daerah juga mendorong pendidikan vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan pelatihan kerja agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kerja sama Baznas dan LazisMu untuk memperkuat penanganan kemiskinan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai bahwa lembaga pengelola zakat perlu bekerja sama agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara produktif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang. Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan untuk

menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat, termasuk keterbatasan akses air bersih. Salah satu contoh yang disoroti adalah program Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen yang membantu masyarakat menghadapi kekeringan melalui penyediaan air siap minum.

- Program sumur resapan menjadi salah satu upaya Jawa Tengah dalam memperkuat ketahanan air dan mengurangi dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Baznas mengembangkan Program Sak Omah Sak Sumur Resapan di sejumlah wilayah, salah satunya Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Program tersebut membantu meningkatkan ketersediaan air sehingga wilayah yang sebelumnya sering mengalami kekurangan air dan membutuhkan bantuan distribusi air saat musim kemarau kini dapat bertahan tanpa bantuan tersebut. Pemerintah berharap program serupa dapat diperluas melalui kerja sama dengan LazisMu, Baznas, dan pemerintah daerah untuk mengatasi kekeringan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah menunjukkan peran lembaga sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. LazisMu Pusat mencatat penghimpunan dana secara nasional mencapai Rp827,69 miliar, sedangkan dana yang telah disalurkan mencapai Rp635,02 miliar dengan tingkat penyaluran sebesar 76,62% dan menjangkau 132.225 penerima manfaat. Penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penyediaan air, pengelolaan sampah, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan program tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan menyelesaikan persoalan sosial secara berkelanjutan.
- Optimisme konsumen di Jawa Tengah masih terjaga meskipun mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keyakinan Konsumen pada September 2026 tercatat sebesar 112,10, lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 116,02. Walaupun mengalami penurunan, indeks tersebut masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki pandangan optimistis terhadap kondisi perekonomian. Optimisme ini didukung oleh penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan terhadap perkembangan ekonomi pada masa mendatang.

Implikasi

- Penambahan tenaga kerja Amerika Serikat sebanyak 165.000 orang dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1% menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih cukup kuat. Keadaan ini dapat mendorong bank sentral Amerika Serikat untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi atau menaikkannya kembali guna mengendalikan inflasi.
- Peluang kenaikan suku bunga Amerika Serikat dapat memengaruhi pergerakan investasi dan nilai tukar berbagai negara. Investor berpotensi memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman dan memberikan keuntungan lebih tinggi, sehingga negara berkembang perlu mewaspadai kemungkinan keluarnya modal asing.
- Besarnya investasi pada sektor kecerdasan buatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kegiatan usaha. Namun, tingginya nilai saham perusahaan teknologi serta kekhawatiran terhadap hasil investasi yang belum pasti dapat memicu gejolak pasar apabila keuntungan yang diharapkan tidak tercapai.
- Perubahan kondisi investasi kecerdasan buatan, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar membuat bank sentral perlu mempertimbangkan berbagai risiko sebelum menentukan kebijakan. Hal ini juga berlaku bagi Bank Sentral Jepang yang harus memperhatikan perkembangan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi dalam negeri.
- Tingginya rasio utang pemerintah di sejumlah negara menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban perlu dijaga agar tidak membebani anggaran negara. Sementara itu, kasus krisis perbankan di Paraguay memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga

keuangan dan perlindungan simpanan masyarakat untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan.

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada kuartal III 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa peningkatan tersebut dapat dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja, pendapatan yang lebih baik, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi, tetapi kenaikan harga pangan dan perlambatan beberapa komponen permintaan domestik menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
- Pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta peningkatan investasi menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan usaha masih berkembang. Ke depan, investasi perlu semakin melibatkan pemasok dalam negeri agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan nilai produksi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
- Potensi ekonomi sirkular yang diperkirakan mampu menciptakan jutaan pekerjaan dan menambah nilai ekonomi menunjukkan adanya peluang dari pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Peluang tersebut perlu didukung pelatihan keterampilan dan perlindungan tenaga kerja agar pekerjaan yang tercipta dapat memberikan pendapatan serta kepastian kerja yang lebih baik.
- Rencana peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan program pemagangan menunjukkan perlunya menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Dengan keterampilan yang lebih sesuai, masyarakat dapat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, terutama pada sektor industri, hilirisasi, dan pariwisata.
- Fleksibilitas penempatan dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dapat memberikan ruang bagi eksportir dalam mengelola kebutuhan keuangannya. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia tetap perlu memantau pelaksanaannya agar kebijakan tersebut tidak mengurangi ketersediaan valuta asing di dalam negeri.
- Peningkatan jumlah simpanan masyarakat di perbankan menunjukkan bahwa dana yang tersimpan dalam sistem keuangan masih mengalami pertumbuhan. Kondisi ini perlu dijaga melalui stabilitas ekonomi, pelayanan perbankan yang baik, dan pengelolaan dana yang sehat agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
- Penguatan rupiah selama sepekan menunjukkan adanya dukungan dari kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup baik. Meskipun demikian, ketidakpastian politik Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik masih dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar, sehingga koordinasi kebijakan ekonomi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,73% pada kuartal III 2026 yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang cukup baik. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui pengembangan potensi setiap kabupaten dan kota agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara merata.
- Realisasi investasi sekitar Rp72,54 triliun dari 82.420 proyek telah menyerap lebih dari 340.000 tenaga kerja. Masuknya rencana investasi baru dari perusahaan Vietnam juga dapat memperluas kegiatan ekonomi, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat setempat memperoleh kesempatan bekerja dari perkembangan investasi tersebut.
- Peningkatan investasi akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia. Karena itu, penguatan sekolah menengah kejuruan, pelatihan kerja, dan pendidikan vokasi penting dilakukan agar masyarakat Jawa Tengah dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan perusahaan.
- Sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan dana zakat yang terarah juga dapat mendukung kegiatan produktif sehingga

manfaatnya tidak hanya berupa bantuan sementara, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Program sumur resapan dan kegiatan kepedulian terhadap ketersediaan air dapat membantu masyarakat menghadapi kesulitan air pada musim kemarau. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketersediaan air yang lebih baik juga dapat mendukung kegiatan pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- Indeks kepercayaan konsumen Jawa Tengah pada September 2026 masih berada di atas angka 100, meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap perekonomian, tetapi pemerintah daerah tetap perlu menjaga kestabilan harga dan memperluas kesempatan kerja agar kepercayaan tersebut tidak melemah.
- Perubahan kebijakan suku bunga Amerika Serikat, gejolak investasi kecerdasan buatan, serta ketegangan geopolitik dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar di Indonesia. Dampaknya dapat dirasakan oleh daerah, termasuk Jawa Tengah, melalui perubahan biaya produksi, kegiatan perdagangan, dan keputusan perusahaan dalam mengembangkan investasi.
- Pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat kegiatan produksi serta memperluas lapangan kerja. Agar manfaatnya lebih merata, pemerintah perlu menghubungkan investasi dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menjaga daya beli, dan memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Berita Minggu, 8 November 2026

Kesimpulan

Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh perkembangan inflasi, kebijakan suku bunga, serta ketidakpastian kondisi ekonomi di sejumlah negara. Di Amerika Serikat, tekanan harga barang dan jasa diperkirakan mulai mengalami perlambatan pada Oktober 2026 setelah kenaikan yang cukup tinggi selama dua bulan sebelumnya. Indeks Harga Konsumen diproyeksikan meningkat sebesar 0,3 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan sebelumnya sebesar 0,6 persen, sedangkan inflasi inti diperkirakan hanya naik 0,2 persen. Perlambatan tersebut memberikan gambaran bahwa tekanan harga mulai berkurang, terutama karena kenaikan harga barang dan jasa tidak lagi sebesar periode sebelumnya. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran terhadap inflasi karena indeks harga produsen masih diperkirakan meningkat hingga 6,6 persen secara tahunan. Perkembangan ini menjadi perhatian para pelaku pasar menjelang pertemuan Federal Reserve pada Desember 2026 karena masih terdapat kemungkinan kenaikan suku bunga apabila tekanan inflasi belum terkendali. Dengan demikian, arah kebijakan moneter Amerika Serikat tetap menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan dan perekonomian dunia.

Ketidakpastian ekonomi global tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap dampak perubahan iklim yang ditimbulkan oleh aktivitas pelayaran internasional. Hasil penelitian Zero Carbon Analytics menunjukkan bahwa emisi dari sektor pelayaran telah menyebabkan kerugian ekonomi global sekitar 962,7 miliar dolar Amerika Serikat selama periode 1990 hingga 2020. Kerugian tersebut muncul karena emisi karbon dioksida meningkatkan suhu global dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Amerika Serikat, China, dan Jepang tercatat mengalami kerugian terbesar secara nilai, sedangkan beberapa negara berpendapatan rendah dan kawasan Timur Tengah merasakan dampak yang cukup berat jika dibandingkan dengan ukuran perekonomiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan emisi tidak hanya berkaitan dengan

kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memperbesar beban ekonomi dan memperlebar ketimpangan antarnegara. Oleh karena itu, Organisasi Maritim Internasional mendorong pengurangan emisi sektor pelayaran secara bertahap, dengan target penurunan emisi gas rumah kaca minimal 20 persen pada 2030 dan 70 persen pada 2040 dibandingkan tingkat 2008, serta menuju emisi nol bersih sekitar 2050. Walaupun penerapan kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang besar, upaya pengurangan emisi dinilai penting untuk mencegah kerugian ekonomi dan dampak kesehatan yang lebih luas pada masa mendatang.

Dampak perkembangan ekonomi global selanjutnya terlihat pada pergerakan nilai tukar mata uang di kawasan Asia yang menunjukkan kondisi berbeda-beda. Pada perdagangan 8 November 2026, yen Jepang dan yuan China mengalami pelemahan harian, sementara ringgit Malaysia dan dolar Singapura mencatatkan penguatan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing negara, kebijakan bank sentral, perkembangan perdagangan, serta ketidakpastian arah suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat. China memperoleh dukungan dari surplus perdagangan dan kegiatan ekspor manufaktur, sedangkan ringgit Malaysia ditopang oleh pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor elektronik. Di sisi lain, yen Jepang masih menghadapi tekanan akibat perbedaan suku bunga dengan Amerika Serikat, sementara dolar Singapura didukung oleh kondisi ekonomi dan kebijakan nilai tukar yang relatif kuat. Rupiah sendiri ditutup pada posisi Rp18.089 per dolar Amerika Serikat pada 6 November 2026, sedikit lebih kuat dibandingkan posisi sebelumnya. Namun, rupiah masih menghadapi risiko tekanan akibat arus modal asing, kebutuhan pembiayaan eksternal, dan perubahan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat Bank Indonesia perlu terus menjaga kestabilan nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing dan penguatan instrumen lindung nilai, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Tekanan dan ketidakpastian dari perekonomian global tersebut turut menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan mencapai 5,4 persen pada kuartal IV dengan mengandalkan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, dan peningkatan ekspor. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan stimulus sekitar Rp31 triliun serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kegiatan investasi dan memperbaiki berbagai aturan yang dinilai menghambat ekspor agar produk dalam negeri lebih mudah memasuki pasar internasional. Upaya tersebut juga dilengkapi dengan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga bagi 33,24 juta keluarga, subsidi upah sebesar Rp900 ribu bagi pekerja yang memenuhi ketentuan, serta berbagai insentif transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kemampuan belanja masyarakat, mempertahankan aktivitas usaha, dan mendorong perputaran ekonomi pada akhir tahun. Dengan demikian, pencapaian target pertumbuhan tidak hanya bergantung pada peningkatan belanja pemerintah, tetapi juga pada kemampuan menjaga kestabilan harga, memperkuat investasi, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain menjaga pertumbuhan melalui stimulus dan belanja pemerintah, penguatan kegiatan ekspor juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan perekonomian nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pendampingan kepada pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, agar mampu memasuki pasar internasional. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pemberian informasi mengenai prosedur ekspor, kelengkapan dokumen, ketentuan kepabeanan, serta peluang pengembangan pasar bagi produk dalam negeri. Petugas juga membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga mereka dapat mempersiapkan kegiatan ekspor dengan lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Sejumlah usaha lokal, seperti kerajinan rajut, batu damar, dan mebel, menjadi bagian dari pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan tersebut. Langkah ini penting karena kemampuan usaha kecil untuk menembus pasar global tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh pemahaman terhadap aturan perdagangan dan kesiapan memenuhi kebutuhan pasar. Apabila pendampingan

dilakukan secara berkelanjutan, produk lokal diharapkan memiliki jangkauan pemasaran yang lebih luas, daya saing yang meningkat, serta peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkembangan ekonomi nasional juga perlu didukung oleh pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi fiskal negara. Dalam hal ini, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk membiayai program prioritas sekaligus menjaga agar penggunaan anggaran tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan berbagai stimulus, bantuan sosial, dan program pemerintah membutuhkan ketepatan sasaran agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Di sisi lain, penguatan kegiatan ekonomi juga perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengembangan usaha yang mampu menghasilkan nilai tambah. Kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat perlu berjalan seiring dengan penguatan investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja rumah tangga dan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi penting dalam memastikan kebijakan ekonomi dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Keterpaduan kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global.

Dampak kebijakan ekonomi dan perkembangan aktivitas usaha tersebut juga terlihat pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan untuk mendukung pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Penerimaan pajak daerah memiliki peran penting karena dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, berbeda dengan sebagian dana dari pemerintah pusat yang penggunaannya telah ditentukan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan dan insentif, antara lain diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen, pembebasan denda dan pajak progresif, serta program pengembalian dana sebesar Rp50.000 bagi lima wajib pajak terpilih di setiap kantor Samsat induk kabupaten dan kota. Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.

Peningkatan penerimaan daerah tersebut juga perlu diikuti dengan penguatan investasi dan perkembangan kegiatan usaha agar perekonomian Jawa Tengah semakin produktif. Salah satu perkembangan yang terlihat adalah realisasi investasi Kota Semarang yang telah mencapai Rp9,6 triliun hingga triwulan ketiga 2026, mendekati target sebesar Rp12 triliun sepanjang tahun. Capaian tersebut didukung oleh kemudahan pelayanan perizinan, kondisi keamanan yang terjaga, serta perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pertumbuhan investasi juga terlihat dari semakin banyaknya usaha kuliner di Kota Semarang, dengan jumlah restoran dan tempat makan meningkat dari sekitar 3.500 menjadi lebih dari 3.700 usaha. Bertambahnya kegiatan usaha tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah semakin berkembang dan sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman. Selain itu, pertumbuhan investasi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Agar perkembangan tersebut terus berlanjut, pemerintah daerah perlu mempertahankan kemudahan perizinan dan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung. Dengan demikian, peningkatan investasi tidak hanya tercermin dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari bertambahnya kegiatan usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan daerah.

Perkembangan investasi dan kegiatan usaha tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,47 persen. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi 34,05 persen, diikuti perdagangan sebesar 13,58 persen, pertanian sebesar 12,17 persen, dan konstruksi sebesar 12,10 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dengan kontribusi 58,76 persen, sementara ekspor menyumbang 45,66 persen dan investasi fisik sebesar 32,63 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Namun, pertumbuhan yang telah dicapai perlu dijaga melalui penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Pengolahan hasil pertanian juga perlu dikembangkan supaya produk yang dihasilkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui kegiatan industri. Dengan keterhubungan antara pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, perekonomian Jawa Tengah diharapkan semakin kuat dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut, pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pangan menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama menjelang Natal, Tahun Baru, Ramadan, dan Idulfitri. Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 2,99 persen secara tahunan, sehingga masih berada dalam kondisi terkendali. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang tetap perlu mendapat perhatian karena menghadapi tekanan harga pangan. Pemerintah provinsi bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat pengawasan rantai pasok, mengadakan Gerakan Pangan Murah, serta melaksanakan hampir 2.000 kegiatan operasi pasar dan bazar pangan di berbagai wilayah. Selain menjaga harga, kerja sama antardaerah juga diperluas dengan mempertemukan produsen dan pembeli agar distribusi bahan pangan menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan. Langkah tersebut semakin penting karena meningkatnya permintaan masyarakat pada periode hari besar keagamaan berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan dan distribusi tidak dikelola dengan baik. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha, kestabilan harga diharapkan dapat dipertahankan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Upaya pengendalian inflasi tersebut juga didukung oleh kondisi persediaan pangan Jawa Tengah yang secara umum dinyatakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar komoditas pangan utama telah melampaui target kebutuhan, dengan surplus beras diperkirakan mencapai 1,4 juta hingga 1,5 juta ton, sementara produksi jagung, kopi, daging, susu, dan telur juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, produksi kedelai masih perlu ditingkatkan karena realisasinya baru mencapai 20,69 persen dari target yang ditetapkan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah provinsi menyiapkan gerakan penanaman kedelai secara serentak di Kabupaten Grobogan dengan luas lahan sekitar 2.000 hektare. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun persediaan sebagian besar bahan pangan berada dalam kondisi mencukupi, pemerintah tetap perlu memperhatikan komoditas yang produksinya belum memenuhi target agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, dan pengawasan harga yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, berbagai upaya mulai dari peningkatan produksi pertanian, penguatan kerja sama antardaerah, pengembangan investasi, hingga peningkatan penerimaan daerah saling mendukung dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara keseluruhan, berita ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah pada Minggu, 8 November 2026 menunjukkan bahwa perekonomian masih memiliki peluang untuk tumbuh, tetapi tetap menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Dari sisi internasional, perlambatan inflasi

Amerika Serikat memberikan harapan terhadap berkurangnya tekanan harga, meskipun kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve masih menjadi perhatian pasar. Di sisi lain, kerugian ekonomi akibat emisi pelayaran global memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan berbagai negara. Ketidakpastian tersebut turut memengaruhi pergerakan mata uang Asia, termasuk rupiah, yang masih menghadapi tekanan akibat kondisi pasar keuangan global dan kebutuhan pembiayaan eksternal. Menghadapi keadaan tersebut, Indonesia berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pemerintah, peningkatan investasi, penguatan ekspor, serta berbagai bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif melalui pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka nasional, peningkatan investasi, berkembangnya sektor usaha, dan penguatan penerimaan daerah. Capaian tersebut juga didukung oleh upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dengan demikian, hubungan antara perkembangan ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat, dan kegiatan ekonomi daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan perekonomian secara menyeluruh. Ke depannya, pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat melalui pengelolaan kebijakan yang tepat, peningkatan produktivitas, pengembangan sektor usaha, pemerataan kesempatan kerja, serta pengendalian harga kebutuhan pokok agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Ringkasan

- Harga konsumen Amerika Serikat pada Oktober 2026 diperkirakan meningkat sebesar 0,3 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan naik sebesar 0,2 persen. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan tekanan harga, meskipun kondisi inflasi masih menjadi perhatian menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada Desember 2026.
- Indeks harga produsen pada Oktober 2026 diperkirakan meningkat sebesar 6,6 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa biaya yang ditanggung perusahaan masih cukup besar dan dapat memengaruhi harga barang maupun jasa. Kondisi ini membuat perkembangan inflasi tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keputusan kebijakan moneter Amerika Serikat.
- Penelitian Zero Carbon Analytics memperkirakan emisi sektor pelayaran internasional menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 962,7 miliar dolar Amerika Serikat selama 1990–2020. Kerugian tersebut berkaitan dengan dampak perubahan iklim akibat emisi karbon dioksida. Amerika Serikat, China, dan Jepang termasuk negara yang mengalami kerugian ekonomi terbesar akibat dampak tersebut.
- Sektor pelayaran internasional menyumbang sekitar 2 persen dari keseluruhan emisi karbon dioksida dunia. Untuk mengurangi dampaknya, Organisasi Maritim Internasional menetapkan target penurunan emisi sedikitnya 20 persen pada 2030 dan 70 persen pada 2040 dibandingkan tingkat emisi 2008. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai emisi nol bersih sekitar 2050.
- Pada perdagangan 8 November 2026, yen Jepang dan yuan China mengalami pelemahan, sedangkan ringgit Malaysia dan dolar Singapura menguat. Perbedaan pergerakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing negara, kebijakan bank sentral, serta perkembangan pasar keuangan global. Situasi ini menunjukkan bahwa setiap mata uang Asia memiliki tingkat ketahanan yang berbeda dalam menghadapi perubahan ekonomi dunia.
- Rupiah masih menghadapi risiko pelemahan hingga akhir 2026. Rupiah ditutup pada posisi Rp18.089 per dolar Amerika Serikat pada 6 November 2026, atau menguat 0,32 persen dibandingkan penutupan 30 Oktober 2026. Meskipun mengalami penguatan, rupiah diperkirakan berada di sekitar Rp18.350 per dolar Amerika Serikat pada akhir kuartal keempat. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh arus modal asing, kebutuhan pembiayaan eksternal, dan perubahan imbal hasil obligasi Amerika Serikat.

- Ketidakstabilan mata uang Asia membuat investor disarankan tidak terburu-buru membeli mata uang dalam jumlah besar ketika dolar Amerika Serikat melemah. Pembelian secara bertahap dan penyebaran investasi ke beberapa mata uang dapat membantu mengurangi risiko kerugian. Keputusan investasi juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, dan pergerakan modal asing.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada akhir 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan stimulus sekitar Rp31 triliun guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta meningkatkan investasi dan kegiatan ekspor. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi hingga akhir tahun.
- Bantuan sosial dan subsidi disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan kepada 33,24 juta keluarga pada Oktober hingga November 2026. Selain itu, disiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000 bagi 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dan berada di bawah upah minimum provinsi. Pemerintah juga menyiapkan pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp50.000 bagi 25,16 juta penerima.
- Pemerintah memberikan insentif perjalanan untuk periode Natal dan Tahun Baru. Insentif tersebut meliputi pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sepenuhnya untuk tiket pesawat ekonomi domestik bagi 3,75 juta penumpang. Pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30 persen, serta membebaskan tarif jasa pelabuhan di 14 pelabuhan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya perjalanan dan mendorong mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.
- Pelaksanaan bantuan pemerintah membutuhkan ketepatan data dan koordinasi. Rencana pemangkasan bunga pinjaman Mekaar dan perluasan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil serta masyarakat rentan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa ketepatan data penerima, kesiapan anggaran daerah, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika penyalurannya terlambat, manfaat program tersebut berisiko tidak dirasakan secara maksimal.
- Koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen pada kuartal ketiga 2026, tetapi masih terdapat hambatan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Ketidakpastian peraturan, lemahnya koordinasi kebijakan, dan daya beli yang belum merata menjadi beberapa persoalan utama. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
- Investasi perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Para ekonom menilai keberhasilan investasi tidak hanya dilihat dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Investasi juga diharapkan dapat mendorong transfer teknologi serta memberikan dampak sosial dan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, kepastian peraturan dan kemudahan berusaha perlu diperkuat agar investor tertarik menanamkan modal di Indonesia.
- Utang pemerintah meningkat secara nominal, tetapi rasionya terhadap produk domestik bruto menurun. Hingga akhir September, utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.326,93 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 40,30 persen. Angka tersebut turun dari posisi Juni yang mencapai 41,26 persen. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara agar kondisi keuangan negara tetap terjaga.
- Pengangguran usia muda meningkat di tengah penurunan pengangguran nasional. Tingkat pengangguran terbuka kelompok usia 15–24 tahun mencapai 17,50 persen pada Agustus 2026, meningkat dari 16,89 persen pada Agustus 2025. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan

tingkat pengangguran nasional sebesar 4,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak muda masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan meskipun jumlah pengangguran secara keseluruhan mengalami penurunan.

- Jumlah penduduk bekerja di Indonesia mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang, dengan 147,99 juta orang telah bekerja dan 7,38 juta orang masih menganggur. Jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 1,443 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja justru turun menjadi 70,33 persen, sehingga perkembangan kesempatan kerja masih perlu diperhatikan.
- Pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia. Besarnya jumlah pekerja informal menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor formal masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pekerjaan formal umumnya memberikan kepastian kerja dan perlindungan yang lebih baik. Pemerintah perlu mendorong perluasan lapangan kerja formal agar kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja semakin meningkat.
- Bea Cukai memberikan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasuki pasar ekspor. Pendampingan dilakukan melalui penjelasan mengenai prosedur ekspor, kelengkapan dokumen, peraturan kepabeanan, dan peluang pasar internasional. Kegiatan tersebut menyasar pelaku usaha kerajinan rajut, batu damar, dan mebel. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha diharapkan lebih siap memasarkan produk lokal ke luar negeri dan meningkatkan daya saing usahanya.
- Kegiatan hiburan internasional berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi Jakarta. Penyelenggaraan konser musik dan kegiatan olahraga berskala internasional dinilai dapat menarik kunjungan masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Antusiasme terhadap konser Guns N' Roses pada November dan BTS pada Desember 2026 menjadi peluang bagi perkembangan pariwisata perkotaan. Kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di sekitar lokasi acara apabila keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat terjaga.
- Pajak daerah menjadi sumber pendapatan penting untuk pembangunan Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong masyarakat agar lebih tertib membayar pajak karena pendapatan asli daerah dapat digunakan secara lebih leluasa untuk membiayai program pembangunan. Dana tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
- Insentif pajak kendaraan diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen yang berlaku sejak Februari 2026. Selain itu, terdapat program pembebasan denda pajak kendaraan dan pajak progresif hingga 28 Desember 2026. Pemerintah juga memberikan pengembalian uang sebesar Rp50.000 kepada lima wajib pajak terpilih di setiap kantor Samsat induk kabupaten dan kota mulai 5 November hingga 31 Desember 2026.
- Investasi Kota Semarang mencapai Rp9,6 triliun hingga triwulan ketiga 2026. Capaian tersebut mendekati target investasi sebesar Rp12 triliun yang ditetapkan pemerintah kota untuk tahun ini. Kemudahan perizinan, kondisi ekonomi, dan stabilitas keamanan menjadi faktor yang mendukung minat investor. Investasi tersebut didominasi sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata serta diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Jumlah usaha kuliner di Kota Semarang terus bertambah. Jumlah restoran, rumah makan, dan kafe meningkat dari sekitar 3.500 usaha menjadi lebih dari 3.700 usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kuliner semakin berkembang dan memperkuat daya tarik Semarang sebagai tujuan wisata kuliner. Bertambahnya usaha tersebut juga berpeluang meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor makanan dan minuman.

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Pada triwulan ketiga 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan nasional mencapai 5,47 persen. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 34,05 persen, diikuti perdagangan 13,58 persen, pertanian 12,17 persen, dan konstruksi 12,10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Tengah.
- Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi Jawa Tengah. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 58,76 persen, sedangkan ekspor mencapai 45,66 persen dan investasi fisik sebesar 32,63 persen. Secara kuartalan, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 1,20 persen dibandingkan triwulan kedua 2026. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan sektor konstruksi dan investasi fisik, sehingga kegiatan konsumsi dan investasi tetap memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian daerah.
- Hilirisasi pertanian dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu terus dikembangkan. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui kegiatan pengolahan, bukan hanya menjual hasil dalam bentuk bahan mentah. Selain itu, kualitas produk dan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat menghubungkan sektor pertanian dengan industri dan perdagangan sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
- Inflasi Jawa Tengah masih terkendali, tetapi harga pangan tetap perlu diawasi. Pada Oktober 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 2,99 persen secara tahunan. Meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena adanya tekanan harga pangan. Pemerintah meningkatkan pengawasan pasokan untuk mencegah kelangkaan dan penimbunan menjelang Natal, Tahun Baru, Ramadan, dan Idulfitri.
- Operasi pasar dilakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan hampir 2.000 kegiatan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia mendorong kerja sama antardaerah dengan mempertemukan produsen dan pembeli hasil pangan. Upaya ini bertujuan memperpendek rantai distribusi, mengurangi biaya logistik, dan menjaga ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
- Stok beras dan sebagian besar komoditas pangan Jawa Tengah berada dalam kondisi surplus. Persediaan beras diperkirakan mengalami surplus sekitar 1,4 juta hingga 1,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Produksi padi telah mencapai 79,01 persen, jagung 82,18 persen, kopi 90,28 persen, daging 89,19 persen, susu 91,92 persen, dan telur 80,51 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas pangan utama telah berada pada kondisi yang cukup baik.
- Produksi kedelai menjadi salah satu komoditas yang masih perlu ditingkatkan. Realisasi produksi kedelai di Jawa Tengah baru mencapai 20,69 persen sehingga masih tertinggal dibandingkan komoditas pangan lainnya. Untuk mempercepat peningkatan produksi, pemerintah menyiapkan penanaman kedelai secara serentak di Kabupaten Grobogan dengan sasaran lahan sekitar 2.000 hektare. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi dan memperkuat ketersediaan kedelai di Jawa Tengah.

Implikasi

- Perkiraan kenaikan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tekanan harga masih perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan Federal Reserve dalam menentukan arah suku bunga, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember. Bagi perekonomian global, perubahan kebijakan tersebut dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar, arus investasi, dan kondisi pasar keuangan negara lain, termasuk Indonesia.
- Kerugian ekonomi akibat emisi industri pelayaran yang diperkirakan mencapai 962,7 miliar dolar Amerika Serikat selama periode 1990–2020 menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan dan transportasi laut perlu memperhatikan dampak lingkungan, bukan hanya keuntungan operasional. Oleh karena itu, pengurangan emisi menjadi penting untuk menekan potensi kerugian ekonomi dan menjaga keberlanjutan aktivitas pelayaran internasional.
- Target pengurangan emisi sebesar 20 persen pada 2030 dan 70 persen pada 2040, serta upaya mencapai emisi nol bersih sekitar 2050, mendorong industri pelayaran untuk mulai menyesuaikan kegiatan operasionalnya. Perusahaan pelayaran perlu memperhatikan penggunaan teknologi dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan agar mampu memenuhi ketentuan tersebut. Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat mendorong kebutuhan investasi baru di sektor pelayaran, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas transportasi laut.
- Melemahnya yen Jepang dan yuan China, sementara ringgit Malaysia dan dolar Singapura mengalami penguatan, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi serta kebijakan moneter setiap negara memberikan pengaruh berbeda terhadap nilai mata uangnya. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi perdagangan dan investasi antarnegara karena perubahan nilai tukar turut menentukan biaya transaksi internasional. Oleh sebab itu, pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan lintas negara perlu memperhatikan perkembangan kurs agar dapat mengantisipasi perubahan biaya dan penerimaan.
- Nilai tukar rupiah yang ditutup pada Rp18.089 per dolar Amerika Serikat pada 6 November 2026 dan diperkirakan dapat mencapai Rp18.350 pada akhir triwulan keempat menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah masih perlu diwaspadai. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya impor, terutama untuk barang dan bahan baku yang pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat. Apabila berlangsung dalam waktu lama, kenaikan biaya tersebut juga berpotensi memengaruhi biaya produksi dan harga barang di dalam negeri.
- Intervensi Bank Indonesia dan penggunaan instrumen lindung nilai menjadi bagian penting dalam menghadapi tekanan terhadap rupiah. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi gejolak nilai tukar dan menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dengan stabilitas nilai tukar yang lebih terjaga, kegiatan perdagangan, investasi, dan pembayaran internasional diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik.
- Pergerakan mata uang yang tidak seragam dan ketidakpastian global menunjukkan bahwa investor perlu lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan investasi. Diversifikasi dan pembelian aset secara bertahap dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar. Dengan strategi tersebut, investor tidak terlalu bergantung pada satu jenis aset atau satu kondisi pasar sehingga dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih terukur.
- Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjaga momentum kegiatan ekonomi melalui stimulus, peningkatan investasi, dan kemudahan ekspor. Pelaksanaan berbagai program pemerintah juga perlu diarahkan agar dapat mendorong aktivitas usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pencapaian target pertumbuhan tidak hanya bergantung pada besarnya

anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong kegiatan ekonomi.

- Penyaluran bantuan beras, pemberian saldo awal rekening bagi penerima manfaat, subsidi upah, serta berbagai bantuan lainnya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program tersebut menjadi penting terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Apabila bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga konsumsi rumah tangga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pemberian insentif transportasi melalui pembebasan pajak pertambahan nilai tiket pesawat kelas ekonomi, potongan tarif kereta api dan kapal laut, serta layanan pelabuhan gratis dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Meningkatnya perjalanan dapat memberikan dorongan terhadap kegiatan ekonomi di daerah tujuan, terutama sektor transportasi, perdagangan, penginapan, dan pariwisata.
- Penurunan bunga pinjaman Mekaar dan perluasan kepesertaan bantuan iuran BPJS dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan maupun perlindungan sosial. Namun, manfaat program tersebut sangat bergantung pada ketepatan data penerima, koordinasi anggaran, serta kecepatan penyalurannya. Apabila pelaksanaannya tidak didukung administrasi yang baik, bantuan berisiko tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga tujuan program belum dapat tercapai secara maksimal.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan ketiga menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi pencapaian pertumbuhan sebesar 6 persen masih menghadapi sejumlah hambatan. Ketidakpastian peraturan, lemahnya koordinasi kebijakan, dan daya beli masyarakat yang belum merata dapat membatasi perkembangan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kepastian hukum dan koordinasi antarlembaga agar dunia usaha memiliki kejelasan dalam mengambil keputusan serta meningkatkan kegiatan investasi.
- Peningkatan investasi perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang tidak hanya menambah nilai modal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, serta dampak sosial dan lingkungan perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai keberhasilan investasi. Dengan demikian, investasi dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan.
- Utang pemerintah yang mencapai Rp10.326,93 triliun pada akhir September dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 40,30 persen menunjukkan pentingnya pengelolaan pembiayaan negara secara hati-hati. Penurunan rasio utang dibandingkan posisi Juni menjadi perkembangan positif, tetapi pemerintah tetap perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga. Apabila beban bunga terus meningkat, ruang anggaran untuk membiayai pembangunan dan program masyarakat dapat menjadi lebih terbatas.
- Tingkat pengangguran penduduk usia 15–24 tahun yang meningkat menjadi 17,50 persen pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa kelompok usia muda masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jumlah penduduk usia produktif yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi dapat mengurangi potensi produktivitas nasional. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja dan kesiapan keterampilan tenaga kerja muda menjadi penting agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha.
- Jumlah pekerja informal yang mencapai 85,73 juta orang atau sekitar 57,93 persen dari seluruh penduduk bekerja menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat perlindungan dan kepastian kerja terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja karena tidak semua pekerjaan informal

memberikan pendapatan dan perlindungan yang stabil. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja yang lebih layak perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketenagakerjaan.

- Pendampingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pelaku usaha lokal dapat membantu UMKM memahami prosedur, dokumen, dan ketentuan teknis ekspor. Pengetahuan tersebut penting untuk mengurangi kesalahan administrasi dan mempersiapkan produk agar dapat memenuhi persyaratan pasar internasional. Apabila pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, produk seperti kerajinan rajut, batu damar, dan mebel berpeluang memperluas jangkauan pemasaran serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
- Penyelenggaraan konser internasional dan ajang olahraga di Jakarta berpotensi meningkatkan kunjungan masyarakat dari berbagai daerah maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah pengunjung dapat memberikan tambahan aktivitas ekonomi bagi sektor perhotelan, restoran, transportasi, perdagangan, dan usaha pendukung lainnya. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan kota perlu dijaga agar Jakarta mampu menarik lebih banyak kegiatan berskala internasional dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.
- Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Semakin baik penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
- Pemberian diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5 persen, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif, serta program cashback Rp50.000 dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan dan penghargaan tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih tertarik membayar pajak tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat, penerimaan daerah juga berpeluang menjadi lebih baik sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.
- Realisasi investasi Kota Semarang sebesar Rp9,6 triliun hingga triwulan ketiga menunjukkan bahwa minat investor terhadap daerah tersebut masih cukup baik dan mendekati target tahunan sebesar Rp12 triliun. Kemudahan pelayanan perizinan dan stabilitas keamanan menjadi faktor yang mendukung masuknya investasi, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Apabila perkembangan tersebut terus dipertahankan, investasi dapat memperluas kegiatan usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Bertambahnya jumlah restoran, rumah makan, dan kafe di Semarang dari sekitar 3.500 menjadi lebih dari 3.700 usaha menunjukkan bahwa sektor kuliner terus berkembang. Pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, pembelian bahan baku, dan meningkatnya kegiatan perdagangan. Selain itu, bertambahnya usaha kuliner juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,83 persen pada triwulan ketiga 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen, menunjukkan bahwa perekonomian daerah memiliki perkembangan yang cukup kuat. Kondisi tersebut didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi. Capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan sektor-sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- Konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 58,76 persen, ekspor sebesar 45,66 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 32,63 persen menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Jawa Tengah didukung oleh permintaan masyarakat, perdagangan luar daerah, dan investasi. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga daya beli

masyarakat sekaligus memperluas pasar bagi produk daerah. Dengan dukungan investasi yang produktif, kegiatan usaha dapat berkembang dan kapasitas produksi daerah semakin meningkat.

- Potensi sektor pertanian Jawa Tengah perlu dikembangkan agar hasil produksinya tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pengembangan pengolahan hasil pertanian dapat memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan industri pengolahan, sekaligus membuka peluang usaha baru. Apabila didukung peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar, langkah tersebut dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
- Inflasi Jawa Tengah sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 2,99 persen secara tahunan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa perkembangan harga masih relatif terkendali. Meskipun demikian, tekanan harga di Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang tetap perlu diperhatikan agar tidak berkembang menjadi kenaikan harga yang lebih luas. Pengendalian inflasi menjadi penting karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang hari besar keagamaan.
- Pelaksanaan hampir 2.000 kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok. Langkah tersebut perlu didukung pengawasan rantai pasok untuk mencegah penimbunan dan kelangkaan barang di masyarakat. Selain itu, kerja sama antardaerah dapat membantu memperlancar distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, dan mengurangi biaya logistik sehingga harga kebutuhan pokok lebih terkendali.
- Surplus produksi sejumlah komoditas seperti beras, jagung, kopi, daging, susu, dan telur menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah. Potensi tersebut perlu dikelola melalui penguatan produksi, distribusi, dan penyimpanan agar ketersediaan pangan tetap terjaga ketika permintaan meningkat. Dengan pengelolaan yang baik, hasil produksi pertanian dan peternakan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi petani dan peternak.
- Tingkat pemenuhan produksi kedelai yang baru mencapai 20,69 persen menunjukkan bahwa komoditas tersebut masih menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Jawa Tengah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian melalui peningkatan produktivitas dan perluasan kegiatan penanaman kedelai. Upaya penanaman serentak sekitar 2.000 hektare di Grobogan dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan produksi, memperkuat ketersediaan bahan baku, dan mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan produksi daerah.

Berita Senin, 9 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi global pada Senin, 9 November 2026, menunjukkan bahwa tekanan terhadap perekonomian dunia masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya inflasi produsen di China yang mencapai 5,7 persen pada Oktober 2026, menjadi tingkat tertinggi sejak Juni 2022. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga energi, bahan bakar, dan logam yang mendorong biaya produksi industri. Namun, kenaikan biaya tersebut belum sepenuhnya dapat diteruskan kepada konsumen karena daya beli masyarakat China masih lemah. Hal ini tercermin dari inflasi konsumen yang justru turun menjadi 0,7 persen dan inflasi inti yang berada di angka 0,8 persen. Dengan demikian, meskipun biaya produksi mengalami peningkatan, permintaan dalam negeri yang belum kuat membuat perusahaan kesulitan menaikkan harga jual produknya. Keadaan tersebut

menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi China masih belum merata karena tekanan biaya produksi belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Lemahnya permintaan dalam negeri tersebut juga memperlihatkan bahwa tantangan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihadapi China, tetapi turut dirasakan oleh negara lain di kawasan Asia. Salah satunya adalah Filipina yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1 persen secara tahunan pada kuartal III-2026, lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar sebesar 3 persen. Dari sisi kuartalan, pertumbuhannya bahkan hanya mencapai 0,1 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 0,6 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Filipina masih menghadapi tekanan dan membutuhkan penguatan agar pertumbuhannya dapat kembali meningkat. Berbeda dengan kondisi tersebut, Jerman justru mencatat perkembangan positif melalui kenaikan ekspor sebesar 2 persen pada September 2026, melampaui perkiraan pasar yang hanya sebesar 0,5 persen. Peningkatan ekspor tersebut terutama didukung oleh permintaan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan berhasil membalikkan penurunan yang terjadi selama dua bulan sebelumnya. Perbedaan kondisi antara Filipina dan Jerman ini memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi setiap negara masih dipengaruhi oleh kekuatan permintaan, kemampuan produksi, serta hubungan perdagangan dengan negara mitra.

Di tengah kondisi perdagangan global yang belum sepenuhnya stabil, hubungan ekonomi antara China dan Amerika Serikat juga menjadi perhatian karena kedua negara kembali memperpanjang penangguhan sejumlah kebijakan tarif. China memutuskan untuk menangguhkan tarif tambahan sebesar 24 persen terhadap produk impor Amerika Serikat selama dua bulan, sementara tarif sebesar 10 persen tetap berlaku. Selain itu, penangguhan pungutan khusus terhadap kapal yang berkaitan dengan Amerika Serikat serta sejumlah pembatasan perdagangan lainnya juga diperpanjang hingga Januari 2027. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk melanjutkan pembicaraan dan menjaga hubungan perdagangan agar tidak kembali mengalami ketegangan yang lebih besar. Meskipun demikian, kesepakatan perdagangan senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya diusulkan belum sepenuhnya diselesaikan, sehingga ketidakpastian masih tetap ada. Di sisi lain, penguatan yuan turut mendorong sejumlah bank di China menaikkan bunga deposito dolar Amerika Serikat untuk menahan dana eksportir agar tidak segera ditukarkan ke yuan. Langkah tersebut dilakukan karena penguatan yuan sekitar 10 persen terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal 2025 berpotensi mengurangi daya saing harga produk ekspor China. Dengan demikian, kebijakan tarif dan pengelolaan nilai tukar menjadi dua hal penting yang terus diperhatikan China untuk menjaga stabilitas perdagangan serta melindungi kepentingan pelaku usahanya.

Selain berupaya menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, China juga menunjukkan perhatian terhadap kondisi geopolitik di Timur Tengah melalui kesediaannya memperkuat hubungan dengan Iran dan mendorong terciptanya stabilitas kawasan. Perkembangan tersebut penting karena ketegangan di Timur Tengah dapat memengaruhi pasokan energi dan harga komoditas dunia, terutama ketika jalur perdagangan minyak seperti Selat Hormuz mengalami gangguan. Kenaikan harga energi dan bahan baku yang terjadi akibat ketidakpastian geopolitik dapat meningkatkan biaya produksi berbagai negara, termasuk negara yang bergantung pada impor energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga dapat memengaruhi harga barang, kegiatan perdagangan, dan daya beli masyarakat. Berbagai perkembangan internasional tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi tantangan yang saling berkaitan, mulai dari perlambatan permintaan, persaingan perdagangan, perubahan nilai tukar, hingga ketegangan politik. Kondisi ini menjadi penting bagi Indonesia karena perubahan harga komoditas dan hubungan perdagangan global dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar, kegiatan ekspor, serta kondisi perekonomian nasional.

Pengaruh perkembangan global tersebut kemudian terlihat dalam kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui perubahan perilaku pasar keuangan dan aktivitas masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar keuangan tetap menjadi perhatian

karena pergerakannya dapat memengaruhi kepercayaan investor serta kegiatan ekonomi dalam negeri. Pada saat yang sama, hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya perubahan dalam pola penggunaan pendapatan masyarakat. Pada Oktober 2026, rata-rata pendapatan yang digunakan untuk konsumsi turun menjadi 73,6 persen dari 74,9 persen pada September 2026. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disimpan sebagai tabungan meningkat menjadi 16,4 persen dari sebelumnya 15,4 persen, sedangkan porsi untuk membayar cicilan atau utang tercatat sebesar 10,1 persen. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan dan mulai meningkatkan simpanan dibandingkan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk belanja. Peningkatan tabungan dapat menjadi langkah untuk menjaga kondisi keuangan rumah tangga, tetapi penurunan porsi konsumsi juga perlu diperhatikan karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perubahan pola konsumsi tersebut berkaitan dengan pentingnya menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berjalan. Ketika masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa dapat mengalami perubahan, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan kegiatan produksi dan penjualannya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi turut dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi dan tabungan perlu diperhatikan bersama dengan kondisi pendapatan, kesempatan kerja, serta kemampuan rumah tangga menghadapi perubahan harga. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar kebijakan ekonomi dapat mendukung kegiatan usaha sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kestabilan konsumsi rumah tangga menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

Selain kondisi konsumsi masyarakat, penguatan perdagangan luar negeri juga menjadi salah satu perkembangan penting bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor Indonesia selama Januari hingga September 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun perdagangan global masih menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik internasional. Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 10,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kemampuan industri dalam negeri dan pelaksanaan hilirisasi yang mendorong produk nasional memiliki nilai tambah serta daya saing lebih baik di pasar internasional. Sejumlah produk manufaktur seperti makanan dan minuman, alas kaki, serta tekstil turut memberikan kontribusi terhadap ekspor, disertai produk unggulan lainnya seperti minyak kelapa sawit mentah dan mineral. Untuk mempertahankan perkembangan tersebut, pemerintah mendorong penguatan kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, kualitas sumber daya manusia, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar tujuan ekspor. Ketersediaan bahan baku dalam negeri juga perlu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sebelum kelebihan produksinya dipasarkan ke luar negeri. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan ekspor perlu berjalan seimbang dengan penguatan industri domestik agar manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Perkembangan perdagangan nasional tersebut selanjutnya terlihat dari kegiatan industri di Jawa Tengah, khususnya melalui perluasan pasar ekspor produk makanan ringan PT Dua Kelinci dari Kabupaten Pati ke Australia. Perusahaan tersebut sebelumnya telah memasarkan produknya di Sydney dan Melbourne, kemudian memperluas distribusi ke Brisbane, Adelaide, dan Perth sehingga produknya kini menjangkau lima kota di Australia. Pada tahap awal perluasan pasar, perusahaan mengirimkan lima kontainer dan menargetkan peningkatan pengiriman menjadi sekitar 50 kontainer per tahun pada 2027. Produk yang dipasarkan mencapai sekitar 30 hingga 40 jenis, termasuk makanan berbahan kacang dan biskuit, yang memperoleh respons positif dari masyarakat Australia. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa produk industri makanan dari daerah memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional apabila didukung kapasitas produksi, kualitas produk, pengelolaan usaha, serta pemahaman terhadap

kebutuhan konsumen. Keberhasilan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan ekspor nasional dan memperlihatkan bahwa perusahaan daerah dapat berperan dalam memperkuat perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan industri di Jawa Tengah tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor dan pembukaan peluang ekonomi baru.

Sejalan dengan perkembangan industri dan perdagangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan hasil yang positif. Pada Triwulan III 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, yaitu sebesar 34,05 persen, kemudian diikuti perdagangan sebesar 13,58 persen, pertanian sebesar 12,17 persen, dan konstruksi sebesar 12,10 persen. Besarnya kontribusi industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor manufaktur memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi Jawa Tengah. Namun, pertumbuhan tersebut perlu didukung oleh sektor lain, terutama pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Penguatan pertanian melalui pengolahan hasil produksi dan peningkatan nilai tambah juga menjadi langkah penting agar hubungan antara sektor pertanian dan industri semakin kuat. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang yang memfokuskan pertumbuhan ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 2027–2047. Penataan ruang tersebut diarahkan untuk menyesuaikan perkembangan investasi, kawasan industri, permukiman, pariwisata, dan infrastruktur, sekaligus tetap memperhatikan perlindungan lahan sawah serta kelestarian lingkungan.

Di samping mendorong pertumbuhan melalui industri dan penataan wilayah, pemerintah daerah di Jawa Tengah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pengelolaan anggaran. Pemerintah Kota Surakarta mencatat penurunan angka kemiskinan dari 8,31 persen pada 2025 menjadi 7,31 persen pada 2026. Capaian tersebut didukung oleh kerja sama berbagai pihak dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Penanganan stunting juga dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan sektor kesehatan, lingkungan, dan sosial, serta didukung pengintegrasian layanan Posyandu secara digital agar perkembangan balita dapat dipantau dengan lebih akurat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Blora mencatat realisasi belanja daerah hingga 31 Oktober 2026 sebesar Rp1,51 triliun atau 67,81 persen dari total anggaran Rp2,23 triliun. Meskipun sebagian besar belanja operasi telah terealisasi, penyerapan belanja modal baru mencapai 37,23 persen, sehingga masih terdapat anggaran yang perlu dioptimalkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan penyerapan anggaran yang lebih baik, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, upaya menjaga kesejahteraan masyarakat juga perlu didukung oleh pengendalian harga kebutuhan pokok agar daya beli tetap terjaga. Di Kabupaten Tegal, pemerintah daerah secara rutin menyampaikan informasi perkembangan harga bahan pokok melalui pemantauan di pasar tradisional, salah satunya Pasar Trayeman yang menjadi acuan bagi pasar lainnya. Berdasarkan data yang diperbarui pada 9 November 2026, harga rata-rata beras medium tercatat sebesar Rp13.500 per kilogram dan beras premium Raja Lele sebesar Rp14.900 per kilogram, sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku. Sementara itu, harga kedelai rata-rata mencapai Rp11.300 per kilogram, masih berada di bawah harga eceran tertinggi sebesar Rp12.000 per kilogram. Pemantauan tersebut penting untuk mengetahui perubahan harga dan membantu pemerintah mengambil langkah apabila terjadi kenaikan yang berpotensi membebani masyarakat. Jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi internasional dan nasional, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli rumah tangga, terutama ketika biaya produksi dan perdagangan masih dapat

dipengaruhi oleh perubahan harga energi serta kondisi pasar global. Secara keseluruhan, berbagai berita tersebut menunjukkan bahwa perekonomian internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ketidakpastian global dapat memengaruhi perdagangan dan biaya produksi, sedangkan kondisi nasional dan daerah perlu diperkuat melalui peningkatan ekspor, pengembangan industri, pengelolaan anggaran, pengentasan kemiskinan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Dengan memperkuat hubungan antara sektor industri, pertanian, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Ringkasan

- Inflasi produsen China pada Oktober 2026 mencapai 5,7 persen secara tahunan, menjadi tingkat tertinggi sejak Juni 2022, terutama karena kenaikan harga energi, bahan bakar, dan logam. Namun, kenaikan biaya produksi tersebut tidak diikuti peningkatan harga konsumen karena daya beli masyarakat masih lemah. Inflasi konsumen turun menjadi 0,7 persen, sedangkan inflasi inti berada di angka 0,8 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan China masih kesulitan meneruskan kenaikan biaya produksi kepada konsumen akibat lemahnya permintaan dalam negeri dan ketatnya persaingan pasar.
- Ekonomi Filipina tumbuh sebesar 2,1 persen secara tahunan pada kuartal III-2026, lebih rendah dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 3 persen. Secara kuartalan, pertumbuhannya hanya mencapai 0,1 persen, melambat dari 0,6 persen pada kuartal sebelumnya. Pemerintah Filipina juga merevisi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 menjadi 2,4 persen dari sebelumnya 2,3 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Filipina masih menghadapi tekanan dan prospek pertumbuhannya perlu diperhatikan hingga akhir tahun.
- Pemerintah China memutuskan untuk kembali menangguhkan tarif tambahan sebesar 24 persen terhadap produk impor Amerika Serikat selama dua bulan, sementara tarif sebesar 10 persen tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga kesepakatan perdagangan kedua negara dan memberikan kesempatan bagi kelanjutan negosiasi. China juga memperpanjang penangguhan pungutan khusus terhadap kapal yang berkaitan dengan Amerika Serikat serta penyelidikan keamanan rantai pasok industri pelayaran dan pembuatan kapal. Meskipun memberikan kepastian sementara bagi pelaku usaha, hubungan perdagangan kedua negara masih menghadapi ketidakpastian karena kesepakatan perdagangan senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat belum diselesaikan.
- Sejumlah bank di China menaikkan bunga deposito dolar Amerika Serikat hingga mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya 2023. Salah satu bank milik negara bahkan menawarkan bunga deposito sebesar 4,5 persen pada akhir Oktober, sedangkan bank lainnya memberikan bunga di atas 4 persen untuk simpanan tertentu. Kebijakan ini bertujuan mendorong eksportir dan nasabah tetap menyimpan pendapatan dalam bentuk dolar tanpa segera menukarkannya ke yuan. Langkah tersebut dilakukan karena yuan telah menguat sekitar 10 persen terhadap dolar sejak awal 2025 dan berpotensi mengurangi daya saing harga produk ekspor China.
- Perpanjangan gencatan dagang dilakukan melalui penangguhan sejumlah kebijakan perdagangan, termasuk tarif tambahan 24 persen, pembatasan ekspor mineral penting, pembatasan terhadap sejumlah perusahaan Amerika Serikat, dan pungutan khusus terhadap kapal yang berkaitan dengan negara tersebut. Kebijakan ini memberikan waktu bagi kedua negara untuk melanjutkan pembicaraan, terutama menjelang rencana pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Namun, China tetap mencermati kemungkinan perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat dan menyatakan dapat menyesuaikan langkah balasan apabila diperlukan. Dengan demikian, hubungan perdagangan kedua negara masih membutuhkan kesepakatan yang lebih jelas agar ketidakpastian tidak terus mengganggu aktivitas perdagangan.

- Nilai ekspor Jerman pada September 2026 tumbuh sebesar 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya, melampaui perkiraan analis sebesar 0,5 persen. Peningkatan ini terutama didukung oleh permintaan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan sekaligus mengakhiri penurunan ekspor selama dua bulan berturut-turut. Selain ekspor, impor Jerman juga meningkat sebesar 4,2 persen pada periode yang sama. Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian Jerman karena perdagangan luar negeri masih mampu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan perdagangan global yang semakin ketat.
- Pemerintah China menyatakan kesediaannya memperkuat hubungan dengan Iran sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas kawasan. Utusan khusus China untuk Timur Tengah, Zhai Jun, bertemu dengan pejabat keamanan nasional Iran dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan politik. China juga mendorong negara-negara yang terlibat agar mengutamakan dialog dan diplomasi daripada kembali menggunakan kekuatan militer. Upaya tersebut menunjukkan keinginan China untuk meningkatkan peran diplomatiknya di kawasan, mengingat konflik Timur Tengah dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan perekonomian dunia.
- Pemerintah Jepang melakukan intervensi pembelian yen dengan menggelontorkan dana sebesar 50,36 miliar dolar Amerika Serikat pada 30 Juli 2026, yang menjadi intervensi harian terbesar berdasarkan data sejak 1991. Secara keseluruhan, Jepang mengeluarkan dana sekitar 97,19 miliar dolar Amerika Serikat dalam rangkaian intervensi pada periode 30 Juli hingga 26 Agustus. Langkah tersebut dilakukan ketika yen melemah mendekati 164 yen per dolar Amerika Serikat, sehingga pemerintah berupaya menahan tekanan terhadap mata uangnya. Intervensi ini juga berlangsung dalam koordinasi dengan Amerika Serikat dan sejalan dengan langkah Korea Selatan yang turut berupaya menjaga kestabilan mata uang regional.
- Pada perdagangan 9 November 2026, won Korea Selatan menguat 0,41 persen, yen Jepang naik 0,15 persen, dan yuan China menguat tipis 0,01 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, rupiah melemah 0,08 persen menjadi Rp18.095 per dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif sejak akhir 2025, rupiah juga tercatat melemah 7,88 persen, menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terbesar dalam daftar tersebut. Perbedaan pergerakan mata uang ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar masih dirasakan oleh sejumlah negara Asia, meskipun tingkat pelemahannya berbeda-beda.
- Pada Senin, 9 November 2026, rupiah ditutup menguat 0,14 persen ke posisi Rp18.085 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat, penurunan harga minyak mentah Brent, serta meningkatnya minat investor terhadap surat utang domestik. Imbal hasil surat utang negara pada sebagian besar tenor mengalami penurunan karena adanya aksi beli di pasar obligasi. Meskipun demikian, penguatan rupiah masih perlu dijaga karena pergerakan mata uang regional dan kondisi ekonomi global tetap dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar.
- Keyakinan konsumen Indonesia membaik, tetapi peningkatan belanja masyarakat masih perlu didorong. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2026 meningkat menjadi 119,9 dari 118,1 pada September 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi perekonomian mulai membaik. Namun, kenaikan keyakinan konsumen belum sepenuhnya diikuti peningkatan pembelian barang tahan lama karena indeks pembelian barang tahan lama masih berada di angka 106,7. Selain itu, proporsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi justru mengalami penurunan, sehingga pemerintah masih perlu mendorong agar membaiknya keyakinan konsumen dapat tercermin dalam peningkatan belanja dan aktivitas ekonomi.
- Pemerintah melanjutkan stimulus untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Pemerintah menyampaikan rencana untuk mempertahankan konsumsi masyarakat melalui stimulus sekitar Rp31 triliun. Dukungan tersebut antara lain diarahkan pada keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini

diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah perubahan pola konsumsi rumah tangga. Upaya tersebut menjadi penting karena peningkatan tabungan dan penurunan porsi belanja masyarakat menunjukkan bahwa konsumen masih berhati-hati dalam menggunakan pendapatannya.

- Utang pemerintah Indonesia meningkat dan menimbulkan perhatian terhadap ruang fiskal. Posisi utang pemerintah pada kuartal III-2026 mencapai Rp10.326,93 triliun atau sekitar 40,30 persen terhadap produk domestik bruto. Meskipun masih berada di bawah batas 60 persen, besarnya utang perlu dilihat bersama kemampuan pemerintah dalam memperoleh penerimaan dan membayar kewajiban bunga. Pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp582,2 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi sekitar Rp650,3 triliun pada 2027. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 19 persen dari target pendapatan negara pada 2027, sehingga dapat mengurangi ruang anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan lainnya.
- Beban bunga utang berpotensi menekan defisit anggaran apabila penerimaan negara tidak meningkat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto, sementara pembayaran bunga utang direncanakan mencapai sekitar Rp650,3 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembayaran bunga hampir setara dengan keseluruhan target defisit anggaran. Risiko tekanan fiskal dapat meningkat apabila nilai tukar rupiah melemah, harga minyak tetap tinggi, dan biaya pembiayaan pemerintah terus naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi belanja, serta menjaga agar tambahan utang digunakan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi.
- Aksi beli surat utang domestik turut mendukung kestabilan rupiah. Pasar surat utang Indonesia pada 9 November 2026 mencatat peningkatan minat beli investor yang terlihat dari penurunan imbal hasil pada sebagian besar tenor. Penurunan tersebut terjadi pada surat utang berdenominasi rupiah maupun dolar Amerika Serikat, terutama pada tenor pendek dan menengah. Aksi beli tersebut membantu mempertahankan posisi rupiah di sekitar Rp18.108 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan siang hari. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik dapat memberikan dukungan terhadap nilai tukar, meskipun kondisi pasar tetap dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.
- Harga sejumlah bahan pangan nasional mengalami kenaikan. Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia pada 9 November 2026, beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, beras, dan gula pasir lokal tercatat mengalami kenaikan harga. Cabai rawit hijau menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan paling tinggi dibandingkan bahan pangan lainnya. Perubahan harga tersebut perlu diperhatikan karena bahan pangan merupakan kebutuhan utama rumah tangga dan kenaikannya dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat. Pemantauan harga secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan pasokan dan menjaga agar perubahan harga tidak semakin membebani daya beli.
- Masyarakat mengurangi porsi konsumsi dan meningkatkan alokasi pendapatan untuk tabungan. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, proporsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi pada Oktober 2026 turun menjadi 73,6 persen dari 74,9 persen pada September 2026. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disimpan sebagai tabungan meningkat menjadi 16,4 persen dari 15,4 persen. Sementara itu, proporsi pendapatan untuk membayar cicilan atau utang tercatat sebesar 10,1 persen. Perubahan ini terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai tingkat pendapatan cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya dan meningkatkan simpanan untuk menjaga kondisi keuangan rumah tangga.
- Ekspor Indonesia meningkat meskipun perdagangan global masih menghadapi tantangan. Nilai ekspor Indonesia selama Januari hingga September 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 10,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh penguatan industri dalam negeri dan pelaksanaan hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah produk nasional. Produk makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, minyak kelapa sawit mentah, serta mineral menjadi sejumlah komoditas yang mendukung kinerja ekspor. Pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, kualitas sumber daya manusia, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar agar produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar internasional.

- Perusahaan makanan ringan asal Kabupaten Pati tersebut memperluas distribusi produknya ke Australia dengan menambahkan Brisbane, Adelaide, dan Perth, sehingga kini menjangkau lima kota bersama Sydney dan Melbourne. Pada tahap awal perluasan pasar, perusahaan mengirimkan lima kontainer dengan sekitar 30 hingga 40 jenis produk, termasuk makanan berbahan kacang dan biskuit. Respons masyarakat Australia terhadap produk tersebut dinilai positif, sehingga perusahaan menargetkan peningkatan pengiriman menjadi sekitar 50 kontainer per tahun pada 2027. Perluasan ini juga didukung upaya pemerintah memperkuat kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, kualitas sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap kebutuhan konsumen di negara tujuan ekspor.
- Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2027–2047 sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pembangunan dan kebutuhan daerah. Revisi tersebut mempertimbangkan peningkatan investasi, perkembangan kawasan industri dan permukiman, kebutuhan pariwisata dan infrastruktur, serta perlindungan lahan sawah dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah mengarahkan penataan ruang untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung pembangunan infrastruktur berkualitas, pengelolaan pertanian berkelanjutan, dan keterpaduan kawasan perkotaan dengan perdesaan. Dengan perencanaan tersebut, Batang diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang produktif dan berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
- Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sehingga sektor pendukung perlu diperkuat. Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 34,05 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 13,58 persen, pertanian sebesar 12,17 persen, dan konstruksi sebesar 12,10 persen. Besarnya peran industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor manufaktur menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Sektor pertanian juga perlu dikembangkan melalui pengolahan hasil produksi dan peningkatan nilai tambah sehingga mampu mendukung kebutuhan industri sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
- Surakarta mencatat penurunan angka kemiskinan sekaligus memperkuat penanganan stunting melalui kerja sama lintas sektor. Angka kemiskinan Kota Surakarta turun dari 8,31 persen pada 2025 menjadi 7,31 persen pada 2026. Pemerintah kota menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengentasan kemiskinan, penanganan stunting juga dilakukan dengan melibatkan sektor kesehatan, lingkungan, dan sosial karena permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak. Pemerintah Kota Surakarta turut mengintegrasikan layanan Posyandu secara digital agar data perkembangan balita dapat dipantau dengan lebih akurat. Melalui pendataan dan kerja sama antarperangkat daerah, program penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
- Realisasi belanja daerah Kabupaten Blora mencapai Rp1,51 triliun hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 67,81 persen dari total anggaran sebesar Rp2,23 triliun. Belanja

operasi menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yaitu Rp1,28 triliun atau 72,03 persen dari anggarannya, sedangkan realisasi belanja modal baru mencapai Rp43,01 miliar atau 37,23 persen. Belanja tidak terduga juga masih rendah, yaitu sekitar Rp49,09 juta atau 2 persen dari anggaran. Secara keseluruhan, masih terdapat sekitar 32,19 persen anggaran belanja daerah yang belum terserap hingga 31 Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengoptimalan pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal, agar program pembangunan dan penyediaan fasilitas publik dapat berjalan sesuai rencana.

- Pemantauan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tegal dilakukan untuk menjaga ketersediaan informasi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal secara rutin memperbarui data harga bahan pokok melalui pemantauan di 25 pasar tradisional, dengan Pasar Trayeman sebagai salah satu acuan. Pada 9 November 2026, harga beras medium tercatat rata-rata Rp13.500 per kilogram dan beras premium Raja Lele Rp14.900 per kilogram, sedangkan kedelai rata-rata Rp11.300 per kilogram. Beberapa komoditas lain juga menunjukkan harga yang perlu diperhatikan, seperti cabai rawit merah dengan harga rata-rata Rp71.600 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.800 per kilogram, dan daging sapi bagian paha belakang maupun paha depan masing-masing Rp155.000 per kilogram. Selain harga, pemerintah daerah juga menyampaikan informasi kuota sejumlah bahan pokok, antara lain beras sebanyak 21.265 ton, gula pasir 175 ton, dan minyak goreng 170.929 liter. Informasi tersebut membantu masyarakat mengetahui perkembangan harga dan ketersediaan barang, sekaligus mendukung pemerintah dalam memantau kebutuhan pasar.

Implikasi

- Kenaikan inflasi produsen di China meningkatkan tekanan biaya bagi dunia usaha. Inflasi produsen yang mencapai 5,7 persen menunjukkan bahwa kenaikan harga energi, bahan bakar, dan logam semakin membebani biaya produksi industri. Kondisi ini dapat menekan keuntungan perusahaan, terutama ketika kenaikan biaya tersebut sulit diteruskan kepada konsumen akibat lemahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, rendahnya inflasi konsumen menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri China masih belum cukup kuat untuk mendukung kenaikan harga barang dan jasa, sehingga pemulihan ekonominya perlu didukung oleh peningkatan konsumsi serta kepercayaan masyarakat.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi Filipina menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi negara tersebut masih menghadapi tekanan. Pertumbuhan sebesar 2,1 persen pada kuartal III 2026 yang berada di bawah perkiraan pasar menggambarkan belum kuatnya momentum pemulihan ekonomi. Kondisi ini dapat memengaruhi aktivitas perdagangan, investasi, dan konsumsi apabila perlambatan terus berlangsung. Selain itu, pemerintah Filipina perlu memperhatikan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan agar kegiatan ekonomi dapat kembali meningkat pada kuartal berikutnya.
- Perpanjangan penangguhan tarif tambahan oleh China memberikan kepastian sementara bagi kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat. Penangguhan tarif tambahan sebesar 24 persen, sementara tarif 10 persen tetap berlaku, dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan perdagangan tanpa menghadapi kenaikan beban tarif dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk melanjutkan pembahasan kesepakatan perdagangan, termasuk rencana peningkatan impor produk pertanian Amerika Serikat oleh China. Namun, karena kesepakatan dagang belum sepenuhnya diselesaikan dan Amerika Serikat masih berpeluang mengubah kebijakan tarifnya, pelaku usaha tetap perlu mengantisipasi ketidakpastian hubungan perdagangan kedua negara.
- Penangguhan sejumlah pembatasan perdagangan dan pengendalian ekspor China dapat menjaga kelancaran rantai pasok internasional. Perpanjangan pengecualian pengendalian ekspor mineral penting, penangguhan pembatasan terhadap sejumlah perusahaan Amerika Serikat, serta penghentian sementara penyelidikan sektor pelayaran dan pembuatan kapal dapat

mengurangi hambatan perdagangan dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut juga memberikan ruang bagi perusahaan kedua negara untuk melanjutkan kegiatan usaha dan pengiriman barang. Meskipun demikian, keberlanjutan kelonggaran tersebut masih bergantung pada perkembangan hubungan politik dan perdagangan antara China dan Amerika Serikat.

- Kenaikan bunga deposito dolar Amerika Serikat di perbankan China menunjukkan upaya menjaga stabilitas nilai tukar yuan dan kepentingan eksportir. Dengan menawarkan bunga deposito dolar yang lebih tinggi, bank-bank China berusaha mempertahankan simpanan valuta asing agar eksportir tidak terburu-buru menukarkan pendapatan dolarnya ke yuan. Langkah ini menjadi penting karena penguatan yuan dapat membuat harga produk ekspor China menjadi relatif lebih mahal dan mengurangi daya saing perusahaan di pasar internasional. Apabila penguatan yuan terus berlangsung, eksportir yang memiliki keuntungan terbatas dapat menghadapi tekanan lebih besar, sehingga kebijakan perbankan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi dampaknya.
- Peningkatan ekspor Jerman memberikan sinyal positif bagi perdagangan luar negeri dan aktivitas ekonominya. Pertumbuhan ekspor sebesar 2 persen pada September 2026 menunjukkan adanya perbaikan setelah mengalami penurunan selama dua bulan sebelumnya. Kenaikan permintaan dari negara-negara Uni Eropa dapat membantu menjaga aktivitas produksi dan perdagangan perusahaan Jerman. Namun, peningkatan impor sebesar 4,2 persen juga menunjukkan bahwa kebutuhan barang dari luar negeri ikut meningkat, sehingga perkembangan perdagangan tersebut tetap perlu diperhatikan untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman secara keseluruhan.
- Keinginan China memperkuat hubungan dengan Iran menunjukkan pentingnya kerja sama diplomatik dalam menjaga stabilitas Timur Tengah. Upaya China mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dapat membantu menciptakan kondisi kawasan yang lebih stabil dan mengurangi risiko gangguan terhadap aktivitas perdagangan internasional. Stabilitas Timur Tengah juga penting bagi pasokan energi dunia karena kawasan tersebut memiliki peran besar dalam perdagangan minyak dan gas. Apabila ketegangan dapat dikurangi, risiko kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global berpeluang ikut menurun.
- Intervensi Jepang terhadap nilai tukar yen menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pelemahan mata uangnya. Pengeluaran dana dalam jumlah besar untuk membeli yen mencerminkan upaya otoritas Jepang menahan pelemahan mata uang yang dapat meningkatkan biaya impor, terutama energi dan bahan baku. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar dapat memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, intervensi tidak selalu mampu mengubah arah pergerakan mata uang secara berkelanjutan apabila faktor-faktor yang menekan yen, seperti perbedaan suku bunga dan kondisi pasar keuangan, masih berlangsung.
- Pergerakan mata uang negara-negara Asia menunjukkan bahwa tekanan pasar keuangan global masih belum merata. Penguatan won Korea Selatan, yen Jepang, dan yuan China, sementara rupiah mengalami pelemahan, menggambarkan perbedaan kondisi dan respons masing-masing negara terhadap perkembangan ekonomi global. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor Indonesia, terutama untuk kebutuhan bahan baku, energi, dan barang modal yang dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, perkembangan nilai tukar di kawasan perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas perekonomian Indonesia.
- Penguatan rupiah pada 9 November 2026 memberikan ruang positif bagi stabilitas perekonomian nasional. Rupiah yang ditutup menguat menjadi Rp18.085 per dolar Amerika Serikat didukung oleh pelemahan indeks dolar, penurunan harga minyak mentah Brent, serta meningkatnya pembelian surat utang negara. Kondisi ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap biaya impor dan menjaga kepercayaan pelaku pasar keuangan. Namun, penguatan

tersebut tetap perlu dijaga karena pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, dan perkembangan geopolitik internasional.

- Peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi mulai membaik. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2026 meningkat menjadi 119,9 dari 118,1 pada September 2026, yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan pada masa mendatang semakin positif. Kondisi ini dapat mendukung kegiatan konsumsi dan perdagangan dalam negeri. Meskipun demikian, indeks pembelian barang tahan lama yang relatif tidak berubah menunjukkan bahwa peningkatan keyakinan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kenaikan minat masyarakat untuk membeli barang bernilai besar.
- Penyaluran stimulus pemerintah sekitar Rp31 triliun berperan dalam menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Penyaluran stimulus juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan program tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan ketepatan sasaran, ketersediaan barang, dan pengelolaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta tidak menimbulkan pemborosan belanja negara.
- Peningkatan jumlah utang pemerintah dan beban pembayaran bunga dapat mempersempit ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Posisi utang pemerintah pada kuartal III 2026 yang mencapai Rp10.326,93 triliun atau 40,30 persen terhadap produk domestik bruto menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan negara. Beban bunga yang diperkirakan mencapai Rp582,2 triliun pada 2026 dan Rp650,3 triliun pada 2027 juga dapat mengurangi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki pengelolaan utang, dan mengutamakan belanja produktif agar pembayaran kewajiban tidak terlalu membebani anggaran.
- Besarnya beban bunga utang yang hampir menyamai target defisit anggaran 2027 menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan negara secara lebih hati-hati. Beban bunga yang diperkirakan mencapai Rp650,3 triliun, sementara target defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun, memperlihatkan bahwa sebagian besar ruang anggaran telah menghadapi tekanan dari kewajiban pembayaran bunga. Kondisi tersebut dapat semakin berat apabila rupiah melemah, harga minyak meningkat, atau biaya pinjaman pemerintah menjadi lebih mahal. Dengan demikian, penguatan penerimaan pajak, efisiensi belanja, dan pengendalian pembiayaan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara.
- Pembelian surat utang negara oleh investor membantu mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Meningkatnya minat investor terhadap surat utang negara mendorong penurunan imbal hasil obligasi pada sebagian besar tenor, sehingga dapat membantu menjaga kepercayaan terhadap instrumen keuangan domestik. Kondisi tersebut juga memberikan dukungan terhadap rupiah karena menunjukkan adanya permintaan terhadap aset keuangan Indonesia. Namun, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga stabilitas ekonomi agar minat investor tidak mudah berubah akibat tekanan eksternal.
- Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat meningkatkan tekanan pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga bawang merah, bawang putih, beras, gula pasir lokal, dan cabai rawit dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Dampaknya dapat lebih terasa bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, pengawasan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pasokan perlu diperhatikan agar kenaikan harga tidak semakin membebani daya beli masyarakat.

- Penurunan porsi pendapatan untuk konsumsi dan peningkatan tabungan menunjukkan perubahan pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi turun dari 74,9 persen pada September menjadi 73,6 persen pada Oktober 2026, sedangkan porsi tabungan meningkat dari 15,4 persen menjadi 16,4 persen. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyisihkan bagian pendapatan yang lebih besar untuk tabungan dibandingkan bulan sebelumnya. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat menghadapi tekanan, meskipun peningkatan tabungan juga dapat membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan keuangan pada masa mendatang.
- Pertumbuhan ekspor Indonesia dan surplus perdagangan menunjukkan bahwa produk dalam negeri masih memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. Nilai ekspor Januari–September 2026 tumbuh 5,58 persen dan neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$10,6 miliar, didukung oleh produk manufaktur, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, minyak kelapa sawit mentah, serta mineral. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan industri dan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk nasional. Untuk mempertahankan perkembangan ini, pemerintah perlu memperkuat kapasitas produksi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar negara tujuan ekspor.
- Prioritas pemenuhan bahan baku dari dalam negeri dapat memperkuat keterkaitan antara industri nasional dan sektor produksi domestik. Ketersediaan bahan baku lokal yang diutamakan untuk kebutuhan industri dalam negeri dapat membantu menjaga keberlangsungan proses produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Apabila produksi bahan baku dalam negeri telah mencukupi kebutuhan industri, kelebihannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor. Sementara itu, bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri tetap perlu dipenuhi melalui impor agar aktivitas industri tidak terhambat.
- Perluasan ekspor produk makanan ringan PT Dua Kelinci dari Pati ke lima kota di Australia membuka peluang peningkatan perdagangan dan pertumbuhan industri daerah. Penambahan tujuan distribusi ke Brisbane, Adelaide, dan Perth, selain Sydney dan Melbourne, menunjukkan semakin luasnya penerimaan produk makanan Indonesia di pasar luar negeri. Pengiriman awal sebanyak lima kontainer dan target pengiriman sekitar 50 kontainer per tahun pada 2027 dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, kebutuhan tenaga kerja, serta aktivitas usaha yang berkaitan dengan industri makanan. Perkembangan ini juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar ekspor.
- Keberhasilan produk PT Dua Kelinci memasuki pasar Australia menunjukkan pentingnya penguatan kualitas produksi dan strategi pemasaran. Produk yang telah mencapai sekitar 30–40 jenis dan memperoleh respons positif dari konsumen Australia memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pemerataan distribusi serta memperkuat posisi produknya dibandingkan produk dari negara lain. Penyeragaman harga di berbagai wilayah Australia juga dapat membantu menciptakan pasar yang lebih teratur. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kualitas, ketersediaan produk, dan efisiensi distribusi agar perluasan pasar dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- Penguatan ekonomi Batang melalui industri, pertanian, dan pariwisata membutuhkan perencanaan tata ruang yang terarah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 2027–2047 menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan perkembangan investasi, kawasan industri, permukiman, pariwisata, dan infrastruktur. Perencanaan tersebut dapat membantu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mengurangi potensi konflik penggunaan lahan. Selain itu, perlindungan lahan sawah dan kelestarian lingkungan perlu tetap diperhatikan agar pertumbuhan kawasan industri tidak mengurangi keberlanjutan sektor pertanian.

- Keterpaduan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang. Pengembangan industri yang didukung sektor pertanian dan pariwisata berpeluang menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara wilayah produksi, pusat perdagangan, dan kawasan permukiman. Infrastruktur yang berkualitas juga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendukung kegiatan usaha masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya terpusat pada kawasan industri, tetapi juga mampu meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat perdesaan.
- Besarnya kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,83 persen pada kuartal III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen, memperlihatkan kinerja ekonomi daerah yang cukup kuat. Namun, kontribusi industri pengolahan sebesar 34,05 persen perlu diimbangi dengan penguatan sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada satu sektor. Keterkaitan antarsektor juga penting agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
- Penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sektor pertanian yang berkontribusi 12,17 persen terhadap perekonomian daerah perlu didorong agar tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan petani maupun pelaku usaha kecil. Dengan demikian, pertumbuhan industri dapat berjalan bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Tengah.
- Penurunan angka kemiskinan di Kota Surakarta menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan yang turun dari 8,31 persen pada 2025 menjadi 7,31 persen pada 2026 menunjukkan bahwa berbagai program penanganan kemiskinan mulai memberikan hasil. Namun, capaian tersebut tetap perlu dijaga melalui kerja sama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali menghadapi kesulitan ekonomi. Program peningkatan kesejahteraan juga perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
- Penanganan stunting di Surakarta membutuhkan kerja sama lintas sektor karena permasalahannya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Keterlibatan sektor lingkungan dan sosial menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal, lingkungan, serta keadaan sosial keluarga juga perlu diperhatikan dalam upaya mencegah stunting. Pengintegrasian layanan Posyandu secara digital dapat membantu pemerintah memperoleh data perkembangan balita secara lebih akurat dan memantau kondisi setiap wilayah. Dengan data yang lebih baik, program penanganan dapat diarahkan kepada keluarga dan anak yang benar-benar membutuhkan sehingga upaya pencegahan stunting menjadi lebih tepat sasaran.
- Realisasi belanja daerah Kabupaten Blora yang mencapai 67,81 persen hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan masih terdapat anggaran yang perlu segera dioptimalkan. Dari total anggaran Rp2,23 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp1,51 triliun, sehingga sekitar 32,19 persen anggaran belum terserap. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena keterlambatan belanja dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketepatan penggunaan dana dan kualitas hasil kegiatan.
- Rendahnya realisasi belanja modal Blora dapat memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah. Belanja modal baru terealisasi sebesar 37,23 persen dari anggaran Rp115,50 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja operasi yang mencapai

72,03 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan aset, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi masih perlu dipercepat. Apabila belanja modal tidak segera dioptimalkan, manfaat pembangunan infrastruktur bagi pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah dapat tertunda.

- Pemantauan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tegal penting untuk menjaga keterjangkauan barang bagi masyarakat. Data harga dari 25 pasar tradisional dengan Pasar Trayeman sebagai acuan dapat membantu pemerintah daerah mengetahui perkembangan harga beras, kedelai, cabai, dan komoditas lainnya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengenali komoditas yang mengalami kenaikan harga serta menentukan langkah pengendalian yang diperlukan. Dengan pemantauan rutin, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan harga dan menjaga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat dijangkau masyarakat.
- Perbedaan harga antarkomoditas di Kabupaten Tegal menunjukkan perlunya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan. Harga beras medium yang tercatat rata-rata Rp13.500 per kilogram, beras premium Raja Lele Rp14.900 per kilogram, serta cabai rawit merah yang mencapai rata-rata Rp71.600 per kilogram menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi tingkat pengeluaran yang berbeda untuk setiap kebutuhan. Ketersediaan pasokan yang memadai dan distribusi yang lancar diperlukan agar harga tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi. Selain itu, data harga dari berbagai pasar dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengawasan dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Berita Selasa, 10 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada 10 November 2026 menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih diwarnai oleh perubahan perdagangan, tekanan inflasi, serta ketidakpastian kebijakan moneter. Salah satu perkembangan penting terlihat dari Tiongkok yang mencatat surplus perdagangan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat sepanjang 2026. Peningkatan tersebut didukung oleh kenaikan ekspor berbagai produk, terutama perangkat keras kecerdasan buatan, cip, komputer, panel surya, kendaraan listrik, baterai, dan robot industri. Di sisi lain, impor Tiongkok juga mengalami peningkatan, termasuk impor minyak, yang menunjukkan bahwa aktivitas industri dan kebutuhan energi negara tersebut masih cukup besar. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya posisi Tiongkok dalam perdagangan global, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa perubahan aktivitas ekonominya dapat memengaruhi hubungan perdagangan dan permintaan komoditas di berbagai negara.

Kuatnya aktivitas perdagangan Tiongkok tersebut berlangsung ketika perekonomian Amerika Serikat masih menghadapi tekanan inflasi yang memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral. Kenaikan indeks harga konsumen Amerika Serikat pada Oktober 2026 sebesar 0,4 persen secara bulanan dan inflasi inti sebesar 0,3 persen menunjukkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut membuat inflasi masih berada di atas sasaran bank sentral sebesar 2 persen, dengan kenaikan harga energi dan kebijakan tarif menjadi beberapa faktor yang turut memengaruhinya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sejumlah pejabat Federal Reserve menilai bahwa kenaikan suku bunga secara bertahap masih diperlukan untuk menjaga kestabilan harga. Bahkan, terdapat pandangan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember dapat dipertimbangkan, dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar apabila tekanan inflasi inti tetap tinggi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bank sentral Amerika Serikat masih berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneter karena harus menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat juga memengaruhi keputusan investasi di pasar keuangan internasional, termasuk perilaku investor Jepang. Pada Oktober 2026, investor Jepang kembali membeli obligasi luar negeri dengan nilai bersih sebesar 493,9 miliar yen setelah sebelumnya mengalami penjualan bersih selama tiga bulan berturut-turut. Pembelian tersebut menunjukkan adanya perubahan strategi investasi di tengah pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan kekhawatiran terhadap tingginya valuasi saham perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Meskipun demikian, secara keseluruhan investor Jepang masih mencatat penjualan bersih obligasi luar negeri sepanjang tahun berjalan. Perubahan arus investasi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan investor global sangat dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga, tingkat keuntungan investasi, dan risiko pasar. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara berkembang perlu memperhatikan perubahan arus modal internasional karena dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik.

Selain perkembangan perdagangan dan pasar keuangan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara juga menjadi perhatian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebutuhan investasi infrastruktur kawasan hingga 2040 diperkirakan mencapai sekitar 7,1 triliun dolar Amerika Serikat, sedangkan kemampuan belanja pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 45 persen dari kebutuhan tersebut. Artinya, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang mendekati 4 triliun dolar Amerika Serikat dan membutuhkan dukungan sumber pendanaan lain, terutama dari sektor swasta. Investasi tersebut diperlukan untuk memperkuat penyediaan listrik, transportasi, jalan, bandara, jalur kereta api, dan fasilitas kesehatan agar kegiatan ekonomi antarwilayah dapat berjalan lebih efisien. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebutuhan tersebut juga relevan bagi Indonesia karena ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat memperkuat daya saing industri, memperlancar distribusi barang, dan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai perkembangan internasional tersebut kemudian menjadi latar belakang penting bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan domestik. Pada 10 November 2026, nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,19 persen menjadi Rp18.051 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh penurunan harga minyak mentah Brent dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang memberikan ruang bagi perbaikan nilai tukar. Namun, pergerakan rupiah masih menghadapi tekanan dari sejumlah faktor dalam negeri, seperti ketidakpastian politik, perlambatan penjualan ritel, dan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi. Isu politik terkait kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran serta persoalan dokumen kesetaraan pendidikan turut menjadi perhatian pasar, meskipun pemerintah menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi dan sentimen pasar saham masih terjaga. Dengan demikian, stabilitas rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, tetapi juga bergantung pada kepastian kebijakan dan kondisi politik dalam negeri.

Dalam upaya memperkuat pembiayaan negara dan menjaga kepercayaan investor, pemerintah Indonesia juga menargetkan penerbitan obligasi berdenominasi yuan atau Panda Bonds sebesar 12 miliar yuan, yang setara dengan sekitar Rp32,5 triliun. Penerbitan tersebut direncanakan dalam beberapa pilihan jangka waktu, yaitu tiga, lima, dan tujuh tahun, dengan proses penentuan harga dimulai pada 10 November dan penyelesaian pada 17 November 2026. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dengan memanfaatkan pasar keuangan internasional, sehingga pendanaan negara tidak hanya bergantung pada satu jenis instrumen atau pasar. Namun, keberhasilan penerbitan obligasi tersebut tetap berkaitan dengan penilaian lembaga pemeringkat dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Selain itu, perhatian Morgan Stanley Capital International terhadap transparansi dan tata kelola pasar saham Indonesia juga perlu diperhatikan karena persoalan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investor asing. Apabila kepercayaan pasar menurun, arus modal keluar dapat meningkat dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun imbal hasil obligasi pemerintah.

Di tengah kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan investor, proses Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi juga menjadi salah satu agenda penting dalam meningkatkan kualitas perekonomian nasional. Keanggotaan tersebut berpotensi memperkuat kredibilitas Indonesia, memperluas akses pasar, serta mendorong perbaikan standar regulasi dan tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, manfaat tersebut perlu didukung oleh pelaksanaan reformasi yang nyata dan konsisten, termasuk dalam kebijakan perdagangan, hilirisasi, pembatasan ekspor, serta penggunaan komponen lokal. Pada saat yang sama, kondisi perekonomian domestik juga perlu diperhatikan karena peningkatan keyakinan konsumen belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan daya beli masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2026 meningkat menjadi 119,9, sementara indeks aktivitas manufaktur berada pada angka 54. Namun, pertumbuhan penjualan ritel masih terbatas sebesar 1,4 persen secara tahunan dan penjualan tercatat menurun dibandingkan Juni. Kenaikan harga pangan yang berada di atas 5 persen serta risiko cuaca El Niño juga dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kepercayaan pasar perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tantangan perekonomian nasional selanjutnya terlihat dari kondisi ketenagakerjaan, khususnya tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia muda. Pada Agustus 2026, tingkat pengangguran penduduk berusia 15 hingga 24 tahun mencapai 17,50 persen, meningkat dibandingkan 16,89 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun tingkat pengangguran nasional menurun menjadi 4,75 persen, jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan masih mencapai sekitar 7,38 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 155,37 juta orang. Tingginya pengangguran usia muda menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki para pencari kerja. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, program magang, dan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha perlu diperkuat agar kemampuan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja. Upaya tersebut menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam peningkatan angka produksi, tetapi juga memberikan manfaat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian nasional tersebut juga tercermin dalam perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan pertumbuhan cukup kuat. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,75 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 34,05 persen terhadap produk domestik regional bruto dan tumbuh sebesar 6,73 persen. Kinerja industri juga didukung oleh peningkatan ekspor barang hasil industri sebesar 19,21 persen, sedangkan sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,29 persen. Selain itu, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXXI di Semarang turut mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan jumlah pengunjung, aktivitas perdagangan, dan keterlibatan sekitar 150 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampaknya juga terlihat pada sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 14,06 persen, disertai peningkatan tingkat hunian hotel dan jumlah penumpang kereta api. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi pada triwulan tersebut masih melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga upaya menjaga keberlanjutan investasi tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada konsumsi dan kegiatan tertentu.

Selain pertumbuhan industri dan kegiatan perdagangan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan pentingnya pengelolaan penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Batang, penerimaan retribusi tenaga kerja asing mencapai Rp3,89 miliar atau sekitar 155 persen dari target. Namun, perubahan status kawasan industri Batang menuju kawasan ekonomi khusus menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam administrasi, pencatatan, dan mekanisme

penerimaan kompensasi, sehingga penyelarasan data antarlembaga perlu dilakukan agar pengelolaannya lebih tertib. Sementara itu, Kabupaten Kudus mencatat penurunan tingkat kemiskinan dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen dan peningkatan indeks pembangunan manusia dari 77,94 menjadi 78,61. Perbaikan tersebut didukung oleh kerja sama pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai program masyarakat, termasuk bantuan sosial, kegiatan olahraga, dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Di sisi lain, perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Gede Solo menunjukkan kenaikan pada sejumlah komoditas, terutama daging ayam dan cabai, meskipun harga bawang merah, telur, beras, dan beberapa bahan pangan lainnya masih relatif terkendali. Pemerintah perlu terus menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah menurunnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah dari 67 persen pada akhir 2025 menjadi 57 persen pada Oktober 2026. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan keringanan pajak, peningkatan pelayanan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperbaiki penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, berbagai berita tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi internasional, nasional, dan Jawa Tengah saling berkaitan serta memberikan pengaruh terhadap arah pembangunan ekonomi. Tekanan inflasi dan perubahan kebijakan suku bunga di negara maju dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan kepercayaan investor di Indonesia. Sementara itu, kondisi domestik seperti ketidakpastian politik, daya beli masyarakat, kesempatan kerja, serta tata kelola pasar keuangan turut menentukan kemampuan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tersebut kemudian terlihat hingga tingkat daerah, termasuk di Jawa Tengah, yang masih memiliki peluang pertumbuhan melalui industri pengolahan, perdagangan, investasi, pariwisata, dan kegiatan masyarakat. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan kepatuhan pajak, pengelolaan penerimaan daerah, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui kebijakan yang stabil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dunia usaha, dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, termasuk di Jawa Tengah.

Ringkasan

- Tiongkok mencatat surplus perdagangan sebesar 1,04 triliun dolar Amerika Serikat dalam sepuluh bulan pertama 2026, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap produk teknologi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan. Ekspor pada Oktober tumbuh 35,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan penjualan cip, komputer, panel surya, kendaraan listrik, baterai, dan robot industri. Namun, tingginya ketergantungan terhadap pasar luar negeri terjadi ketika konsumsi domestik masih lemah akibat tekanan sektor properti, sehingga Tiongkok tetap menghadapi risiko perlambatan permintaan global dan meningkatnya ketegangan perdagangan dengan negara mitra, khususnya Uni Eropa.
- Kenaikan ekspor Tiongkok diikuti peningkatan impor minyak mentah. Selain mengalami pertumbuhan ekspor, Tiongkok juga mencatat kenaikan impor, termasuk impor minyak mentah yang mencapai hampir 42 juta ton pada Oktober dan menjadi jumlah tertinggi sejak Maret. Peningkatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengisian kembali persediaan minyak dan meningkatnya aktivitas industri, sementara nilai impor minyak juga terdorong oleh kenaikan harga komoditas energi. Meskipun permintaan produk teknologi diperkirakan masih mendukung ekspor Tiongkok hingga 2027, ketergantungan terhadap perkembangan investasi

kecerdasan buatan perlu diperhatikan karena perlambatan pembangunan pusat data dapat memengaruhi permintaan produk teknologi pada periode berikutnya.

- Tekanan inflasi Amerika Serikat meningkatkan peluang kenaikan suku bunga. Indeks harga konsumen Amerika Serikat pada Oktober 2026 meningkat 0,4 persen secara bulanan, lebih tinggi daripada perkiraan ekonom sebesar 0,3 persen, sedangkan inflasi inti naik 0,3 persen. Tekanan harga tersebut masih berada di atas sasaran Federal Reserve sebesar 2 persen dan dipengaruhi oleh kenaikan harga energi serta biaya impor akibat kebijakan tarif. Kondisi ini memperkuat perkiraan bahwa bank sentral Amerika Serikat akan kembali menaikkan suku bunga pada Desember sebesar 25 basis poin, sehingga perkembangan inflasi tetap menjadi perhatian utama pasar keuangan internasional
- Pejabat Federal Reserve mendorong kebijakan suku bunga yang lebih ketat. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyampaikan dukungan terhadap kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember 2026, bahkan meminta agar kenaikan sebesar 50 basis poin dipertimbangkan apabila tekanan inflasi semakin memburuk. Ia menilai bahwa inflasi pengeluaran konsumsi pribadi dan inflasi inti masih berada di atas target, sementara kenaikan harga energi berpotensi memberikan tekanan yang lebih lama terhadap harga barang dan jasa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Federal Reserve masih memprioritaskan pengendalian inflasi, meskipun keputusan kenaikan suku bunga tetap perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan
- Investor Jepang kembali membeli obligasi asing setelah beberapa bulan melakukan penjualan. Pada Oktober 2026, investor Jepang mencatat pembelian bersih obligasi asing sebesar 493,9 miliar yen setelah tiga bulan berturut-turut menjadi penjual bersih. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan meningkatnya kekhawatiran terhadap tingginya valuasi saham perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Investor Jepang juga meningkatkan pembelian saham asing sebesar 1,46 triliun yen, meskipun secara kumulatif masih mencatat penjualan bersih obligasi asing sebesar 4,16 triliun yen sepanjang 2026. Perbedaan arah investasi pada berbagai negara menunjukkan bahwa investor semakin memperhatikan tingkat keuntungan, prospek ekonomi, dan risiko sebelum menentukan pilihan aset
- ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur besar hingga 2040. Asian Development Bank memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara ASEAN mencapai 7,1 triliun dolar Amerika Serikat hingga 2040, sedangkan kemampuan pembiayaan pemerintah diperkirakan hanya dapat memenuhi sekitar 45 persen dari kebutuhan tersebut. Kesenjangan pendanaan yang besar membuat kawasan ini membutuhkan keterlibatan sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. Investasi diperlukan untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik, jalan, transportasi, bandara, jalur kereta api, dan fasilitas kesehatan agar konektivitas serta kegiatan ekonomi antarnegara dapat meningkat
- Dinamika politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sentimen ekonomi Indonesia. Persoalan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran dan munculnya pernyataan mengenai niat pengunduran diri menjadi perhatian publik serta pasar. Dalam perkembangan tersebut, Gibran disebut akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Ketidakpastian politik ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas pemerintahan, meskipun pemerintah menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi dan pasar keuangan tetap menjadi perhatian untuk dijaga
- Rupiah menguat di tengah dukungan kondisi eksternal dan tekanan dari dalam negeri. Pada perdagangan 10 November 2026, rupiah menguat 0,19 persen dan ditutup pada posisi Rp18.051 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh penurunan harga minyak mentah Brent, stabilnya indeks dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya minat investor terhadap surat utang domestik yang turut menekan imbal hasil obligasi pemerintah. Namun, pergerakan

rupiah masih menghadapi risiko dari ketidakpastian politik dan perlambatan penjualan ritel yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun

- Pemerintah menerbitkan Panda Bonds untuk memperluas sumber pembiayaan negara. Pemerintah Indonesia menawarkan obligasi berdenominasi yuan atau Panda Bonds dengan target penghimpunan dana mencapai 12 miliar yuan atau sekitar Rp32,5 triliun. Obligasi tersebut ditawarkan dalam tiga pilihan jangka waktu, yaitu tiga, lima, dan tujuh tahun, dengan proses pembentukan harga dimulai pada 10 November 2026 dan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 17 November 2026. Penerbitan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pendanaan melalui pasar keuangan Tiongkok, sekaligus memanfaatkan kepercayaan investor dan peringkat kredit Indonesia untuk memperoleh pembiayaan.
- Transparansi pasar modal menjadi perhatian dalam menjaga kepercayaan investor. Morgan Stanley Capital International memberikan perhatian terhadap persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, bahkan muncul risiko penurunan status Indonesia dari pasar berkembang apabila perbaikan yang diperlukan tidak dilakukan. Kondisi tersebut dapat memicu kekhawatiran mengenai keluarnya dana investor asing, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan imbal hasil obligasi domestik. Oleh karena itu, perbaikan keterbukaan informasi, kualitas tata kelola, dan perlindungan investor menjadi hal penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia
- Keanggotaan Indonesia dalam OECD berpotensi memperkuat kredibilitas ekonomi, tetapi membutuhkan reformasi. Proses bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan investor, perbaikan standar regulasi, serta perluasan akses pasar internasional. Pemerintah menyebut kesesuaian regulasi Indonesia dengan standar organisasi tersebut telah mencapai sekitar 80 persen dan menargetkan keanggotaan penuh pada 2028. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perbaikan tata kelola secara konsisten, termasuk dalam bidang persaingan usaha, statistik, serta pemberantasan penyuapan, tanpa mengabaikan kebutuhan Indonesia dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional
- Keyakinan konsumen meningkat, tetapi daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2026 mencapai 119,9, meningkat dibandingkan September sebesar 118,1 dan menjadi angka tertinggi dalam lima bulan terakhir. Meskipun menunjukkan optimisme masyarakat, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan belanja karena penjualan ritel hanya tumbuh 1,4 persen secara tahunan pada September dan menurun dibandingkan Juni. Pertumbuhan kredit konsumsi juga masih terbatas, sementara harga pangan yang meningkat lebih dari 5 persen serta risiko El Niño dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga. Oleh sebab itu, pengendalian harga pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja diperlukan agar optimisme konsumen dapat benar-benar mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi
- Pengangguran kelompok usia muda meningkat meskipun pengangguran nasional menurun. Tingkat pengangguran terbuka penduduk berusia 15–24 tahun mencapai 17,50 persen pada Agustus 2026, meningkat dibandingkan 16,89 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berbeda dengan tingkat pengangguran nasional yang turun menjadi 4,75 persen, tetapi masih terdapat sekitar 7,38 juta orang yang belum memperoleh pekerjaan. Tingginya pengangguran usia muda menunjukkan adanya tantangan dalam kesesuaian keterampilan, pengalaman kerja, dan kebutuhan dunia usaha. Karena itu, peningkatan pelatihan vokasi, program magang, penyediaan informasi pasar kerja, serta perluasan kesempatan kerja bagi lulusan baru diperlukan agar bonus demografi dapat memberikan manfaat bagi perekonomian
- Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Gede Solo mengalami kenaikan. Menteri Perdagangan Budi Santosa melakukan peninjauan langsung terhadap harga kebutuhan pokok di Pasar Gede, Solo, dan menemukan kenaikan pada beberapa komoditas, terutama daging ayam serta cabai.

Harga daging ayam naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meningkat dari Rp42.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah besar juga naik dari Rp23.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan cabai rawit hijau dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan telur masih berada di bawah harga acuan, sedangkan beras dan beberapa bahan pokok lainnya relatif normal. Pemerintah perlu menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat

- Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor turun dari 67 persen pada akhir 2025 menjadi 57 persen pada Oktober 2026, bahkan sempat mencapai titik terendah sebesar 54 persen pada April. Kondisi tersebut turut memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hingga September mencapai sekitar Rp2,5 triliun atau 57 persen dari target Rp4,2 triliun. Penurunan kepatuhan diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan sehingga kemampuan membayar pajak menjadi terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan berbagai keringanan, penghapusan denda, dan insentif pembayaran, tetapi tetap diperlukan peningkatan pelayanan serta koordinasi antarlembaga agar kepatuhan masyarakat dan penerimaan daerah dapat kembali meningkat
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan II sebesar 5,75 persen dan lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh industri pengolahan dan perdagangan, dengan industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,05 persen terhadap perekonomian daerah dan tumbuh 6,73 persen. Peningkatan ekspor barang industri sebesar 19,21 persen turut memperkuat kinerja sektor tersebut, sedangkan sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan industri dan perdagangan masih menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Tengah
- Investasi dan kegiatan konsumsi turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada triwulan III 2026, investasi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,43 persen secara tahunan, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,84 persen. Di sisi lain, realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri meningkat sebesar 16,78 persen, terutama pada industri karet dan plastik, industri tekstil, serta sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi salah satu penopang perekonomian daerah karena memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto. Dengan demikian, keberlanjutan investasi dan terjaganya daya beli masyarakat menjadi faktor penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
- Penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI memberikan dampak terhadap sektor akomodasi dan transportasi. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXXI di Semarang turut meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kedatangan peserta dan pengunjung serta keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak kegiatan tersebut terlihat dari pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,06 persen pada triwulan III 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,70 persen. Tingkat hunian kamar hotel meningkat sebesar 4,25 persen dan jumlah penumpang kereta api bertambah sebesar 9,23 persen. Peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan transportasi daerah
- Penerimaan retribusi tenaga kerja asing di Kabupaten Batang melampaui target. Sepanjang 2026, penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Batang mencapai Rp3,89 miliar atau sekitar 155 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah dari aktivitas industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun, perubahan status kawasan industri Batang menjadi kawasan

ekonomi khusus menimbulkan penyesuaian dalam administrasi, pencatatan, dan mekanisme penerimaan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data agar pengelolaan penerimaan tetap berjalan tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Kemiskinan di Kabupaten Kudus menurun dan kualitas pembangunan manusia meningkat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus turun dari 6,59 persen pada 2025 menjadi 6,41 persen pada 2026, sedangkan indeks pembangunan manusia meningkat dari 77,94 menjadi 78,61. Perbaikan tersebut didukung oleh kerja sama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai program pembangunan, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang terus dievaluasi. Kegiatan olahraga berskala nasional dan internasional juga dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima turut membantu perputaran ekonomi daerah, sehingga pemerintah perlu mengatur aktivitas perdagangan tersebut agar tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan ketertiban dan tata kota.

Implikasi

- Meningkatnya surplus perdagangan Tiongkok memperkuat persaingan perdagangan dunia. Tingginya ekspor produk teknologi menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki posisi kuat di pasar internasional. Kondisi ini dapat meningkatkan persaingan dengan negara lain yang menghasilkan produk sejenis. Oleh karena itu, negara lain perlu meningkatkan kualitas produk dan daya saing industrinya agar mampu bersaing di pasar global.
- Peningkatan ekspor produk teknologi Tiongkok membuka peluang bagi negara lain. Permintaan terhadap cip, komputer, kendaraan listrik, dan baterai dapat mendorong perdagangan produk teknologi. Negara yang mampu menyediakan bahan baku dan komponen pendukung berpeluang meningkatkan ekspornya. Namun, negara yang industrinya belum kuat juga perlu menghadapi persaingan dari produk Tiongkok.
- Inflasi Amerika Serikat dapat memengaruhi kondisi ekonomi dunia. Kenaikan harga konsumen menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Amerika Serikat masih cukup tinggi. Kondisi ini dapat mendorong Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk mengendalikan harga. Akibatnya, investor dapat lebih tertarik menempatkan dananya di Amerika Serikat sehingga negara berkembang berisiko mengalami tekanan arus modal.
- Kenaikan suku bunga Federal Reserve dapat meningkatkan biaya pinjaman. Kebijakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menekan inflasi yang belum terkendali. Namun, kebijakan tersebut dapat membuat biaya pinjaman bagi perusahaan dan masyarakat menjadi lebih mahal. Akibatnya, kegiatan investasi dan pengembangan usaha dapat berjalan lebih lambat karena pelaku usaha perlu mempertimbangkan biaya pembiayaan.
- Perubahan investasi investor Jepang menunjukkan bahwa pasar keuangan dunia masih penuh ketidakpastian. Pembelian kembali obligasi asing oleh investor Jepang menunjukkan adanya perubahan pilihan investasi. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh perubahan imbal hasil obligasi dan kekhawatiran terhadap nilai saham perusahaan teknologi. Kondisi ini dapat memengaruhi pergerakan modal antarnegara, sehingga negara berkembang perlu menjaga stabilitas ekonomi agar tetap menarik bagi investor.
- Kebutuhan infrastruktur ASEAN membuka peluang investasi yang besar. Kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga 2040 masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta melalui kerja sama dengan pemerintah perlu ditingkatkan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang untuk menarik investasi dalam pembangunan jalan, transportasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya.
- Ketidakpastian politik dapat memengaruhi kepercayaan investor. Persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran menjadi perhatian publik dan pasar. Jika ketidakpastian politik terus berlangsung, investor dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Karena

itu, pemerintah perlu menjaga kepastian hukum dan memberikan informasi yang jelas agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

- Penguatan rupiah perlu didukung oleh kondisi ekonomi dalam negeri. Rupiah menguat menjadi Rp18.051 per dolar Amerika Serikat pada 10 November 2026. Penguatan ini didukung oleh penurunan harga minyak dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Namun, ketidakpastian politik dan perlambatan penjualan ritel masih menjadi tekanan. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi agar nilai tukar rupiah tidak mudah bergejolak.
- Penerbitan Panda Bonds dapat memperluas sumber pembiayaan pemerintah. Pemerintah menargetkan penerbitan obligasi sebesar 12 miliar yuan atau sekitar Rp32,5 triliun. Langkah ini dapat membantu pemerintah memperoleh dana dari pasar keuangan Tiongkok. Namun, penggunaan pembiayaan dalam mata uang asing tetap perlu dikelola dengan baik agar tidak menambah risiko akibat perubahan nilai tukar.
- Perbaikan pasar modal diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing. Perhatian Morgan Stanley Capital International terhadap transparansi dan tata kelola pasar modal menunjukkan masih adanya hal yang perlu diperbaiki. Jika persoalan tersebut tidak ditangani, investor asing dapat menarik dananya dari Indonesia. Kondisi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan pasar modal perlu diperkuat.
- Keanggotaan OECD dapat meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Proses bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dapat mendorong perbaikan aturan dan tata kelola pemerintahan. Hal ini berpeluang meningkatkan kepercayaan investor serta memperluas akses pasar internasional. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan reformasi secara konsisten dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- Meningkatnya keyakinan konsumen perlu diikuti dengan perbaikan daya beli. Indeks Keyakinan Konsumen yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan positif terhadap kondisi ekonomi. Namun, pertumbuhan penjualan ritel yang terbatas menunjukkan bahwa kemampuan belanja masyarakat belum sepenuhnya pulih. Pemerintah perlu menjaga harga kebutuhan pokok dan mendorong peningkatan pendapatan agar konsumsi masyarakat dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Kenaikan harga pangan dapat menambah beban pengeluaran masyarakat. Harga pangan yang meningkat lebih dari 5 persen dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Risiko El Niño juga dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan pangan dan memperlancar distribusi agar harga tetap terkendali.
- Meningkatnya pengangguran usia muda menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Tingkat pengangguran usia 15–24 tahun yang mencapai 17,50 persen menunjukkan bahwa banyak anak muda masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan pengalaman dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan program magang agar anak muda lebih siap memasuki dunia kerja.
- Kenaikan harga bahan pokok di Solo perlu diikuti pengawasan pasokan. Kenaikan harga daging ayam dan cabai dapat menambah pengeluaran masyarakat. Kondisi ini perlu diperhatikan menjelang Natal dan Tahun Baru ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi bahan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas.
- Kenaikan harga tepung dapat memengaruhi biaya produksi usaha makanan. Harga tepung yang meningkat dapat menambah biaya produksi bagi industri makanan dan usaha kecil. Jika kenaikan terus terjadi, pelaku usaha mungkin perlu menyesuaikan harga jual produknya.

Karena itu, pemerintah perlu memeriksa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi tepung agar kegiatan usaha tetap berjalan.

- Penurunan kepatuhan pajak kendaraan dapat mengurangi penerimaan daerah. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah turun menjadi 57 persen pada Oktober 2026. Kondisi ini membuat penerimaan pajak berisiko tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan, memberikan kemudahan pembayaran, dan mengevaluasi program keringanan pajak agar masyarakat lebih terdorong membayar kewajibannya.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan kuatnya peran industri dan perdagangan. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83 persen pada triwulan III 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh industri pengolahan dan perdagangan serta peningkatan ekspor barang industri. Kondisi tersebut dapat membuka peluang peningkatan produksi dan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu menjaga iklim usaha agar pertumbuhan industri dapat terus berlangsung.
- Penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI memberikan manfaat bagi usaha lokal. Kegiatan tersebut meningkatkan kunjungan masyarakat ke Semarang dan mendorong aktivitas hotel, transportasi, serta usaha makanan. Keterlibatan sekitar 150 usaha mikro, kecil, dan menengah juga membuka peluang peningkatan penjualan produk lokal. Kegiatan berskala besar seperti ini dapat terus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
- Perlambatan investasi perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk mempertahankan minat investor. Pemerintah daerah perlu memperbaiki pelayanan perizinan, menyediakan infrastruktur pendukung, dan menjaga kepastian usaha agar investasi dapat terus berkembang.
- Penerimaan retribusi tenaga kerja asing di Batang membutuhkan pencatatan yang lebih baik. Penerimaan retribusi yang mencapai Rp3,89 miliar atau 155 persen dari target menunjukkan besarnya aktivitas industri di wilayah tersebut. Namun, perubahan status kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus menimbulkan penyesuaian dalam pencatatan penerimaan. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menyelaraskan data agar pengelolaan retribusi berjalan lebih tertib dan tepat.
- Penurunan kemiskinan di Kudus perlu dipertahankan melalui program pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat kemiskinan Kudus turun dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen, sedangkan indeks pembangunan manusia meningkat. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu melanjutkan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi agar program pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan dapat memberikan manfaat lebih luas.
- Kegiatan olahraga dan usaha pedagang kaki lima dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kudus. Kegiatan olahraga berskala besar dapat mendatangkan pengunjung dan meningkatkan permintaan terhadap makanan, penginapan, serta jasa lainnya. Pedagang kaki lima juga dapat memperoleh tambahan pendapatan dari meningkatnya aktivitas masyarakat. Pemerintah perlu menata lokasi usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban kota.
- Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi perubahan global. Perubahan perdagangan, inflasi, suku bunga, dan investasi internasional dapat memengaruhi nilai tukar serta kondisi pasar keuangan Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada kondisi luar negeri.
- Pertumbuhan ekonomi perlu disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan produksi dan investasi perlu diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja serta daya beli. Pemerintah perlu mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memperluas lapangan pekerjaan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

- Kerja sama pemerintah dan dunia usaha penting untuk mendorong pembangunan daerah. Perkembangan industri, perdagangan, investasi, dan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Berita Rabu, 11 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan perekonomian internasional pada 11 November 2026 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya inflasi, ketidakpastian kebijakan moneter, serta perubahan kondisi pasar keuangan di berbagai negara. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2026 yang melampaui perkiraan pasar dan memperkuat kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) pada Desember mendatang. Kenaikan inflasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih belum sepenuhnya terkendali, meskipun sebelumnya The Fed telah mempertahankan suku bunga pada Oktober. Kondisi ini menjadi perhatian karena inflasi yang terus meningkat dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus mendorong bank sentral untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat. Dengan demikian, perkembangan inflasi Amerika Serikat tidak hanya menjadi persoalan bagi perekonomian domestiknya, tetapi juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan negara-negara lain.

Tekanan inflasi Amerika Serikat tersebut semakin terlihat dari kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan, perumahan, listrik, asuransi kendaraan, transportasi, hingga layanan kesehatan. Pada Oktober 2026, indeks harga konsumen meningkat sebesar 0,4% secara bulanan, sedangkan inflasi inti naik sebesar 0,3%, sehingga menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terjadi pada berbagai kelompok barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin membebani masyarakat karena peningkatan biaya hidup tidak selalu diikuti oleh kenaikan upah yang sebanding, sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut tertekan. Di tengah keadaan tersebut, sejumlah pejabat The Fed mulai memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi. Bahkan, pasar mulai memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, dengan peluang kenaikan yang lebih besar apabila tekanan inflasi kembali meningkat. Perubahan perkiraan kebijakan tersebut kemudian memengaruhi keputusan para investor dalam menempatkan dananya, terutama karena suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan Amerika Serikat dibandingkan aset di negara lain.

Perubahan ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed selanjutnya memicu tekanan pada pasar obligasi, saham, dan mata uang internasional. Investor mulai melakukan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat sehingga imbal hasil US Treasury tenor dua tahun meningkat menjadi 4,73%, sedangkan tenor sepuluh tahun naik dan kembali mendekati 5%. Kenaikan imbal hasil tersebut turut memengaruhi pasar obligasi di sejumlah negara, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Pada saat yang sama, penguatan dolar AS memberikan tekanan terhadap mata uang negara lain, sementara bursa saham di kawasan Asia dan Wall Street mengalami pelemahan akibat meningkatnya kehati-hatian investor. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dapat memengaruhi arus modal internasional secara luas. Dampaknya juga terlihat pada poundsterling yang melemah 0,2% menjadi US$1,331 akibat meningkatnya permintaan terhadap dolar AS. Selain penguatan dolar, kenaikan harga minyak mentah turut menjadi tantangan bagi Inggris karena dapat meningkatkan biaya energi dan memperbesar tekanan

inflasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global tidak hanya berkaitan dengan kebijakan suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan harga energi dan kondisi geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian setiap negara.

Di tengah tekanan ekonomi global tersebut, perkembangan investasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di kawasan Asia Tenggara justru menunjukkan adanya peluang pertumbuhan baru melalui penguatan infrastruktur teknologi. Malaysia menjadi salah satu negara yang memperoleh perhatian investor melalui rencana investasi gabungan Grab, SoftBank, dan Petroleum Sarawak (Petros) dengan nilai awal sebesar US$2,85 miliar atau sekitar Rp51,56 triliun untuk mengembangkan infrastruktur komputasi AI. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknologi digital, menarik lebih banyak investor, serta membuka peluang pengembangan industri manufaktur tingkat lanjut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional, investasi pada sektor teknologi masih memiliki daya tarik karena dinilai mampu menciptakan peluang ekonomi jangka panjang. Apabila dikaitkan dengan kondisi global secara keseluruhan, perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan arah pertumbuhan, yaitu sebagian negara masih berjuang menghadapi tekanan inflasi dan ketidakstabilan keuangan, sedangkan negara lain mulai memperkuat fondasi ekonominya melalui investasi teknologi. Situasi internasional inilah yang kemudian perlu diperhatikan Indonesia karena perubahan suku bunga, penguatan dolar AS, dan pergerakan investasi global dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian nasional.

Pengaruh perkembangan ekonomi internasional tersebut mulai terlihat pada kondisi pasar keuangan Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada perdagangan 11 November 2026, rupiah spot ditutup melemah sebesar 0,48% menjadi Rp18.149 per dolar AS, sedangkan kurs JISDOR mengalami pelemahan sebesar 0,52% menjadi Rp18.154 per dolar AS. Pelemahan ini tidak terlepas dari penguatan dolar AS setelah munculnya perkiraan bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga, sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya di negara berkembang. Selain faktor eksternal tersebut, kondisi dalam negeri juga turut memengaruhi sentimen pasar, terutama menjelang pengumuman hasil peninjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia pada 12 November 2026 serta adanya ketidakpastian politik domestik. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat investor semakin memperhatikan risiko dalam mengambil keputusan investasi. Apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan meningkatnya biaya impor, terutama untuk energi dan bahan baku yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Oleh karena itu, menjaga stabilitas nilai tukar, kepercayaan investor, dan kepastian kebijakan menjadi hal penting agar tekanan ekonomi global tidak berkembang menjadi hambatan yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Untuk menghadapi tekanan tersebut sekaligus menjaga kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah Indonesia berupaya memperluas sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi global berdenominasi yuan atau Panda Bond untuk kedua kalinya. Penerbitan tahap kedua mencapai CNY10 miliar atau sekitar Rp27,08 triliun, sedangkan total pemesanan dari investor mencapai CNY17,26 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun. Tingginya permintaan tersebut menunjukkan adanya minat investor terhadap instrumen pembiayaan yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Obligasi ini ditawarkan dalam tiga pilihan tenor, yaitu tiga, lima, dan tujuh tahun, dengan tingkat kupon masing-masing sebesar 1,96%, 2,15%, dan 2,50%. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 sekaligus memperluas basis investor internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS. Namun, penggunaan mata uang yuan juga perlu dikelola secara hati-hati karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi beban pembayaran utang ketika dikonversikan ke rupiah. Selain memperkuat pembiayaan negara, pemerintah juga berupaya memperluas akses modal bagi masyarakat melalui peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp325 triliun pada 2027, dibandingkan target 2026 sebesar Rp295 triliun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM, nelayan, serta pemilik kekayaan intelektual memperoleh pembiayaan yang

lebih mudah sehingga kegiatan usaha dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Sejalan dengan upaya memperluas pembiayaan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional melalui tambahan likuiditas sebesar Rp149,3 triliun kepada sektor perbankan untuk mendorong pembiayaan UMKM dan perumahan. Tambahan likuiditas tersebut berasal dari pelonggaran rasio cadangan wajib yang menyediakan sekitar Rp84,3 triliun untuk mendukung pembiayaan UMKM serta sekitar Rp65 triliun untuk sektor perumahan. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan. Dukungan tersebut juga terlihat dari realisasi Kredit Program Perumahan hingga 10 November 2026 yang mencapai Rp29,60 triliun kepada 121.301 debitur atau sekitar 59,2% dari target plafon Rp50 triliun. Pembiayaan ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dan memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga mendorong kegiatan usaha di sektor konstruksi, perdagangan bahan bangunan, dan jasa pendukung lainnya. Di sisi lain, aktivitas perdagangan dalam negeri juga didukung oleh tingkat keyakinan konsumen dan aktivitas industri yang masih menunjukkan perkembangan positif. Pemanfaatan QRIS yang telah menjangkau lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant turut memperlihatkan semakin luasnya penggunaan transaksi digital dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan tersebut kemudian semakin diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US$119 miliar pada 2026, terutama didorong oleh sektor perdagangan elektronik, media online, mobilitas, dan layanan makanan digital. Dengan demikian, dukungan pembiayaan perbankan, penguatan sektor perumahan, serta perkembangan transaksi digital menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperluas kesempatan usaha masyarakat.

Berbagai upaya penguatan ekonomi nasional tersebut juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan perekonomian daerah, khususnya Jawa Tengah yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik pada triwulan III 2026. Berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 5,83% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,75% dan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47%. Peningkatan ini terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, sedangkan dari sisi lapangan usaha pertumbuhan banyak ditopang oleh industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sebesar 58,76% terhadap PDRB masih tumbuh di atas 4%, menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, investasi tumbuh sebesar 5,43%, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,84%. Di sisi lain, realisasi investasi asing dan dalam negeri masih menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 16,78% secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlambatan pada pertumbuhan investasi, minat penanaman modal di Jawa Tengah masih cukup kuat. Perkembangan ini kemudian memberikan dukungan terhadap sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 6,73% dan sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 8,29%. Bahkan, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan sebesar 14,06%, yang turut didukung oleh berbagai kegiatan berskala nasional seperti MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang. Dengan demikian, peningkatan aktivitas konsumsi, investasi, produksi, dan perdagangan menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan industri baru dan percepatan pelayanan perizinan bagi para investor. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan terhadap rencana pembukaan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, dengan tahapan awal verifikasi yang ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam 30 hari. Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan dapat mempermudah investor memperoleh lokasi usaha sekaligus mempercepat proses perizinan sehingga kegiatan investasi dapat segera direalisasikan. Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah juga menilai bahwa keberadaan kawasan industri baru dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan KEK Industropolis Batang yang tidak hanya berfokus pada kegiatan industri, tetapi juga mulai mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program sertifikasi bagi pelaku industri kreatif. Meskipun demikian, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masih dihadapkan pada persoalan ketenagakerjaan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Tengah mencapai 6.860 orang, sehingga menempatkan provinsi ini dalam tiga besar daerah dengan laporan PHK terbanyak secara nasional. Sektor tekstil menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak akibat persoalan bahan baku, penurunan pesanan, dan kondisi pasar. Namun, pemerintah daerah menyebutkan bahwa sebenarnya tersedia sekitar 160.000 lowongan pekerjaan, lebih tinggi dibandingkan jumlah pencari kerja terdaftar yang mencapai sekitar 130.000 orang. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan keterampilan, bidang pekerjaan, dan lokasi yang diinginkan pencari kerja. Oleh karena itu, peningkatan investasi perlu diikuti dengan pelatihan keterampilan, penyelenggaraan bursa kerja, serta pendampingan bagi pekerja yang terkena PHK agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Selain persoalan ketenagakerjaan, pemerataan kesejahteraan dan penguatan usaha masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat dari perkembangan Kabupaten Kudus yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,59% pada 2025 menjadi 6,41% pada 2026. Penurunan tersebut antara lain didukung oleh berkembangnya sektor informal, seperti pedagang kopi keliling, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, dan berbagai usaha kecil lainnya yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus juga memberikan dukungan melalui program beasiswa dan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 32.000 pekerja rentan untuk membantu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Sementara itu, di Kota Pekalongan, KADIN berupaya memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk, pemahaman terhadap kebutuhan pasar, dan pemanfaatan pemasaran digital agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari luar daerah maupun luar negeri. Langkah tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi perusahaan besar dan kegiatan industri, tetapi juga membutuhkan peran usaha kecil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Secara keseluruhan, rangkaian perkembangan ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kondisi global, kebijakan pemerintah, aktivitas investasi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Tekanan inflasi serta ketidakpastian pasar keuangan internasional perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi nasional yang tepat, sementara dukungan pembiayaan, digitalisasi, dan pengembangan investasi harus terus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan dalam negeri. Di Jawa Tengah, peluang pertumbuhan melalui kawasan industri, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif perlu dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan persoalan PHK, kualitas tenaga kerja, serta pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan dan besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan daya beli, memperkuat usaha masyarakat, dan memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata serta berkelanjutan.

Ringkasan

- Inflasi Amerika Serikat masih mengalami peningkatan dan memberikan tekanan terhadap perekonomian. Pada Oktober 2026, inflasi Amerika Serikat tercatat naik sebesar 0,4% secara bulanan, sedangkan inflasi inti meningkat 0,3%. Kenaikan tersebut melampaui perkiraan pasar dan menunjukkan bahwa tekanan harga masih belum terkendali. Peningkatan biaya terjadi pada sejumlah kebutuhan, seperti makanan, perumahan, listrik, asuransi kendaraan, transportasi, dan layanan kesehatan, sehingga semakin membebani daya beli masyarakat.
- Kenaikan inflasi mendorong munculnya perkiraan bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Kondisi inflasi yang masih tinggi membuat pasar memperkirakan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, bahkan peluang kenaikan yang lebih besar juga menjadi perhatian apabila tekanan harga terus berlanjut. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan memengaruhi aktivitas ekonomi Amerika Serikat, sekaligus memberikan dampak terhadap pergerakan modal dan pasar keuangan internasional.
- Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat menyebabkan tekanan pada pasar obligasi, saham, dan mata uang global. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor dua tahun meningkat menjadi 4,73%, sedangkan tenor sepuluh tahun mendekati 5%. Kenaikan imbal hasil tersebut turut mendorong peningkatan imbal hasil obligasi di sejumlah negara, sementara pasar saham mengalami pelemahan dan dolar AS menguat. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga The Fed memiliki pengaruh luas terhadap keputusan investasi dan stabilitas pasar keuangan berbagai negara.
- Pelemahan poundsterling dan meningkatnya tekanan biaya energi menjadi tantangan bagi perekonomian Inggris. Poundsterling melemah sekitar 0,2% menjadi US$1,331 akibat penguatan dolar AS dan perubahan sentimen pasar. Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya impor energi dan memperbesar tekanan inflasi di Inggris. Bank sentral Inggris juga menghadapi tantangan dalam menentukan kebijakan suku bunga, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 0,7% secara kuartalan.
- Investasi infrastruktur kecerdasan buatan di Malaysia menunjukkan peluang pertumbuhan baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Grab, SoftBank, dan Petros merencanakan investasi dengan nilai awal sebesar US$2,85 miliar atau sekitar Rp51,56 triliun untuk pengembangan infrastruktur komputasi AI. Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknologi digital, menarik investasi lanjutan, serta mendukung pengembangan industri manufaktur tingkat lanjut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor teknologi masih menjadi salah satu bidang yang menarik bagi investor karena memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang.
- Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa kondisi pasar keuangan Indonesia masih dipengaruhi oleh tekanan ekonomi internasional. Pada perdagangan 11 November 2026, rupiah melemah sebesar 0,48% menjadi Rp18.149 per dolar AS, sedangkan kurs JISDOR turun 0,52% menjadi Rp18.154 per dolar AS. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan perkiraan kenaikan suku bunga The Fed, disertai ketidakpastian terkait peninjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia serta perkembangan politik dalam negeri. Situasi ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor agar tekanan eksternal tidak semakin membebani perekonomian nasional.
- Pemerintah memperluas sumber pembiayaan melalui penerbitan Panda Bond untuk memenuhi kebutuhan pendanaan negara. Penerbitan obligasi berdenominasi yuan tahap kedua mencapai CNY10 miliar atau sekitar Rp27,08 triliun, dengan jumlah pemesanan investor sebesar CNY17,26 miliar. Obligasi tersebut ditawarkan dalam tenor tiga, lima, dan tujuh tahun dengan kupon masing-masing 1,96%, 2,15%, dan 2,50%. Tingginya permintaan menunjukkan adanya minat investor terhadap instrumen pembiayaan Indonesia, sekaligus menjadi upaya pemerintah

untuk memperluas basis investor internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar pendanaan berbasis dolar AS.

- Target penyaluran Kredit Usaha Rakyat ditingkatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Pemerintah menetapkan target KUR 2027 sebesar Rp325 triliun, meningkat dibandingkan target 2026 sebesar Rp295 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM, nelayan, dan kelompok usaha lainnya memperoleh modal dengan lebih mudah sehingga kapasitas produksi dan kegiatan usaha dapat berkembang. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran usaha kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- Bank Indonesia memberikan tambahan likuiditas untuk mendorong pembiayaan UMKM dan sektor perumahan. Tambahan likuiditas yang disediakan mencapai Rp149,3 triliun, terdiri atas Rp84,3 triliun untuk mendukung pembiayaan UMKM dan Rp65 triliun untuk sektor perumahan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pelonggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi 7%, sehingga perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar pembiayaan kegiatan usaha dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan maupun perbaikan rumah.
- Realisasi pembiayaan perumahan menunjukkan adanya dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dan aktivitas sektor konstruksi. Hingga 10 November 2026, Kredit Program Perumahan telah mencapai Rp29,60 triliun dan disalurkan kepada 121.301 debitur. Pembiayaan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Dampaknya juga berpotensi dirasakan oleh sektor konstruksi, perdagangan bahan bangunan, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
- Aktivitas konsumsi dan industri nasional masih menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat sebesar 119,9, sementara indeks penjualan riil tumbuh 1,4% dan PMI manufaktur mencapai 54. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi masih berjalan dengan cukup baik. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama ketika Indonesia menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah dan ketidakpastian pasar global.
- Perluasan transaksi digital semakin memperkuat kegiatan ekonomi dan sistem pembayaran nasional. Penggunaan QRIS telah menjangkau lebih dari 66 juta pengguna dan sekitar 45 juta merchant, menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha. Perkembangan tersebut membantu mempermudah transaksi, memperluas akses layanan keuangan, serta mendukung kegiatan perdagangan. Peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang semakin besar.
- Ekonomi digital Indonesia diperkirakan terus berkembang dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$119 miliar atau sekitar Rp2.149 triliun pada 2026. Sektor perdagangan elektronik diperkirakan mencapai US$85 miliar dengan pertumbuhan 16%, media online sebesar US$12 miliar dengan pertumbuhan 29%, serta sektor mobilitas dan pengiriman makanan sebesar US$11 miliar. Selain itu, pembiayaan digital juga mengalami pertumbuhan sebesar 22%, sementara nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan dapat mencapai US$446 miliar pada 2035. Perkembangan ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi digital dalam mendukung perdagangan, layanan, dan kegiatan usaha masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya dan pertumbuhan nasional. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,83% secara tahunan, meningkat dari 5,75% pada triwulan II 2026 dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%. Peningkatan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta perkembangan sejumlah lapangan usaha

utama. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih cukup kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional dan internasional.

- Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 58,76% terhadap perekonomian daerah, sehingga aktivitas belanja masyarakat masih menjadi penggerak utama pertumbuhan. Sementara itu, investasi tumbuh sebesar 5,43%, dan realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri meningkat 16,78% secara tahunan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa permintaan masyarakat dan kegiatan penanaman modal masih memberikan dukungan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan di Jawa Tengah.
- Sejumlah sektor usaha di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi daerah. Industri pengolahan tumbuh sebesar 6,73%, sektor perdagangan meningkat 8,29%, sedangkan sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan sebesar 14,06%. Selain itu, ekspor mengalami peningkatan sebesar 19,21%, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Kegiatan berskala nasional seperti MTQ Nasional XXXI di Semarang juga mendukung pergerakan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, penginapan, dan konsumsi masyarakat.
- Pemerintah Jawa Tengah terus mendorong investasi melalui pengembangan kawasan industri baru. Terdapat rencana pengembangan 12 kawasan industri baru di sejumlah wilayah yang diharapkan dapat menarik investor dan memperluas pusat kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah juga mendorong percepatan proses verifikasi dan perizinan agar pengembangan kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas industri, memperluas kegiatan produksi, dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Realisasi investasi Jawa Tengah hingga September 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup besar dan berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja. Nilai investasi pada Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun melalui 82.420 proyek dan mampu menyerap sekitar 340.334 tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target investasi sebesar Rp99,09 triliun. Selain pengembangan kawasan industri, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi kreatif, termasuk melalui kegiatan sertifikasi pengelolaan acara dan penyediaan ruang kreatif di kawasan Batang agar peluang ekonomi dapat berkembang pada sektor yang lebih beragam.
- Persoalan pemutusan hubungan kerja masih menjadi tantangan bagi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 6.860 orang, sehingga Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak. Di sisi lain, terdapat sekitar 160.000 lowongan pekerjaan, sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar mencapai sekitar 130.000 orang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan keterampilan, kebutuhan perusahaan, dan pilihan lokasi para pencari kerja. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan pelatihan menjadi penting agar kesempatan kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
- Pemerintah juga memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena PHK melalui program perlindungan dan peningkatan keterampilan. Salah satu dukungan yang tersedia adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan program. Selain bantuan tersebut, pekerja juga dapat memperoleh pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri memasuki kembali pasar kerja. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kehilangan pekerjaan sekaligus memperbaiki kesesuaian antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan.

- Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kudus turun dari 6,59% menjadi 6,41%, yang antara lain didukung oleh kegiatan ekonomi sektor informal seperti pedagang kecil, pengemudi ojek daring, dan berbagai usaha masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 32.000 pekerja rentan agar mereka memperoleh perlindungan sosial yang lebih baik. Upaya tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sektor informal dan perlindungan pekerja dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan UMKM di Kota Pekalongan dilakukan melalui peningkatan kualitas produk dan pemanfaatan pemasaran digital. KADIN mendorong pelaku usaha agar lebih memahami kebutuhan pasar, memperbaiki mutu produk, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Langkah ini penting agar produk UMKM lokal mampu bersaing dengan produk dari daerah lain dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Penguatan UMKM juga diharapkan dapat menciptakan peluang usaha, menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Implikasi

- Kenaikan inflasi Amerika Serikat dapat memperpanjang tekanan ekonomi global. Inflasi yang meningkat menunjukkan bahwa harga berbagai kebutuhan masyarakat masih mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat karena biaya hidup semakin tinggi. Jika berlangsung terus-menerus, permintaan terhadap barang dan jasa berpotensi melemah. Dampaknya juga dapat dirasakan negara lain yang memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat.
- Kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed dapat memengaruhi arus investasi internasional. Suku bunga yang lebih tinggi membuat investor semakin tertarik menempatkan dana pada aset keuangan Amerika Serikat. Akibatnya, aliran modal dari negara berkembang berpotensi berkurang. Kondisi tersebut dapat menekan nilai tukar dan pasar keuangan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, perubahan kebijakan The Fed perlu diantisipasi oleh berbagai negara.
- Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya pembiayaan negara lain. Yield US Treasury yang semakin tinggi membuat obligasi Amerika Serikat lebih menarik bagi investor. Negara lain perlu menawarkan imbal hasil yang kompetitif agar tetap mampu menarik investasi. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya penerbitan surat utang dan pembiayaan pemerintah. Negara berkembang juga perlu menjaga kepercayaan investor agar tidak mengalami tekanan pendanaan.
- Penguatan dolar AS dapat meningkatkan biaya impor bagi negara lain. Kondisi ini terlihat dari pelemahan poundsterling yang mencapai 0,2% menjadi US$1,331. Mata uang yang melemah membuat pembelian barang impor menjadi lebih mahal. Dampaknya dapat dirasakan pada sektor energi, bahan baku, dan perdagangan internasional. Jika berlangsung lama, kenaikan biaya impor juga berpotensi mendorong inflasi dalam negeri.
- Kenaikan harga energi dapat menambah tekanan terhadap perekonomian Inggris. Sebagai negara pengimpor energi, Inggris berisiko menghadapi peningkatan biaya impor ketika harga minyak naik. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga dapat membebani rumah tangga dan perusahaan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Ketidakpastian geopolitik dapat memperburuk kondisi perdagangan dan pasokan energi dunia. Konflik internasional berpotensi mengganggu distribusi energi dan meningkatkan biaya perdagangan. Jika gangguan berlangsung lama, kegiatan produksi di berbagai negara dapat ikut terdampak. Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan bank sentral dalam menentukan kebijakan

suku bunga. Oleh sebab itu, perkembangan geopolitik perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

- Investasi AI di Malaysia dapat memperkuat perkembangan ekonomi digital Asia Tenggara. Rencana investasi Grab, SoftBank, dan Petros senilai US$2,85 miliar menunjukkan besarnya minat terhadap teknologi kecerdasan buatan. Investasi tersebut dapat memperkuat infrastruktur digital dan mendukung industri manufaktur tingkat lanjut. Selain itu, pengembangan teknologi dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Negara-negara Asia Tenggara juga perlu meningkatkan daya saing agar mampu menarik investasi serupa.
- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan menekan kegiatan usaha. Nilai tukar rupiah yang melemah menjadi Rp18.149 per dolar AS menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tekanan eksternal. Kondisi ini dapat membuat harga bahan baku, energi, dan barang impor menjadi lebih mahal. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku luar negeri berpotensi mengalami peningkatan biaya produksi. Jika biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga barang dalam negeri juga dapat meningkat.
- Ketidakpastian pasar keuangan dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Peninjauan MSCI dan perkembangan politik domestik menjadi perhatian pelaku pasar. Ketidakpastian tersebut dapat mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika tekanan meningkat, pasar saham dan arus investasi berpotensi mengalami pelemahan. Karena itu, kepastian kebijakan dan transparansi pasar perlu terus diperkuat.
- Penerbitan Panda Bond dapat memperluas sumber pembiayaan pemerintah. Penerbitan obligasi senilai CNY10 miliar menunjukkan upaya pemerintah memperoleh pendanaan dari pasar keuangan Tiongkok. Tingginya permintaan investor juga mencerminkan adanya minat terhadap instrumen tersebut. Pembiayaan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan APBN dan memperluas basis investor internasional. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan risiko perubahan nilai tukar yuan terhadap rupiah.
- Peningkatan target KUR dapat memperkuat perkembangan UMKM. Target KUR 2027 sebesar Rp325 triliun memberikan peluang pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku usaha. Tambahan modal dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan bisnis. Dengan demikian, UMKM berpeluang memperluas pasar dan menambah tenaga kerja. Penyaluran KUR juga perlu disertai pendampingan agar dana digunakan secara produktif.
- Tambahan likuiditas Bank Indonesia dapat mendorong penyaluran kredit kepada sektor produktif. Tambahan likuiditas sebesar Rp149,3 triliun memberikan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. Dukungan tersebut diarahkan kepada UMKM dan sektor perumahan. Jika penyalurannya berjalan efektif, kegiatan usaha dan pembangunan perumahan dapat meningkat. Hal ini juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sektor pendukung lainnya.
- Pembiayaan perumahan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor konstruksi dan perdagangan. Realisasi Kredit Program Perumahan sebesar Rp29,60 triliun menunjukkan adanya dukungan terhadap kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat meningkatkan permintaan bahan bangunan dan jasa konstruksi. Pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok juga berpeluang memperoleh manfaat. Dengan demikian, sektor perumahan dapat menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi.
- Kondisi konsumsi dan industri yang positif dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 119,9 dan PMI manufaktur sebesar 54 menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih cukup baik. Perkembangan ini dapat mendukung kegiatan perdagangan dan produksi dalam negeri. Namun, kenaikan harga akibat pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai. Pemerintah perlu menjaga daya beli agar konsumsi masyarakat tidak mengalami penurunan.
- Penguatan kemitraan ritel dengan UMKM dapat memperluas pemasaran produk lokal. Kerja sama antara pelaku ritel dan UMKM dapat membuka akses pasar yang lebih luas. Pemanfaatan

teknologi digital juga membantu mempercepat transaksi dan distribusi produk. Dengan dukungan tersebut, UMKM memiliki peluang meningkatkan penjualan dan kualitas produk. Langkah ini dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

- Perluasan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat dan pelaku usaha. Jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai lebih dari 66 juta menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital. Sistem ini mempermudah transaksi dan membantu pelaku usaha menerima pembayaran. Perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, peningkatan kemampuan digital dan keamanan transaksi tetap perlu diperhatikan.
- Pertumbuhan ekonomi digital dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$119 miliar pada 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh perdagangan elektronik, media online, serta layanan mobilitas dan pengiriman makanan. Perkembangan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas. Penguatan keterampilan digital juga diperlukan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan tersebut.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat memperkuat peran daerah dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan sebesar 5,83% menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada di atas pertumbuhan nasional. Kondisi ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih berkembang dengan baik. Pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kegiatan usaha. Namun, pemerataan manfaat ekonomi tetap perlu diperhatikan.
- Konsumsi rumah tangga menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Kontribusinya yang mencapai 58,76% menunjukkan besarnya peran belanja masyarakat terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi sektor perdagangan, makanan, dan jasa untuk terus berkembang. Kegiatan MTQ Nasional XXXI juga dapat meningkatkan belanja pengunjung dan aktivitas UMKM. Oleh karena itu, daya beli masyarakat perlu dijaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
- Peningkatan investasi dapat memperluas kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Investasi yang tumbuh sebesar 5,43% menunjukkan adanya perkembangan kegiatan penanaman modal. Sementara itu, PMA dan PMDN tumbuh sebesar 16,78% secara tahunan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan memperluas kegiatan usahanya. Jika diikuti penyerapan tenaga kerja lokal, manfaat investasi akan semakin dirasakan masyarakat.
- Pertumbuhan industri pengolahan dan ekspor dapat meningkatkan daya saing Jawa Tengah. Industri pengolahan tumbuh sebesar 6,73%, sedangkan ekspor meningkat sebesar 19,21%. Perkembangan ini dapat mendorong peningkatan produksi dan kebutuhan bahan baku. Aktivitas logistik serta perdagangan juga berpotensi mengalami peningkatan. Namun, pelaku industri tetap perlu memperhatikan perubahan permintaan pasar internasional.
- Pertumbuhan perdagangan dan sektor akomodasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,29%, sedangkan akomodasi dan makan minum meningkat sebesar 14,06%. Kegiatan MTQ Nasional XXXI turut mendorong aktivitas penginapan, transportasi, kuliner, dan perdagangan. Kondisi ini memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan berskala nasional juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk lokal kepada pengunjung.
- Pengembangan kawasan industri dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Rencana pembukaan 12 kawasan industri baru berpotensi menarik lebih banyak investor. Kemudahan perizinan juga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan investasi. Jika terealisasi, kawasan tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan produksi. Namun, pembangunan perlu didukung infrastruktur dan kesiapan tenaga kerja.
- Peningkatan realisasi investasi dapat mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Investasi Jawa Tengah pada Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun melalui 82.420

proyek. Kegiatan tersebut mampu menyerap sekitar 340.334 tenaga kerja. Capaian ini menjadi modal untuk mencapai target investasi sebesar Rp99,09 triliun. Pemerintah perlu memastikan agar investasi berikutnya juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

- Pengembangan ekonomi kreatif di Batang dapat memperluas peluang usaha masyarakat. Program sertifikasi bagi pelaku industri kreatif dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Penyediaan ruang kreatif juga memberikan kesempatan bagi pelaku seni dan budaya untuk mengembangkan kegiatan. Jika berjalan berkelanjutan, sektor kreatif dapat menjadi sumber pendapatan baru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada industri manufaktur.
- Tingginya jumlah PHK dapat menekan pendapatan dan daya beli masyarakat. Jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Tengah mencapai 6.860 orang selama Januari hingga Oktober 2026. Kondisi ini dapat mengurangi pendapatan rumah tangga dan memengaruhi konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan pekerja dan membantu mereka memperoleh pekerjaan baru. Upaya tersebut penting agar dampak PHK tidak meluas terhadap kegiatan ekonomi daerah.
- Perbedaan jumlah lowongan dan keterampilan pencari kerja menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Terdapat sekitar 160.000 lowongan pekerjaan dan 130.000 pencari kerja terdaftar. Namun, kebutuhan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan keterampilan pencari kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan lowongan sulit terisi meskipun tersedia banyak kesempatan kerja. Pelatihan vokasi dan sertifikasi perlu diperkuat agar kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat membantu pekerja yang terdampak PHK. Manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah selama maksimal enam bulan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara. Program pelatihan juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan. Dukungan tersebut dapat membantu mereka mempersiapkan diri kembali memasuki pasar kerja. Dengan demikian, perlindungan pekerja perlu diikuti pendampingan pencarian pekerjaan.
- Penurunan kemiskinan di Kudus menunjukkan pentingnya penguatan sektor informal. Tingkat kemiskinan turun dari 6,59% menjadi 6,41%, salah satunya didukung kegiatan usaha masyarakat. Pedagang kecil dan pengemudi ojek daring menjadi contoh kegiatan ekonomi yang membantu menambah pendapatan. Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 32.000 pekerja rentan juga memperkuat perlindungan sosial. Upaya tersebut perlu dilanjutkan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
- Penguatan UMKM di Pekalongan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. KADIN mendorong pelaku usaha memperbaiki kualitas produk dan memahami kebutuhan pasar. Pemanfaatan pemasaran digital juga dapat memperluas jangkauan konsumen. Jika dilakukan secara konsisten, UMKM berpeluang meningkatkan penjualan dan memperluas usaha. Perkembangan ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
- Ketidakpastian ekonomi global menuntut Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan daerah. Tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, serta penguatan dolar AS dapat memengaruhi nilai tukar dan biaya impor. Pemerintah perlu menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan investor. Pada saat yang sama, konsumsi domestik dan investasi produktif perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi dampak perubahan ekonomi internasional.
- Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. Investasi dan pembangunan kawasan industri dapat membuka peluang pekerjaan baru. Namun, persoalan PHK dan ketidaksesuaian keterampilan masih perlu diselesaikan. Pemerintah perlu memperluas pelatihan kerja serta perlindungan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

- Kerja sama pemerintah, perbankan, investor, dan pelaku usaha diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dukungan pembiayaan perlu diarahkan pada kegiatan produktif dan pengembangan UMKM. Kemudahan investasi juga harus diikuti peningkatan kualitas tenaga kerja dan infrastruktur. Selain itu, digitalisasi perlu dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui kerja sama tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berita Kamis, 12 November 2026

Kesimpulan

Perkembangan perekonomian internasional, Indonesia, hingga Jawa Tengah menunjukkan berbagai kondisi yang saling berkaitan, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi, perubahan kebijakan moneter, ketidakpastian pasar keuangan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat internasional, sejumlah negara masih menghadapi tantangan ekonomi akibat kenaikan harga energi, konflik geopolitik, dan perubahan kebijakan suku bunga yang memengaruhi stabilitas pasar global. Kondisi tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya melalui penguatan dolar AS, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya ketidakpastian investasi. Sementara itu, di tingkat daerah, Jawa Tengah terus berupaya memperkuat perekonomian melalui bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri lokal, dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut masih dihadapkan pada persoalan kesejahteraan tenaga kerja dan kesenjangan upah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Salah satu perkembangan ekonomi internasional yang menjadi perhatian adalah meningkatnya tekanan inflasi di Jepang, sebagaimana terlihat dari kenaikan indeks harga barang korporasi atau Corporate Goods Price Index (CGPI) sebesar 7,1% secara tahunan pada Oktober 2026, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 6,8% pada September. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak bumi, batu bara, produk kimia, bahan baku, serta biaya tenaga kerja yang mulai diteruskan perusahaan kepada konsumen. Selain itu, konflik di Timur Tengah turut memperbesar tekanan harga karena Jepang masih sangat bergantung pada impor minyak, bahan baku, dan pangan. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh pelemahan yen yang menyebabkan biaya impor meningkat, sehingga tekanan terhadap harga barang dan jasa berpotensi terus berlanjut. Meningkatnya inflasi tersebut kemudian memperkuat perkiraan bahwa Bank of Japan (BOJ) akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan Desember 2026. Namun, keputusan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian secara keseluruhan agar pengendalian inflasi tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang.

Meningkatnya tekanan inflasi di Jepang tersebut juga berlangsung di tengah perubahan kondisi pasar keuangan internasional, terutama setelah dolar Amerika Serikat menguat hingga mencapai level tertinggi dalam 19 bulan terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Penguatan dolar AS didorong oleh data inflasi Oktober yang lebih tinggi daripada perkiraan serta pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) yang membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Perkembangan ini membuat investor semakin memperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat, sehingga dolar AS semakin diminati dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara lain. Salah satu mata uang yang terdampak adalah yen Jepang yang bergerak mendekati 160 per dolar AS akibat perbedaan arah kebijakan moneter antara The Fed dan BOJ. Pelemahan yen tersebut bahkan mendorong otoritas Jepang memberikan peringatan mengenai kemungkinan intervensi apabila nilai tukarnya terus mengalami tekanan. Di sisi lain, penguatan dolar AS turut memengaruhi pasar

komoditas, khususnya harga emas dunia yang turun 0,7% menjadi US$3.959,03 per ons troi. Penurunan tersebut terjadi karena penguatan dolar membuat emas semakin mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara ekspektasi kenaikan suku bunga meningkatkan daya tarik instrumen investasi berbunga dibandingkan emas yang tidak memberikan imbal hasil. Meskipun demikian, prospek emas dalam jangka menengah masih dinilai positif, sedangkan harga paladium justru mengalami kenaikan.

Selain perubahan kondisi pasar keuangan dan harga komoditas, perekonomian internasional juga diwarnai oleh perkembangan perdagangan, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. Amerika Serikat mengancam akan melipatgandakan tarif impor terhadap Meksiko apabila negara tersebut tidak menghentikan pergerakan sekitar 1.500 migran yang sebagian besar berasal dari negara-negara Amerika Tengah. Ancaman tersebut muncul ketika kedua negara masih melakukan negosiasi perdagangan, sehingga berpotensi menambah ketidakpastian hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral. Sementara itu, perkembangan berbeda terlihat di Inggris yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7% pada kuartal III-2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 0,5% pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Inggris masih memiliki ketahanan, meskipun menghadapi tekanan dari tingginya harga energi, biaya pinjaman, penurunan penjualan ritel, dan melemahnya kepercayaan konsumen. Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih tergolong kuat meskipun klaim awal tunjangan pengangguran meningkat menjadi 200.000 pada pekan yang berakhir 7 November 2026. Angka tersebut masih relatif rendah dan didukung oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1% pada Oktober. Berbagai perkembangan ini memperlihatkan bahwa perekonomian dunia masih menunjukkan kemampuan untuk tumbuh, tetapi ketidakpastian akibat inflasi, kebijakan suku bunga, dan hubungan perdagangan antarnegara tetap menjadi tantangan yang perlu diwaspadai.

Berbagai perkembangan ekonomi global tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui penguatan dolar AS yang semakin menekan nilai tukar rupiah. Pada perdagangan Kamis, 12 November 2026, rupiah ditutup melemah sebesar 0,6% ke level Rp18.232 per dolar AS dan menjadi posisi penutupan terlemah sepanjang sejarah. Pelemahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, tetapi juga diperburuk oleh sejumlah persoalan domestik, seperti kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah, serta berlanjutnya arus keluar modal asing. Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir tahun turut memberikan tekanan terhadap permintaan dolar AS. Kondisi tersebut juga tercermin dari kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara tenor 10 tahun menjadi 7,63%, yang menunjukkan adanya tekanan di pasar obligasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia masih berada pada posisi US$146,8 miliar pada akhir Oktober 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan devisa untuk mendukung stabilitas eksternal, tetapi tekanan terhadap rupiah tetap perlu diantisipasi agar tidak semakin memengaruhi aktivitas ekonomi, biaya impor, dan kepercayaan investor.

Tekanan terhadap perekonomian Indonesia tersebut semakin menjadi perhatian ketika kondisi pasar keuangan dihadapkan pada ketidakpastian politik dalam negeri setelah munculnya kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan politik tersebut menimbulkan perhatian pelaku pasar karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa pengaruh sentimen politik perlu dibedakan dari kondisi fundamental ekonomi agar dinamika politik tidak mengganggu kepercayaan pasar. Namun, kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa ketidakpastian politik yang berlangsung terlalu lama dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan menunda realisasi investasi dan pengembangan usaha. Pandangan serupa disampaikan Himpunan Kawasan Industri Indonesia yang menilai bahwa kepastian regulasi, stabilitas politik, biaya energi, serta konsistensi kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan investasi jangka

panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses ketatanegaraan berlangsung secara tertib dan sesuai konstitusi, sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, stabilitas politik dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan investor, memperkuat iklim usaha, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Di tengah tekanan nilai tukar dan ketidakpastian investasi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus berupaya memperkuat pembiayaan sektor produktif agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bank Indonesia telah menyalurkan tambahan likuiditas sekitar Rp149,3 triliun kepada perbankan, yang terdiri dari sekitar Rp84,3 triliun melalui penurunan rasio cadangan wajib dan Rp65 triliun dana sektor keuangan yang masuk ke perbankan. Tambahan likuiditas tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan. Kebijakan ini didukung oleh penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026 agar perbankan memiliki ruang pendanaan yang lebih besar untuk menyalurkan kredit. Selain itu, pemerintah tetap mendorong program Kredit Investasi Padat Karya dengan anggaran Rp600 miliar, meskipun realisasinya hingga menjelang akhir tahun masih kurang dari 30% dari target. Untuk meningkatkan pemanfaatannya, pemerintah berencana memperluas penggunaan kredit tersebut agar tidak hanya ditujukan bagi investasi, tetapi juga dapat digunakan untuk modal kerja. Sementara itu, kepemilikan Bank Indonesia terhadap Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.769,10 triliun atau sekitar 25,05% dari total SBN yang beredar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dukungan pembiayaan terhadap pemerintah, tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap pembelian SBN oleh bank sentral juga perlu diperhatikan agar tidak mengurangi daya tarik investor lainnya. Oleh sebab itu, penguatan pembiayaan sektor produktif perlu disertai dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati, sehingga tambahan likuiditas benar-benar dapat mendorong kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.

Selain memperkuat pembiayaan sektor produktif, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia pada 12 November 2026, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, terutama bawang merah yang meningkat 15,85% menjadi Rp43.500 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih, beras berbagai kualitas, cabai merah keriting, cabai rawit merah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, serta gula pasir. Bahkan, harga cabai rawit merah telah mencapai Rp103.500 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp99.200 per kilogram. Meskipun beberapa komoditas, seperti cabai merah besar dan cabai rawit hijau, mengalami penurunan harga, kenaikan pada sebagian besar kebutuhan pokok tetap berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena masyarakat juga menghadapi tekanan dari kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan pasokan, memperbaiki kelancaran distribusi, serta meningkatkan pengawasan harga agar kenaikan harga pangan tidak semakin membebani masyarakat. Upaya menjaga daya beli ini juga perlu berjalan seiring dengan kebijakan penguatan UMKM dan pembiayaan usaha, sehingga stabilitas ekonomi tidak hanya terjaga pada tingkat nasional, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke daerah.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, berbagai kebijakan ekonomi di Jawa Tengah juga diarahkan pada pemberian bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Salah satu langkah tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) tahun 2026 sebesar Rp2,385 miliar kepada 3.868 penerima manfaat yang terdiri dari buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban ekonomi keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai melalui PT Pos Indonesia agar prosesnya lebih transparan dan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang memenuhi

persyaratan. Selain melalui bantuan sosial, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk 15 titik kegiatan yang tersebar di tujuh kecamatan. Program tersebut difokuskan pada pembangunan jalan penghubung antardesa, pasar, jembatan, dan infrastruktur lainnya untuk memperlancar konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga warga tidak hanya memperoleh manfaat dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penyaluran bantuan di Sragen dan pembangunan infrastruktur di Blora menjadi dua bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa.

Pembangunan ekonomi daerah tersebut juga didukung oleh pengembangan potensi industri lokal dan pembenahan pengelolaan sumber pendapatan daerah agar perekonomian Jawa Tengah semakin berkembang. Salah satu potensi yang terlihat adalah industri kerajinan tempa besi di Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, yang berhasil mempertahankan keterampilan tradisional secara turun-temurun hingga mampu menembus pasar internasional. Para pande besi setempat tidak hanya menghasilkan pisau dapur, golok, dan peralatan pertanian, tetapi juga berbagai produk kerajinan seperti keris Nusantara, katana Jepang, pisau Kukri Nepal, dan pedang Shashka Rusia. Bahkan, katana hasil karya salah satu pengrajin, Yudi Istanto, telah digunakan untuk latihan pedang di salah satu dojo di Jepang. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan tradisional yang didukung kualitas produksi dan kemampuan menjaga standar produk dapat menjadi peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah melalui kegiatan ekspor. Oleh karena itu, pelestarian keterampilan, regenerasi pengrajin, dan dukungan pemerintah menjadi hal penting agar industri kerajinan tersebut dapat terus berkembang. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Blora juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan administrasi pertanahan dan sinkronisasi data perpajakan bersama Kantor Pertanahan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan data Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Identifikasi Bidang (NIB), luas tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta informasi peralihan hak agar potensi penerimaan daerah dapat diketahui secara lebih akurat. Selain meningkatkan pendapatan, pembenahan tersebut juga bertujuan mempercepat sertifikasi aset pemerintah daerah, mengurangi risiko sengketa tanah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kerajinan di Klaten dan pembenahan administrasi pertanahan di Blora menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui penguatan produk unggulan sekaligus pengelolaan potensi daerah secara lebih tertib dan optimal.

Meskipun berbagai upaya peningkatan ekonomi tersebut terus dilakukan, Jawa Tengah masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rendahnya standar upah buruh dibandingkan provinsi lain, meskipun memiliki nilai investasi industri yang cukup besar. Permasalahan tersebut mendorong ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (Kombat) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut reformasi sistem pengupahan. Para buruh menilai bahwa besarnya investasi yang masuk ke kawasan industri seperti Batang, Pekalongan, Kendal, Jepara, dan Demak belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan pekerja. Mereka menyoroti bahwa harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya perumahan relatif sama dengan wilayah lain, sedangkan upah minimum di sejumlah daerah Jawa Tengah masih tergolong rendah. Sebagai contoh, upah di Kabupaten Brebes disebut berada di sekitar Rp2,4 juta, Kota Tegal sekitar Rp2,49 juta, dan Kabupaten Jepara sekitar Rp2,7 juta. Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja, terutama bagi mereka yang telah memiliki tanggungan keluarga, sehingga sebagian buruh terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas dasar tersebut, para buruh menuntut agar perhitungan upah menggunakan acuan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan meminta pemerintah provinsi mengambil kebijakan untuk mengurangi kesenjangan upah antardaerah. Mereka juga menolak penggunaan formula pengupahan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2023 dan meminta agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dijadikan acuan dalam penetapan upah. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan

akan melakukan kajian dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pemerintah pusat. Persoalan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi perlu diikuti dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kebutuhan hidup pekerja, sehingga perkembangan industri tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Secara keseluruhan, berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah memiliki keterkaitan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan. Tekanan inflasi di Jepang, penguatan dolar AS, perubahan kebijakan suku bunga The Fed, serta ketidakpastian perdagangan dan geopolitik menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan harga komoditas. Pengaruh tersebut kemudian dirasakan Indonesia melalui pelemahan rupiah, meningkatnya tekanan terhadap pasar obligasi, serta kekhawatiran investor terhadap stabilitas politik dan iklim usaha. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan likuiditas perbankan, pembiayaan UMKM, dukungan terhadap sektor produktif, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Berbagai kebijakan tersebut juga tercermin dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah melalui penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan kerajinan lokal yang mampu menembus pasar ekspor, serta optimalisasi pendapatan daerah. Namun, seluruh upaya tersebut masih perlu diimbangi dengan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, khususnya kesenjangan upah yang selama ini menjadi tuntutan para buruh. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus tercermin dari stabilitas harga, kuatnya daya beli masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja. Kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara stabil, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat

Ringkasan

- Indeks harga barang korporasi Jepang (CGPI) pada Oktober 2026 naik 7,1% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 6,8% pada September. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak, batu bara, produk kimia, bahan baku, serta biaya tenaga kerja. Pelemahan yen juga membuat biaya impor semakin mahal, sehingga perusahaan menghadapi tekanan biaya yang lebih besar. Kondisi ini memperkuat perkiraan bahwa Bank of Japan (BOJ) akan kembali menaikkan suku bunga pada Desember 2026 untuk mengendalikan inflasi.
- Dolar AS mencapai posisi tertinggi dalam 19 bulan terhadap sejumlah mata uang utama setelah data inflasi Amerika Serikat pada Oktober lebih tinggi daripada perkiraan. Kondisi tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga, bahkan membuka kemungkinan kenaikan hingga 50 basis poin. Sebaliknya, yen Jepang bergerak mendekati 160 per dolar AS akibat perbedaan arah kebijakan moneter antara Amerika Serikat dan Jepang. Pelemahan yen ini turut meningkatkan perhatian pasar terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas mata uangnya.
- Harga emas dunia mengalami penurunan akibat penguatan dolar dan ekspektasi kenaikan suku bunga. Harga emas spot turun 0,7% menjadi US$3.959,03 per ons troi, sedangkan kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember 2026 melemah 0,9% menjadi US$3.964,50 per ons troi. Penurunan tersebut terjadi karena penguatan dolar membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sementara kenaikan suku bunga meningkatkan daya tarik instrumen investasi berbunga. Meskipun demikian, prospek emas dalam jangka menengah masih dinilai positif, sedangkan harga paladium justru mengalami kenaikan sebesar 0,5% menjadi US$1.032,83 per ons troi.

- Presiden Amerika Serikat mengancam akan melipatgandakan tarif impor terhadap Meksiko terkait persoalan migran. Donald Trump menyatakan bahwa tarif impor Meksiko dapat dinaikkan menjadi dua kali lipat apabila negara tersebut tidak menghentikan sekitar 1.500 migran yang bergerak menuju wilayah Amerika Serikat. Sebagian besar kelompok migran tersebut berasal dari negara-negara Amerika Tengah dan mulai bergerak dari wilayah selatan Meksiko. Ancaman tersebut muncul ketika kedua negara sedang melakukan negosiasi perdagangan, sehingga berpotensi menambah ketidakpastian hubungan ekonomi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko.
- Perekonomian Inggris tumbuh lebih cepat pada kuartal III-2026, sementara pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan. Ekonomi Inggris tumbuh 0,7% pada kuartal III-2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 0,5% pada kuartal sebelumnya. Bank of England memperkirakan ekonomi Inggris dapat tumbuh 1,6% sepanjang 2026, meskipun kenaikan harga energi, biaya pinjaman, dan melemahnya kepercayaan konsumen masih menjadi tantangan. Sementara itu, klaim awal tunjangan pengangguran Amerika Serikat meningkat 9.000 menjadi 200.000 pada pekan yang berakhir 7 November 2026. Walaupun meningkat, jumlah tersebut masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat relatif kuat.
- Nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai posisi terendah sepanjang sejarah. Pada perdagangan Kamis, 12 November 2026, rupiah ditutup melemah 0,6% ke level Rp18.232 per dolar AS. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, serta berlanjutnya arus keluar modal asing. Selain itu, kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara turut menunjukkan adanya tekanan di pasar obligasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa Indonesia masih terjaga sebesar US$146,8 miliar pada akhir Oktober 2026.
- Ketidakpastian politik dalam negeri menjadi perhatian bagi investor dan dunia usaha. Munculnya kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan perhatian terhadap stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Kalangan pengusaha menilai bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat membuat investor menunda keputusan penanaman modal, terutama pada proyek industri berskala besar yang membutuhkan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, kepastian arah kebijakan, konsistensi regulasi, stabilitas politik, dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
- Bank Indonesia terus memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Tambahan likuiditas yang disalurkan kepada perbankan mencapai sekitar Rp149,3 triliun, salah satunya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi 7%. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dan sektor perumahan. Selain itu, pemerintah tetap mendorong program Kredit Investasi Padat Karya dengan anggaran Rp600 miliar, meskipun realisasinya masih kurang dari 30%. Di sisi lain, kepemilikan Bank Indonesia terhadap Surat Berharga Negara mencapai Rp1.769,10 triliun atau sekitar 25,05% dari total SBN yang beredar.
- Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi tantangan bagi daya beli masyarakat. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, antara lain bawang merah, bawang putih, beras, cabai, minyak goreng, daging, dan gula pasir. Harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp103.500 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp99.200 per kilogram. Kenaikan harga tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengawasan harga perlu terus diperhatikan agar kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

- Pemerintah Kabupaten Sragen menyalurkan BLT DBHCHT untuk membantu buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Bantuan tahun 2026 tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp2,385 miliar dan diberikan kepada 3.868 penerima manfaat, dengan alokasi Rp600.000 untuk setiap orang. Penyaluran dilakukan secara nontunai melalui PT Pos Indonesia agar lebih transparan dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
- Kabupaten Blora memperoleh anggaran PISEW sebesar Rp7,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Anggaran tersebut digunakan untuk 15 titik kegiatan yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan alokasi Rp500 juta pada setiap titik. Pembangunan diprioritaskan pada jalan penghubung antardesa, tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan pasar, jembatan, dan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan warga desa sehingga program tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Untuk tahun 2027, Pemkab Blora juga telah mengusulkan 36 titik kegiatan di delapan kecamatan yang masih dalam proses verifikasi.
- Kerajinan tempa besi Desa Segaran, Klaten, berhasil mengembangkan produk tradisional hingga menembus pasar ekspor. Para pande besi di Desa Segaran dan wilayah sekitarnya mampu menghasilkan berbagai produk, mulai dari pisau dapur, golok, dan keris hingga katana Jepang, pisau Kukri Nepal, serta pedang Shashka Rusia. Keahlian tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terus dikembangkan dengan memperhatikan kualitas bahan serta karakteristik setiap produk. Bahkan, katana buatan salah satu pengrajin, Yudi Istanto, telah digunakan untuk latihan pedang di salah satu dojo di Jepang. Potensi ini menjadi salah satu produk unggulan Klaten yang perlu terus didukung dan dilestarikan agar dapat memperluas pasar serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Blora berupaya meningkatkan PAD melalui pembenahan administrasi pertanahan tanpa menambah beban masyarakat. Kerja sama dengan Kantor Pertanahan dilakukan untuk memperbaiki dan mengintegrasikan data pertanahan serta perpajakan, termasuk Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Identifikasi Bidang (NIB), luas tanah, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data pajak, mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, serta mempercepat sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. Selain itu, pembenahan administrasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi risiko sengketa pertanahan.
- Buruh di Jawa Tengah menuntut reformasi sistem pengupahan karena menilai upah yang diterima belum sebanding dengan biaya hidup. Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (Kombat) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyoroti kesenjangan upah di tengah besarnya investasi industri di sejumlah daerah. Mereka menilai harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan perumahan relatif sama dengan wilayah lain, sedangkan upah di beberapa daerah Jawa Tengah masih tergolong rendah. Sebagai contoh, upah di Kabupaten Brebes sekitar Rp2,4 juta, Kota Tegal sekitar Rp2,49 juta, dan Kabupaten Jepara sekitar Rp2,7 juta. Para buruh meminta agar perhitungan upah menggunakan acuan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menolak penggunaan PP Nomor 49 Tahun 2023 sebagai patokan, serta meminta penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan mengkaji usulan buruh dengan tetap mempertimbangkan regulasi pemerintah pusat.

Implikasi

- Kenaikan harga barang di Jepang menunjukkan bahwa tekanan biaya produksi masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Kenaikan harga bahan baku, energi, dan biaya tenaga kerja dapat mendorong perusahaan menaikkan harga jual. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi keputusan Bank Sentral Jepang dalam menentukan kebijakan suku bunga.
- Penguatan dolar AS dan pelemahan yen Jepang menunjukkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi dan kebijakan suku bunga antarnegara dapat memengaruhi nilai tukar. Dolar yang semakin kuat dapat meningkatkan biaya impor bagi negara yang menggunakan mata uang lain. Kondisi tersebut juga berpotensi menambah tekanan terhadap negara-negara yang memiliki ketergantungan pada impor.
- Penurunan harga emas dunia menunjukkan bahwa penguatan dolar AS dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga dapat mengurangi daya tarik emas. Perubahan tersebut dapat memengaruhi keputusan investor dalam memilih instrumen investasi. Sementara itu, kenaikan harga paladium menunjukkan bahwa pergerakan setiap komoditas logam mulia dapat berbeda sesuai kondisi pasarnya.
- Ancaman kenaikan tarif impor AS terhadap Meksiko berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Jika ancaman tersebut benar-benar diterapkan, biaya perdagangan dapat meningkat dan mengganggu aktivitas ekspor-impor. Situasi ini juga dapat menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang bergantung pada hubungan perdagangan AS dan Meksiko.
- Pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal III 2026 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi negara tersebut masih mengalami peningkatan. Namun, perkembangan ekonomi tetap perlu diperhatikan karena kebijakan suku bunga dan kondisi pasar tenaga kerja dapat memengaruhi pertumbuhan berikutnya. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi ke depan.
- Kenaikan klaim pengangguran awal di Amerika Serikat dapat menjadi salah satu tanda perubahan kondisi pasar tenaga kerja. Meskipun jumlah klaim masih tergolong rendah, perkembangan ini tetap perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku pasar. Kondisi ketenagakerjaan dapat memengaruhi keputusan bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.
- Kenaikan biaya bahan baku dan energi di Jepang dapat menambah tekanan terhadap kegiatan produksi perusahaan. Jika biaya tersebut terus meningkat, perusahaan berpotensi mengalami penurunan keuntungan atau menyesuaikan harga produknya. Hal ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi Jepang.
- Pelemahan yen hingga mendekati 160 per dolar AS dapat membuat barang impor Jepang menjadi lebih mahal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Pada akhirnya, kenaikan biaya impor dapat ikut mendorong kenaikan harga barang di pasar domestik.
- Meningkatnya ketidakpastian perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko dapat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnis lintas negara. Ancaman tarif yang lebih tinggi berpotensi mengganggu hubungan perdagangan dan meningkatkan biaya bagi perusahaan. Karena itu, perkembangan negosiasi perdagangan kedua negara perlu diperhatikan.
- Pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp18.232 per dolar AS menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia masih cukup besar. Kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar modal dan keluarnya dana asing turut menambah tekanan tersebut. Jika pelemahan berlanjut, biaya impor dapat meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.

- Dinamika politik terkait kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi kepercayaan dunia usaha dan investor. Ketidakpastian politik berpotensi membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, stabilitas nasional dan kepastian kebijakan perlu dijaga agar rencana investasi tetap berjalan.
- Dukungan likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp149,3 triliun menunjukkan upaya pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga ketersediaan pembiayaan. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat penyaluran kredit kepada UMKM dan sektor perumahan. Dengan dukungan tersebut, kegiatan usaha diharapkan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Penurunan Giro Wajib Minimum dari 9% menjadi 7% memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perbankan. Kebijakan ini dapat membantu bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan kepada sektor produktif. Namun, penyaluran kredit tetap perlu dilakukan secara tepat agar dana tersebut benar-benar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- Kenaikan harga berbagai kebutuhan pangan dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan harga cabai yang menembus Rp100 ribu per kilogram juga menambah beban pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, pengawasan pasokan dan kelancaran distribusi pangan perlu diperkuat agar kenaikan harga tidak berlangsung lebih lama.
- Besarnya kepemilikan BI terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan peran penting bank sentral dalam menjaga stabilitas pembiayaan pemerintah. Namun, kepemilikan yang besar juga perlu diperhatikan karena imbal hasil SBN yang rendah dapat mengurangi minat investor asing. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat sumber pembiayaan lainnya.
- Rendahnya realisasi Kredit Investasi Padat Karya yang belum mencapai 30% dari target Rp600 miliar menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada sektor padat karya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mendorong agar fasilitas kredit tersebut lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dengan begitu, pembiayaan dapat membantu mempertahankan kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
- Cadangan devisa Indonesia sebesar US$146,8 miliar pada akhir Oktober 2026 menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Cadangan devisa tersebut dapat mendukung langkah BI dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, stabilitas rupiah tetap membutuhkan pengelolaan ekonomi dan kepercayaan pasar yang baik.
- Penyaluran BLT DBHCHT sebesar Rp2,385 miliar kepada 3.868 pekerja di Sragen dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran secara nontunai juga mendukung proses pemberian bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
- Pembangunan infrastruktur melalui program PISEW di Kabupaten Blora dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah pedesaan. Pembangunan jalan, pasar, dan jembatan diharapkan mempermudah aktivitas masyarakat serta distribusi barang. Keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
- Keberhasilan pande besi Desa Segaran, Klaten, menembus pasar ekspor menunjukkan bahwa kerajinan tradisional memiliki peluang untuk berkembang di pasar internasional. Kemampuan menghasilkan berbagai produk besi dengan kualitas baik dapat meningkatkan pendapatan para perajin. Dukungan pemerintah dan pelestarian keterampilan juga penting agar usaha tersebut terus berkembang.
- Integrasi data pertanahan dan administrasi pajak di Blora dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah. Data yang lebih akurat dapat mempermudah pendataan objek pajak dan aset milik pemerintah. Dengan demikian, peningkatan pendapatan

daerah dapat diupayakan melalui perbaikan administrasi tanpa harus menambah beban pajak masyarakat.

- Aksi demonstrasi buruh di Jawa Tengah terkait tuntutan upah layak menunjukkan masih adanya kesenjangan antara upah pekerja dan kebutuhan hidup. Buruh menilai bahwa besarnya investasi di sejumlah daerah industri belum sepenuhnya diikuti dengan kesejahteraan pekerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan pengupahan lebih memperhatikan kebutuhan hidup layak.
- Tuntutan penerapan KHL sebesar 100 persen menunjukkan harapan buruh agar penetapan upah lebih sesuai dengan biaya kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah perlu mengkaji tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pekerja, kemampuan perusahaan, dan peraturan yang berlaku. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja juga diperlukan agar tercapai kesepakatan yang adil.
- Usulan penambahan titik program PISEW di Blora menjadi 36 lokasi pada 2027 menunjukkan adanya upaya memperluas pembangunan infrastruktur pedesaan. Jika usulan tersebut terealisasi, semakin banyak desa yang berpeluang memperoleh akses jalan dan fasilitas ekonomi yang lebih baik. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
- Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui sistem swakelola dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Selain membantu menyediakan fasilitas umum, kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pekerjaan pembangunan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya berupa infrastruktur, tetapi juga aktivitas ekonomi bagi warga.
- Pelestarian keterampilan pande besi di Desa Segaran, Klaten penting untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tradisional daerah. Keahlian yang diwariskan antargenerasi perlu terus dikembangkan agar kualitas produk tetap terjaga. Dukungan terhadap para perajin juga dapat membuka peluang usaha dan memperluas pemasaran produk ke pasar internasional.